

**STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DESA ERA PANDEMI COVID-19
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(STUDI KASUS PROGRAM JATIM PUSPA DI KABUPATEN
BONDOWOSO)**

TESIS



Oleh:

BAIJURI

NIM: 0839219028

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
2021**

STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DESA ERA PANDEMI COVID-19 DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PROGRAM JATIM PUSPA DI KABUPATEN BONDOWOSO)

TESIS

Diajukan Pada Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Magister Ekonomi (M.E)
Program Studi Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing

1. **Dr. Misbahul Munir, M.M**
2. **Dr. H. Moch. Chotib. S.Ag.,M.M**



Oleh:

BAIJURI
NIM: 0839219028

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PROGRAM PASCASARJANA
2021**

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “Strategi Pembangunan Ekonomi Desa Era Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Program JATIM PUSPA Di Kabupaten Bondowoso)” yang ditulis oleh Baijuri ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji tesis.

Jember, 26 Mei 2021

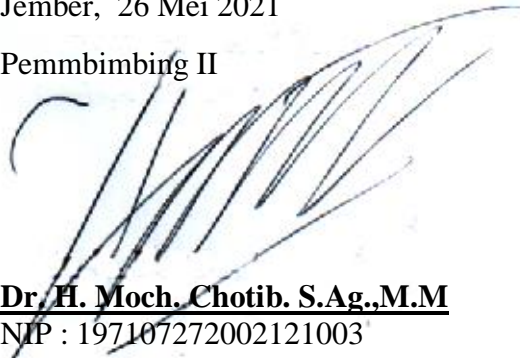
Pemmbimbing I



Dr. Misbahul Munir, M.M
NIP : 196712011993031001

Jember, 26 Mei 2021

Pemmbimbing II



Dr. H. Moch. Chotib. S.Ag., M.M
NIP : 197107272002121003

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Strategi Pembangunan Ekonomi Desa Era Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Program JATIM PUSPA Di Kabupaten Bondowoso)” yang ditulis oleh Baijuri ini, telah dipertahankan didepan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana IAIN Jember pada hari Senin 07 Juni 2021 dan diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E).

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Kun Wazis, M.I.Kom.

Anggota :

a. Penguji Utama : Dr. Hepni Zain, S.Ag.,M.M

b. Penguji I : Dr. Misbahul Munir, M.M

c. Penguji II : Dr. H. Moch. Chotib. S.Ag.,M.M

Jember, 21 Juni 2021

Mengesahkan
Pascasarjana IAIN Jember
Direktur



Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A.
NIP : 196101041987031006

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.¹ (QS. Al-Baqarah [02]: 245)

IAIN JEMBER

¹ Kementerian RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Bumi Restu, 1976

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang tiada henti kepada Allah SWT atas segala karunia serta nikmat yang diberikan kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tesis ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak tercinta (Misjan), sosok yang senantiasa mengajarkan saya untuk selalu memaafkan, ikhlas dan bersyukur dalam menghadapi kehidupan, yang selalu menasihati ketika saya salah, memotivasi ketika saya ragu dan selalu berusaha mencari solusi disaat saya mengalami kesulitan.
2. Ibunda tercinta (Suryani) yang tak pernah lelah menyebut nama saya dalam doanya agar selalu berada dijalan yang lurus, diberikan kesuksesan dan diberikan kebahagiaan yang haqiqi terhadap apa saja yang saya kerjakan. Mbak kandungku Sofiyatun yang telah menemani kedua orang tuaku selama aku mengembara di ruang-ruang perjalanan, dan untuk ponakanku Siti Aisyah yang selalu menghadirkan senyum dalam tawa.
3. Seluruh guru yang telah mendidik dan memberikan wawasan, pengetahuan dan pengalaman dengan penuh kesabaran dimulai tingkat SD, SMP, MAN dan seluruh dosen IAIN Jember.
4. Untuk organisasiku PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Komisariat IAIN Jember, wabil khusus PMII Rayon FEBI dan PC PMII Jember serta seluruh kader, Alumni Yang telah memberikan ruang khasanah

ilmu, dedikasi perjuangan nilai, serta membuka mata hati agar berwawasan Keislaman dan Kebangsaan.

5. Untuk ATOS (Acustik Theater Of Syariah) Banom PMII Syariah, adalah tempat untuk berkarya bahwa “Seniman itu berlatih, Bukan Terlatih”, terima kasih karena dengan nama lapang KRIKIL telah mengantarkan dan mengingatkan Siapa aku yang Sebenarnya.
6. Teman- teman seperjuangan Mahasiswa Pascasarjana IAIN Jember yang saling mendukung dan kompak memberikan dukungan serta doa sehingga bisa menyelesaikan Thesis ini.
7. Almamaterku tercinta IAIN Jember serta semua pihak yang memberikan dukungan dan doa untukku.
8. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih untuk selalu ada dan saling melengkapi kekurangan kita.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang tak pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun dalam menyelesaikan tesis ini.

Tesis dengan judul **“Strategi Pembangunan Ekonomi Desa Era Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Program JATIM PUSPA Di Kabupaten Bondowoso)”**, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar magister ekonomi dalam program studi ekonomi syariah di Pascasarjana IAIN Jember dan sebagai jembatan kedua karya ilmiah yang saya susun.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. Selaku Rektor IAIN Jember.
2. Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A. Selaku Direktur Pascasarjana IAIN Jember.
3. Dr. H. Aminuallah, M.Ag. Selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Jember
4. Dr. H. Misbahul Munir, M.M. Selaku Kaprodi Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Jember dan sekaligus Selaku Dosen Pembimbing Satu yang penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan

waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis.

5. Dr. H. Moch. Chotib. S.Ag.,M.M. Selaku Dosen Pembimbing Dua yang penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana IAIN Jember yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Pascasarjana dengan pelayanannya.
7. Segenap Karyawan dan Karyawati Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bondowoso yang telah memberikan kesempatan serta meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan informasi.
8. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moral maupun material secara langsung atau tidak dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT dan penulis berharap mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat. Aamiin Ya Robbal ‘Alamin.

Jember, 28 Mei 2021

Bajuri
NIM.0839219028

ASBTRAK

Bajuri, 2021 : *Strategi Pembangunan Ekonomi Desa Era Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Program JATIM PUSPA Di Kabupaten Bondowoso)*. Tesis Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember. Pembimbing 1 : Dr. Misbahul Munir, M.M. 2 : Dr. Moch. Chotib. S.Ag.,M.M

Kata Kunci : Strategi Pembangunan Ekonomi, Jatim Puspa, Kesejahteraan Masyarakat

Covid-19 telah menjadi wabah hingga hari ini, dampaknya tidak hanya pada kesehatan masyarakat melainkan turut mempengaruhi perekonomian Negara bahkan perekonomian dunia. Provinsi Jawa timur melakukan berbagai upaya dan gerakan sebagai jawaban atas menurunnya kesejahteraan masyarakat Jawa timur, salah satunya melalui program Jatim Puspa. Program ini diprioritaskan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan tingkat kesejahteraan 8-12 % terendah berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia pada 15 Kabupaten kantong kemiskinan di Jawatimur. Kabupaten Bondowoso termasuk daerah di Jawa timur yang mengalami kantong kemiskinan tersebut terutama pada dua kecamatan yakni kecamatan Tlogosari dan kecamatan Pujer yang terdiri Desa Sukowono dan Desa Kembang. Oleh karenanya program Jatim Puspa ini salah satu menjadi alternative untuk membangun perekonomian masyarakat Bondowoso. Program ini diharapkan mampu menjawab problem perekonomian masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penelitian ini Untuk menganalisis dan mendiskripsikan strategi perencanaan Jatim Puspa, implementasi program Jatim Puspa terhadap keluarga penerima manfaat di Bondowoso, control pemerintah desa terhadap keluarga penerima manfaat di Bondowoso, dan Untuk menganalisis dan mendiskripiskan dampak strategi pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam program Jatim Puspa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat era pandemi covid-19. Dalam penelitian ini menggunakan teori empat strategi dalam pembangunan daerah yaitu strategi pengembangan fisik atau lokalitas, strategi pengembangan dunia usaha, strategi pengembangan sumber daya manusia dan strategi pengembangan ekonomi masyarakat. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif karena penelitian ingin melakukan penelitian secara terinci dan mendalam terhadap Strategi Pemulihan Ekonomi Desa melalui Program Jatim Puspa untuk Kesejahteraan Masyarakat Bondowoso.

Hasil analisis ini bahwa terdapat tujuh strategi Jatim puspa yang menjadi acuan terlaksananya program ini diantaranya stimulus modal usaha ekonomi produktif, pendampingan usaha KPM oleh pendamping desa, pelatihan peningkatan kapasitas usaha KPM, fasilitasi pemasaran produk KPM, menciptakan jaringan usaha KPM, melibatkan dunia usaha melalui CSR untuk ikut serta memberdayakan KPM dan fasilitasi pinjaman murah dan mudah untuk pengembangan usaha KPM melalui program bibit jamur bank. Strategi Jatim puspa ini sangat berdampak terhadap pembangunan ekonomi desa di kabupaten Bondowoso. Hal ini terlihat dengan adanya peningkatan pendapatan dari masyarakat keluarga penerima manfaat setelah mendapatkan program Jatim Puspa. Dan program ini terstruktur dengan baik dari jajaran pemerintah desa, pemerintah kabupaten hingga pemerintah provinsi. Dampak lain dari itu adalah penyediaan jaringan pemasaran yang membuat semakin muncul kreatifitas para penerima manfaat untuk mengembangkan usahanya.

ABSTRACT

Baijuri, 2021: *Village Economic Development Strategy in the Covid-19 Pandemic Era through Jatim Puspa (Women's Business Empowerment) Program in Improving Society Welfare in Bondowoso Regency.* A thesis of Postgraduate Syariah Economics Study Program of State Islamic Institute of Jember, Advisor I: Dr. Misbahul Munir, M.M., Advisor II: Dr. Moch. Chotib. S.Ag.,M.M

Keywords: Economic Development Strategy, *Jatim Puspa*, Society Welfare

Covid-19 has become an epidemic to this day, its impact is not only on public health but also affects the country's economy and even the world economy. East Java Province has made various efforts and movements in response to the decreasing of East Java society welfare, one of them is through *Jatim Puspa* program. This program is prioritized for Beneficiary Families "*Keluarga Penerima Manfaat (KPM)*" with the lowest welfare level of 8-12% based on Integrated Social Welfare Data "*Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)*" issued by the Social Ministry of Republic Indonesia in 15 poverty pocket districts in East Java. Bondowoso Regency is one of the areas in East Java that experience poverty pocket, especially in two sub-districts, namely Tlogosari and Pujer districts which consist of Tlogosari Village, Mengok Village, Sukowono Village, Sukokerto Village, Jebung Kidul Village, Sulek Village and Kembang Village. Therefore, this *Jatim Puspa* program is one of the alternative to build the economy of Bondowoso society. This program is expected to be able to answer the economic problems of the society and improve the society welfare.

The purpose of this study is to analyze and describe the planning strategy of *Jatim Puspa* program, the implementation of *Jatim Puspa* program for beneficiary families (KPM) in Bondowoso, control of the village government on beneficiary families in Bondowoso, analyzing and describing the impact of economic development strategies carried out by the Society and Village Empowerment Service in *Jatim Puspa* program to improve the society welfare in the Covid-19 pandemic era. This study uses the theory of four strategies in regional development, namely physical/locality development strategy, business development strategy, human resource development strategy and community economic development strategy. Researcher uses the type of descriptive qualitative research because this research wants to carry out detailed and in-depth research on the village economic recovery strategy through *Jatim Puspa* Program for Bondowoso society welfare.

The results of this analysis shows that there are seven strategies for *Jatim Puspa* program which are used as a reference for the implementation of this program, including stimulus for productive economic business capital, KPM business assistance by village assistants, training for KPM business capacity building, facilitation of KPM product marketing, creating KPM business networks, involving the business world through CSR to participate in empowering KPM and facilitating cheap and easy loans for KPM business development through the bank mushroom seed program. *Jatim Puspa* strategy has a huge impact on village economic development in Bondowoso district. This can be seen with an increase in income from the beneficiary family (KPM) after receiving *Jatim Puspa* program. This program is well structured from the ranks of the village government, district government to the provincial government. Another impact of *Jatim Puspa* is the provision of a marketing network that makes the beneficiaries family (KPM) more creative in developing their business.

ملخص البحث

بيجوري، ٢٠٢١ : استراتيجية التنمية الاقتصادية لقرية في عصر كوفيد ١٩ من خلال برنامج (تمكين الأعمال التجارية للمرأة) في تحسين الرفاهية المجتمعية في محافظة بوندووصا. البحث العلمي للدراسة العليا في قسم دراسة الاقتصاد الشرعي بالجامعة الإسلامية الحكومية جember. تحت إشراف: المشرف الأول: دكتور خاطب الماجستير، والمشرف الثاني: دكتور. مصباح الماجستير.

الكلمات المفتاحية: استراتيجية التنمية الاقتصادية، جاوى الشرقي بوسبا، رفاهية المجتمعية.

أصبح فيروس كورونا وباءً حتى يومنا هذا، ولا يقتصر تأثيره على الصحة فحسب، بل يؤثر أيضاً على اقتصاد البلاد وحتى الاقتصاد العالمي. بذلت منطقة جاوا الشرقي جهوداً ومحاولة وتحركات مختلفة استجابةً لتدهور وتنقيص رفاهية مجتمع جاوا الشرقي، أحدها من خلال برنامج جاتيم بوسبا. تم إعطاء الأولوية لهذا البرنامج للأسر المستفيدة مع أدنى مستوى رعاية بنسبة ٨-١٢ ٪ بناءً على بيانات الرعاية الاجتماعية المتكاملة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية لجمهورية إندونيسيا في ١٥ منطقة جاوا الشرقي. وكانت محافظة بوندووصا هي واحدة من المناطق في جاوى الشرقي التي تتكون من الفقراء والمساكين، خاصة في منطقتين فرعيتين هما تالوكو ساري و فوجار اللتان تتكونان من القرية تالوكو ساري وماغوك و سوكونو وسوكو كارتو و جابوغ كيدول و سولاك و كامباغ. لذلك يعد برنامج جاوى شرقي بوسبا أحد البدائل و حل من الحلول لبناء اقتصاد مجتمع تترقي ترقية عالية. ومن المتوقع أن يكون هذا البرنامج قادراً على الاستجابة لمشاكل المجتمع الاقتصادية وتحسين رفاهية المجتمع.

كان الغرض من هذه الدراسة هو تحليل ووصف استراتيجية التخطيط لجاوة الشرقية بوسبا، وتنفيذ برنامج جاوة بوسبا الشرقية للأسر المستفيدة في بوندووصا، كأمر وسيطرة الحكومة القرية على الأسر المستفيدة في بوندووصا، وتحليل ووصف الأثر من استراتيجيات التنمية الاقتصادية التي نفذتها خدمة تمكين المجتمع والقرى في برنامج جاوة الشرقية بوسبا لتحسين رفاهية الناس في عصر وباء كوفيد -١٩. تستخدم هذه الدراسة نظرية أربع استراتيجيات في التنمية الإقليمية، وهي استراتيجيات التنمية المادية / المحلية، واستراتيجيات تطوير الأعمال واستراتيجيات تنمية الموارد البشرية واستراتيجيات التنمية الاقتصادية المجتمعية. استخدم الباحث هذا النوع من البحث النوعي الوصفي لأن البحث أراد إجراء بحث مفصل ومتعمق حول استراتيجية الانتعاش الاقتصادي للقرية من خلال برنامج جاوى الشرقي بوسبا لرعاية مجتمع بوندووصا.

وكانت نتائج هذا التحليل أن هناك سبع استراتيجيات لجاوى الشرقي بوسبا والتي هي كالمرجح لتنفيذ هذا البرنامج، بما في ذلك تحفيز رأس المال الاقتصادي المنتج، والمساعدة التجارية لـ من قبل مساعدي القرية والتدريب على بناء القدرات التجارية وتسهيل تسويق منتجات وإنشاء شبكات أعمال وإشراك عالم الأعمال من خلال المسؤولية الاجتماعية للشركات للمشاركة في تمكين وتسهيل قروض رخيصة وسهلة لتطوير أعمال من خلال برنامج بذور المصربي وهذه الإستراتيجية تأثر تأثيراً كبيراً على التنمية الاقتصادية للقرية في منطقة بوندووصا. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال زيادة الدخل من المجتمع العائلي المستفيد بعد تلقي برنامج جاوى الشرقي بوسبا. وهذا البرنامج منظم بشكل جيد من رتب حكومة القرية و حكومة المقاطعة إلى حكومة المقاطعة. تأثير آخر لذلك هو توفير شبكة تسويق تجعل المستفيدين أكثر إبداعاً في تطوير أعمالهم.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Peneltian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori	26
1. Konsep Strategi Pembangunan Ekonomi.....	26

2. Pembangunan Ekonomi Daerah.....	46
3. Kesejahteraan Masyarakat	53
C. Kerangka Konseptual	69
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	71
B. Lokasi Penelitian.....	73
C. Kehadiran Peneliti.....	73
D. Subjek penelitian	74
E. Sumber Data (primer/sekunder).....	75
F. Teknik pengumpulan data.....	76
G. Analisis data.....	79
H. Teknik keabsahan data	84
I. Tahapan-tahapan penelitian	85
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Objek Penelitian	88
B. Paparan Data dan Analisis	105
C. Temuan Penelitian.....	123
BAB V PEMBAHASAN	
A. Strategi Perencanaan Pembangunan Ekonomi melalui Program Jatim Puspa.....	129
B. Implementasi Program Jatim Puspa terhadap Keluarga Penerima Manfaat di Bondowoso	132
C. Kontrol Pemerintah Desa terhadap Keluarga Penerima Manfaat di Bondowoso.	134

D. Dampak Strategi Pembangunan Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Program Jatim Puspa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat kabupaten Bondowoso Era Pandemi Covid-19	137
--	-----

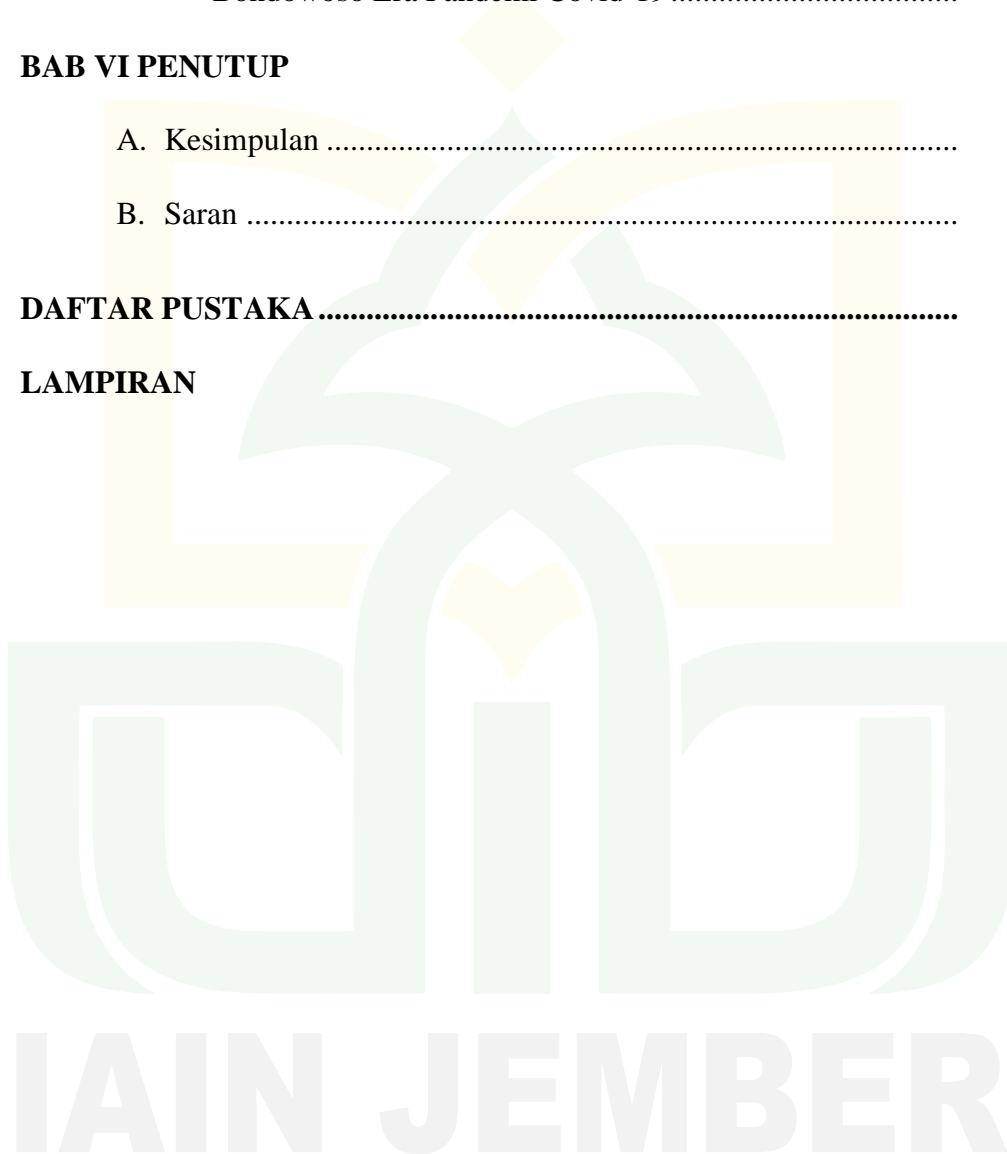
BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	143
---------------------	-----

B. Saran	144
----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA	146
-----------------------------	------------

LAMPIRAN



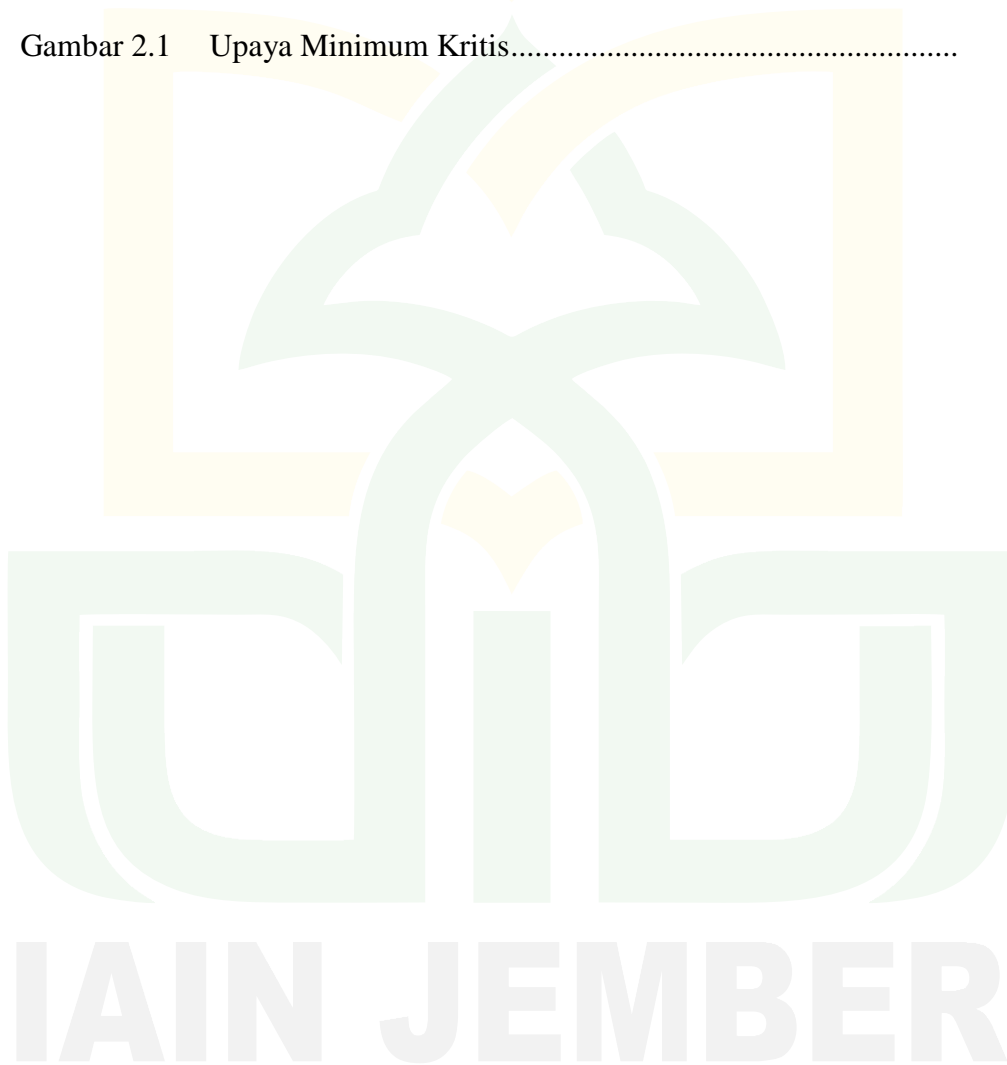
DAFTAR TABEL

No.	Keterangan	Hal
Tabel 2.1	Tabulasi Penelitian Terdahulu.....	20



DAFTAR GAMBAR

No.	Keterangan	Hal
Gambar 1.1	Perbandingan antara laju Pertumbuhan Penduduk dengan Tingkat Pendapatan/kapita.....	38
Gambar 2.1	Upaya Minimum Kritis.....	39



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar pembentukan negara Indonesia bahwa salah satu tugas pemerintah negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Pembukaan Undang-Undang Dasar ini tidak mengalami perubahan dalam perubahan UUD 1945, sehingga apa yang tercantum dalam pembukaan tersebut tetap utuh seperti sediakala. Artinya bahwa salah satu tugas pemerintah yang sampai saat ini dan selanjutnya adalah memajukan kesejahteraan umum.

Kesejahteraan masyarakat dalam UU No 11 tahun 2009 yakni kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya.¹ Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan yang hendak dicapai disetiap pemerintahan, entah itu Pemerintah Pusat ataupun pemerintah Daerah. Karena jika masyarakat telah sejahtera, keadaan suatu wilayah akan berjalan dengan aman dan damai. Sektor ekonomi, pendidikan, kebudayaan, antar umat beragama dan lain-lain akan berjalan sesuai keinginan apabila masyarakat telah sejahtera. Namun kesejahteraan tersebut tidak akan dapat diperoleh tanpa adanya program dan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

¹ UU No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat

Pandemi Covid-19 telah memasuki wilayah Indonesia sejak bulan Maret 2020.² Adanya pandemi ini mengakibatkan pendidikan seketika difakumkan, dari tingkat pendidikan anak-anak hingga perguruan tinggi diseluruh Indonesia. Beberapa perusahaan dan perkantoran pun terpaksa ditutup. Masyarakat dipaksa untuk bekerja, belajar dan beribadah dari rumah, hal ini semata-mata dilakukan untuk terjaganya kesehatan manusia dari virus Covid-19.

Ekonomi masyarakat saat itu mulai berada dipersimpangan jalan. Hal ini dikarenakan bencana pandemi Covid-19. Bencana ini tidak hanya membawa risiko bagi kesehatan masyarakat, melainkan secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Ini yang membawa implikasi besar bagi perekonomian di Indonesia. Salah satu implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan dapat mencapai 4% (empat persen) atau lebih rendah tergantung kepada seberapa lama dan seberapa parah penyebaran pandemic Covid-19 mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.³

Penelitian sebelumnya oleh Erni Panca Kurniasih⁴ menyatakan terdapat beberapa dampak pandemik Covid-19 pada kesejahteraan masyarakat Pontianak. Dari hasil penelitiannya menggunakan 36 responden dari enam kecamatan di Pontianak mengalami pendapatan penurunan tajam dari 30%-70% diawal masa pandemik, sementara

²www.kompas.com diakses pada 29 November 2020 pukul 19.30 WIB

³www.beritasatu.com diakses pada 29 November 2020 pukul 20.30 WIB

⁴Erni Panca Kurniasih, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak*, Jurnal, (Universitas Tanjungapura, 2020)

pengeluaran cenderung tetap. Hal ini disiasati oleh para responden dengan merubah pola makan dan mencari sumber pendapatan lain untuk terpenuhinya pola pengeluaran yang lama.

Dampak lainnya yang terkait adalah kemungkinan meningkatnya angka kemiskinan di Jawa Timur. Hal tersebut berdasarkan data statistik yang dikeluarkan BPS, pada bulan September 2020 jumlah penduduk miskin di Jawa Timur sebesar 4.056.000 jiwa (10,2 %), dengan adanya pandemi Covid-19, dimana banyak kegiatan sektor ekonomi terhenti, dan bahkan kehilangan mata pencaharian, yang berdampak pada penurunan pendapatan sebagian besar masyarakat.⁵

Pembangunan ekonomi bukanlah topik baru dibidang ekonomi. Karena pembahasan mengenai studi ekonomi telah banyak dibahas dari sejak bapak ekonomi jaman Merkantilis, Klasik, Marx dan Keynes. Adam Smith sabagai bapak ekonomi misalnya, telah banyak membahas tentang pembangunan ekonomi dalam karyanya yang berjudul *The Wealth of Nations* (1776). Karenanya lebih tepat jika pembangunan ekonomi yang dibahas oleh ekonomi saat ini adalah kebangkitan kembali untuk memperhatikan masalah-masalah yang dianalisis oleh ekonomi terdahulu.⁶

Pembangunan ekonomi adalah proses untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas manusia yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian manusia dalam kesehariannya.⁷ Dalam rangka menangani dampak ekonomi dan sosial dimaksud pemerintah pusat

⁵ <https://jatim.bps.go.id/>. diakses pada 2 Januari 2021 pukul 20.30 WIB

⁶ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta : Upp Stim Ykpn, 2016) 1

⁷ Abd.Rachim AF, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta:CV Andi Offset,2015), 68

maupun pemerintah daerah telah merancang dan mengimplementasikan berbagai program, diantaranya Program Jaring Pengaman Sosial. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengacu pada Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan telah melakukan kegiatan realokasi dan refocusing anggaran dalam rangka penanganan Dampak Covid-19 salah satunya dalam bentuk Program Jaring Pengaman Sosial.

Program Jaring Pengaman Sosial Provinsi Jawa Timur terdiri dari 2 (dua) sumber, yaitu Sumber Belanja Tidak Terduga berupa Bantuan Sosial dan Program Regular di masing-masing OPD yang dilakukan refocusing dalam rangka penanganan Dampak Covid-19. Program Regular dimaksud diantaranya adalah Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (JATIM PUSPA).⁸

Program Jatim Puspa di fokuskan untuk peningkatan pendapatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam pemulihan dampak wabah Covid-19. Program Jatim Puspa diprioritaskan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan tingkat kesejahteraan 8-12 % terendah berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia pada 15 Kabupaten kantong kemiskinan. Selain itu Program Jatim Puspa juga ditujukan bagi

⁸ [Sosialisasi Program Jatim Puspa Tahun 2020 \(jatimprov.go.id\)](http://jatimprov.go.id) diakses pada 20 November 2020 pukul 19.30 WIB

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Graduasi Mandiri Sejahtera Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial.

Program Jatim Puspa ini merupakan salah satu ikhtiar Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Penanganan Dampak Covid-19 untuk meningkatkan pendapatan masyarakat terdampak sehingga dapat pulih dan meningkat ketahanan sosial dan ekonominya. Program ini diharapkan bisa didukung oleh seluruh pihak dari pemerintah kota, pemerintah desa dan masyarakat atau keluarga penerima manfaat. Sehingga tujuan adanya program Jatim Puspa dapat terlaksana dengan maksimal.

Kabupaten Bondowoso merupakan wilayah di Jawa Timur yang termasuk dari 15 kabupaten kantong kemiskinan. Kondisi Bondowoso juga terdampak dengan menurunnya perekonomian dimasyarakat. Hal ini terjadi disebabkan banyaknya UMKM yang lumpuh serta tidak sedikit masyarakat yang kehilangan pekerjaannya karena perusahaan terpaksa tutup karena pandemi. Terdapat kenaikan angka kemiskinan yang berjumlah 14,17 % ditahun 2020, angka kemiskinan ini dikatakan naik karena pada tahun 2019 prosentasi kemiskinan di kabupaten Bondowoso berjumlah 13,33%.⁹ Ini menjadi problematika tersendiri bagi pemerintah kabupaten Bondowoso terutama pada dua kecamatan yakni kecamatan Tlogosari dan kecamatan Pujer yang terdiri atas Desa Tlogosari, Desa Mengok, Desa Sukowono, Desa Sukokerto, Desa Jebung Kidul, Desa Sulek dan Desa Kembang. Oleh karenanya program Jatim Puspa ini salah

⁹ <https://jatim.bps.go.id/>. diakses pada 2 Januari 2021 pukul 20.30 WIB

satu menjadi alternatif untuk membangun perekonomian masyarakat Bondowoso.¹⁰

Pengembangan desa tertinggal merupakan salah satu upaya dalam mengembangkan sebuah desa yang di huni oleh masyarakat pedesaan dengan berbagai permasalahan sosial, ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi desa maju dengan masyarakat pedesaan yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal di bandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya.

Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang termasuk kategori daerah tertinggal. Permasalahan ketertinggalan di kabupaten Bondowoso adalah permasalahan pembangunan sumber daya manusia (SDM), kemiskinan dan permasalahan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yaitu infrastruktur sosial seperti sarana kesehatan, pendidikan serta pembangunan ekonomi yang tidak merata.

berdasarkan beberapa indikator yang disebutkan diatas perlu adanya perencanaan dan strategi khusus dari pemerintah untuk pembangunan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bondowoso yang terdampak. Strategi ini dikhususkan kepada terutama daerah yang terdaftar mendapatkan program khusus Jatim Puspa. Karena dampak pandemi Covid-19 ini sangat membutuhkan solusi yang solutif untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat.

¹⁰ [Entas Kemiskinan, Ada 295 Penerima Program Jatim Puspa 2021 di Bondowoso | TIMES Indonesia](#). diakses pada 20 februari 2021 pukul 19.30 WIB

Berangkat dari masalah yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik mengambil penelitian dengan judul “**Strategi Pembangunan Ekonomi Desa Era Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Program JATIM PUSPA Di Kabupaten Bondowoso)**”.

B. Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian, fokus penelitian digunakan untuk mencegah kerancuan dalam menafsirkan apa yang terkandung dalam penelitian. Sekaligus dijadikan landasan dalam langkah penelitian ke tahap berikutnya.

Berikut fokus penelitian yang diambil oleh peneliti;

1. Bagaimana strategi pembangunan ekonomi desa melalui program Jatim Puspa?
2. Bagaimana implementasi program Jatim Puspa terhadap keluarga penerima manfaat di Bondowoso?
3. Bagaimana kontrol pemerintah desa terhadap keluarga penerima manfaat di Bondowoso?
4. Bagaimana dampak strategi pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam program Jatim Puspa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Bondowoso era pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan strategi Jatim Puspa

2. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan implementasi program Jatim Puspa terhadap keluarga penerima manfaat di Bondowoso
3. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan kontrol pemerintah desa terhadap keluarga penerima manfaat di Bondowoso.
4. Untuk menganalisis dan mendiskripsikan dampak strategi pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam program Jatim Puspa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat era pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus objektif dan realistis.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam pengembangan khazanah keilmuan. Khususnya permasalahan terkait dengan perkembangan strategi konsep ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti:

- a) Penelitian ini digunakan sebagai kelengkapan syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E).
- b) Menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti yaitu terkait strategi pembangunan ekonomi desa era pandemic Covid-19 melalui program jatim puspa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Bondowoso.

3. Manfaat bagi IAIN JEMBER

- a. Menambah literatur kepustakaan pascasarjana IAIN Jember, Khususnya program studi Ekonomi Syariah.
- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan pengetahuan khususnya dalam bidang Ekonomi Syariah di IAIN Jember.

E. Definisi Istilah

Untuk memahami permasalahan yang terdapat dalam judul tesis penelitian ini, guna mempermudah pembahasan dan menghindari timbulnya permasalahan dalam memahami judul tesis ini, maka perlu diberikan penegasan istilah atau definisi konsep.

Adapun istilah-istilah dalam judul yang perlu di beri penegasan adalah sebagai berikut:

a. Strategi Pembangunan Ekonomi Desa

Strategi adalah berasal dari kata *strategos* yang berarti *generalship*. Secara umum berarti cara mencapai tujuan dan sekumpulan tindakan atau aktivitas yang berbeda untuk mengantarkan nilai yang unik. Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran atau tujuan khusus. Pembangunan ekonomi pada umumnya sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Dalam penelitian ini strategi pembangunan ekonomi desa yakni proses dimana pemerintah daerah Bondowoso dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah Bondowoso dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja yang baru dan merangsang kegiatan ekonomi wilayah Bondowoso yang disebabkan pandemi Covid 19.

Pembangunan pasca Covid-19 merupakan tantangan berat bagi seluruh negara di dunia. Kehidupan normal baru di masyarakat dimana sampai saat ini belum ada obat paten untuk menyembuhkan Covid-19 dan juga vaksin untuk mencegahnya menjadikan bahwa hal yang pasti kalau masyarakat dunia akan hidup bersama Covid-19, atau dalam istilahnya hidup dalam ancaman Covid-19 setiap saat. Maka program pemberdayaan ini menjadi bukti kongkrit untuk kinerja

pemerintah untuk membangkitkan kekuatan ekonomi masyarakat pada sektor usaha mikro kecil menengah.

b. Program Jatim Puspa

Program Jatim Puspa adalah program pemberdayaan usaha perempuan. Yakni program yang dirancang khusus untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan program penanggulangan kemiskinan pedesaan melalui fasilitas bantuan dan pendampingan bagi keluarga penerima manfaat (KPM).

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan sumberdaya, memanfaatkan potensi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup yang bermartabat. Pendekatan Program Jatim Puspa ini pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari kelompok masyarakat yang berlandaskan pada potensi diri, langsung, demokratis dan pembelajaran sosial.

Program Jatim Puspa ini memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (*grass root*) yang dengan segala keterbatasan belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosial yang ada.

c. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya. Maksud kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini yakni meningkatnya kondisi masyarakat Bondowoso dengan strategi program Jatim Puspa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Bondowoso.

Masyarakat yang sejahtera merupakan kondisi ideal bagi setiap warga masyarakat. Sehingga berbagai upaya terus dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan yang diinginkan dalam program Jatim Puspa ini masyarakat dapat menikmati kemakmuran ekonomi yang utuh, mengurangi angka kemiskinan, tidak menderita kelaparan karena tidak terpenuhinya kebutuhan, menikmati pendidikan, mampu mengimplementasikan kesetaraan gender.

berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik benang merah arti dari judul “strategi pembangunan ekonomi desa melalui program jatim puspa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Bondowoso” ialah rencana yang akan dilakukan pemerintah Bondowoso melalui program Jatim Puspa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bondowoso.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan berisi tentang deskripsi alur pembahasan tesis yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika penulisan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.

BAB I Dalam tesis ini menjelaskan tentang pendahuluan yang menyangkut antara lain Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Pembahasan. Fungsi bab ini sebagai penjelasan alasan awal peneliti melakukan penelitian.

BAB II Peneliti akan menjelaskan tentang kajian pustaka yaitu meliputi Penelitian Terdahulu, Kajian Teori dan Kerangka Konseptual. Fungsi bab ini untuk mengetahui penelitian yang akan dilakukan pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya, dan teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan penelitian. Selain itu bab ini juga menjelaskan kerangka pemecahan masalah atau cara kerja dalam penelitian.

BAB III Menjelaskan tentang Metode Penelitian yang menyangkut antara lain : Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Keabsahan Data dan Tahap-Tahap Penelitian. Fungsi bab ini sebagai bagian dari bab yang menjelaskan alat yang akan dipakai oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB IV Menjelaskan tentang Paparan Data dan Analisis. Dalam bab ini peneliti menyajikan data yang telah didapat dan analisisnya serta temuan penelitian saat penelitian.

BAB V Bab ini membahas pembahasan yakni jawaban dari fokus penelitian yang ada. inti dari penelitian ini ada pembahasan ini, untuk mengetahui hasil dari penelitian tesis.

BAB VI Bab ini menjelaskan tentang penutup yang menyangkut antara lain: Kesimpulan dan Saran. Fungsi bab ini adalah mengambil benang merah dari penjelasan untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setiap karya pasti memiliki kajian terdahulu, hal ini menjadi sebuah prosedural studi dalam dunia akademis. Tidak ada satupun karya yang terputus dari usaha karya para pendahulunya. Dalam hal ini, kaderisasi keilmuan berbasis ilmiah akan selalu ada kesinambungan dan modifikasi yang berkesinambungan. Berikut penelusuran peneliti terkait penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pokok masalah ini.

Pertama, Jurnal dengan penulis Livana PH, dkk yang berjudul “*Dampak Pandemi Covid-19 bagi Perekonomian Masyarakat Indonesia*” hasil dari penelitian ini adalah pandemi covid-19 tidak hanya menyerang pada kesehatan manusia. Dampaknya meluas hingga pada persoalan ekonomi, dari meningkatnya pengangguran, hingga meningkatny aangka kemiskinan. Masyarakat banya mengeluh karena pandemi covid-19 ini, karena banyak aktivitasnya yang berhenti karena pandemi.¹¹

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Teni Marfiani, Sri Hartoyo dan Manuwoto dengan judul, *Analaisis Potensi Ekonomi dan Strategi Pembangunan Ekonomi di Bogor Barat*.¹² Penelitian ini memiliki

¹¹ Livana, *Dampak Pandemi Covid-19 bagi Perekonomian Masyarakat Indonesia*, 2018.

¹² Teni Marfiani, Sri Hartoyo dan Manuwoto, *Analaisis Potensi Ekonomi dan Strategi Pembangunan Ekonomi di Bogor Barat*, *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah* 2019

tujuan untuk menganalisis kesiapan potensi ekonomi di wilayah pembangunan Bogor Barat serta merumuskan strategi pembangunan ekonominya sebagai upaya mewujudkan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil penelitiannya bahwa wilayah Bogor Barat secara umum memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan sebagai penggerak ekonomi dalam pembangunan yakni pada (1) sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan dan (2) sektor pertambangan dan penggalian karena memiliki keunggulan nilai kontribusi dalam perbandingan antar wilayah sehingga layak untuk terus dikembangkan dalam meningkatkan perekonomian lokal wilayah pembangunan Bogor Barat

Ketiga, jurnal berjudul “*Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Daerah*” dengan penulis R. Didi Djajuli, Universitas Galuh. Dalam penelitian ini, hasil penelitiannya meliputi peran pemerintah daerah di era otonomi daerah sangat besar sekali, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengurus pemerintahnya sendiri, termasuk pengembangan ekonomi daerah berdasarkan kekayaan potensi daerah tersebut.¹³

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Arif Eko Wahyudi, Ahmad Riyadh U. Balahmar, judul “*Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa*” Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peran pemerintah dan

¹³ Djajuli Didi, *Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah*, 2017.

non pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat serta mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa Kebonsari kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo.¹⁴

Kelima, jurnal berjudul “*Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan*” yang ditulis oleh Almasdi Syahza dan Suarman.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti membahas pembangunan di wilayah pesisir provinsi Riau belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berdiam didaerah pedesaan. Dalam upaya memacu pembangunan aspek ekonomi dan sosial diderah tersebut, maka program pembinaan desa memprioritaskan tiga aspek utama yakni peningkatan ekonomi rakyat, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pembangun infrastruktur.

Keenam, jurnal yang ditulis Ahmad Soleh dengan judul “*Strategi Pengembangan Potensi Desa*” penelitian ini membahas mengenai pembangunan yang direncanakan secara berkelanjutan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat indonesia. Pemahaman yang menyeluruh dan tidak dikotomis menjadi penting dan mendasar dalam penyusunan peraturan atau aturan main yan berkaitan dengan pedesaan

¹⁴ Arif Eko Wahyudi, Ahmad Riyadh U. Balahmar, jurnal judul “*Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa*” Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2018.

¹⁵ Almasdi Syahza dan Suarman, *Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Universitas Riau Pekanbaru, 2017.

maupun perkotaan, agar terjadi sinergi dan keseimbangan perlakuan wilayah, khususnya pelaku pembangunan.¹⁶

Ketujuh, jurnal berjudul “*Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Pesisir*” yang ditulis oleh Mohammad Teja.¹⁷

Penelitian ini membahas tentang potensi alam yang dimanfaatkan secara bijaksana oleh masyarakat setempat diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan yang lama menimpa masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, jurnal dan hasil penelitian yang sudah diterbitkan dengan menggunakan metode literatur agar mendapatkan alternatif mengenai dampak sosial dari pengembangan kawasan. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pengetahuan perlu didorong oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan investor.

Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh Meri Enita Puspita Sari dan Diah Ayu Pratiwi dengan judul “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Hidup Masyarakat Suku Laut Pulau Bertam Kota Batam*”.¹⁸ Jurnal ini membahas tentang pelaksanaan pemerintahan Kota Batam melalui berbagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dikalangan komunitas suku laut. Berbagai program, pelatihan dan pendidikan ketrampilan dilakukan oleh

¹⁶ Ahmad Soleh, *Strategi Pengembangan Potensi Desa*, Jurnal Sungkai, Universitas Padjajaran, 2017

¹⁷ Ahmad Teja, “*Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Pesisir*”, Jurnal Pusat pengkajian, Pengelolaan, dan Informasi Sekretariat DPR RI, 2017.

¹⁸ Meri Enita Puspita Sari dan Diah Ayu Pratiwi, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi kesejahteraan Hidup Masyarakat suku Laut Pulau Bertam Kota Batam*, Jurnal Trias Politika, Universitas Tiau Kepulauan, 2018

pemerintah Suku Laut dalam meningkatkan ketrampilan masyarakat setempat. Namun deretan program yang terlaksana belum mampu meningkatkan ketrampilan dasar yang diperlukan dalam kehidupan Suku Laut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, perubahan hidup yang dijalankan oleh masyarakat suku laut pulau Bertam mempengaruhi kualitas hidup mereka terutama kesejahteraan sosial.

Kesembilan, jurnal berjudul “*Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Partisipasi dan Implementasi Kebijakan dengan Efektivitas Pembangunan Program Dana Desa sebagai Variabel Intervening*” yang ditulis oleh Elvina dan Musdhalifah. Hasil dalam penelitian ini bahwa terdapat pengaruh partisipasi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap efektivitas pembangunan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah rumah tangga yang ada di desa Siburur kecamatan Dolok kabupaten Padang Lawas Utara yang berjumlah 132 rumah tangga. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *proportional random sampling*, sampel dihitung dengan menggunakan rumus Solvin, diperoleh daya sebanyak 101 kepala rumah tangga.¹⁹

Kesepuluh, jurnal yang ditulis oleh A. Ghofur Purbaya dengan judul “*Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat :*

¹⁹ Elvina dan Musdhalifah, *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Partisipasi dan Implementasi Kebijakan dengan Efektivitas Pembangunan Program Dana Desa sebagai Variabel Intervening*, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Labuhanbatu, Sumatera Utara, 2019.

Kasus Pengusaha Krupuk dan Camilan Hasil Laut di Pantai Kanjeran Lama Surabaya”.²⁰ Jurnal ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan masyarakat bagaimana kesejahteraan ekonomi masyarakat pengusaha krupuk dan camilan hasil laut pantai kenjeran lama Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni mendiskripsikan bagaimana kondisi kesejahteraan ekonomi dan strategi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pengusaha krupuk dan camilan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah kondisi masyarakat pengusaha krupuk dan camilan hasil laut yang masih belum sejahtera, membutuhkan beberapa strategi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi yakni kemitraan, permodalan dan pemasaran. ketiga unsur tersebut diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pengusaha krupuk dan camilan hasil laut pantai kenjeran Surabaya.

Tabel. Perbedaan dan Persamaan

No	Nama/ Judul	Variabel	Perbedaan/ Persamaan	Hasil Penelitian
1.	Livana PH, dkk /“Dampak Pandemi Covid-19 bagi Perekonomian Masyarakat Desa”	Bantuan kesehatan, masyarakat desa, pandemi covid 19, perekonomian	Persamaan : dalam penelitian ini sama meneliti akibat yang timbul dari pandemi covid-19, khususnya dalam bidang perekonomian bagi masyarakat desa.	Dalam jurnal Liana PH, dkk ini hanya menyebutkan macam-macam program pemerintah dari sektor kesehatan, ekonomi dan kebijakan sosial dampak dari pandemi. Sedangkan dalam tesis

²⁰ A. Ghofar Purbaya, *Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat : Kasus Pengusaha Krupuk dan Camilan Hasil Laut di Pantai Kanjeran Lama Surabaya*, Community Development Surabaya, 2016

			<p>Perbedaan : penelitian ini hanya sebatas macam-macam program pemerintah terkait bidang kesehatan, ekonomi dan kebijakan sosial untuk menghadapi covid-19. Kalau tesis penulis meneliti strategi pembangunan ekonomi melalui program Jatim Puspa di Bodowoso, ini sifatnya meneliti khusus satu rogram yang dampaknya menjawab persoalan masyarakat terkait ekonomi akibat pandemi</p>	<p>ini membahas strategi pembangunan ekonomi berdasarkan program jatim puspa untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bondowoso</p>
2.	<p>Teni Marfiani, Sri Hartoyo dan Manuwoto / Analisis Potensi Ekonomi dan Strategi Pembangunan Ekonomi di Bogor Barat</p>	<p>Pusat pertumbuhan dan layanan, potensi ekonomi lokal, pembangunan daerah</p>	<p>Persamaan : sama-sama membahas strategi pembangunan ekonomi Perbedaan : dalam penelitian ini lebih ditekankan pembangunan ekonomi melalui potensi daerah. Sedangkan di tesis yang ditulis peneliti akan membahas strategi pembangunan ekonomi melalui program pemerintah yakni</p>	<p>Dalam Jurnal Teni Marfiani dkk ini menghasilkan sebuah analisa potensi ekonomi di Bogor barat sebagai strategi pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Sedangkan di penelitian tesis ini penulis ingin menghasilkan strategi pembangunan ekonomi yang digunakan pemerintah Bondowoso melalui program jatim puspa untuk kesejahteraan</p>

			Jatim Puspa	masyarakat.
3.	R. Djiji Djajuli/Peran Pemerintah dalam Membangun Ekonomi Daerah	Pemerintah daerah, strategi, pembangunan ekonomi.	Persamaan : sama-sama meneliti Pembangunan Ekonomi Perbedaan : dalam jurnal ini mengkaji terkait peran pemerintah untuk melakukan pembangunan ekonomi daerah berbasis teoritis, Sedangkan tesis ini meneliti terkait strategi pembangunan ekonomi melalui program Jatim Puspa dengan lokasi penelitian di kabupaten Bondowoso.	Dari penelitian R. Djiji Djajuli ini menghasilkan sebuah konsep peran pemerintah pusat hingga desa dalam membangun ekonomi daerah. Sedangkan penelitian tesis membahas khusus strategi pembangunan ekonomi melalui Jatim Puspa untuk kesejahteraan masyarakat di kabupaten Bondowoso
4.	Arif Wahyudi Arfianto, Ahmad Riyadh U. Balahmar / Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa	Pemberdayaan , masyarakat, pembangunan, ekonomi	Persamaan : sama-sama membahas pembangunan ekonomi Perbedaan : penelitian ini pemberdayaan ekonomi masyarakat menggunakan faktor pendukung dan penghambat di desa kebonsari Candi Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan tesis ini lebih pada strategi pembangunan ekonomi melalui Jatim Puspa untuk kesejahteraan masyarakat Bondowoso	Penelitian Arif Wahyudi Arfianto membahas mengenai peran pemerintah dan non pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa Kebonsari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan tesis ini membahas strategi pembangunan ekonomi melalui Jatim Puspa untuk kesejahteraan masyarakat Bondowoso.

5	Almashdi Syahza dan Syarman / Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan	Desa tertinggal, kemiskinan, ekonomi pedesaan, mengentaskan kemiskinan	Persamaan : sama-sama membahas tentang strategi percepatan pembangunan ekonomi pedesaan. Perbedaan : penelitian ini menggunakan metode perkembangan (<i>Development Research</i>) yang melalui sampling dan kuesioner. Sedangkan tesis yang akan diteliti menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis wawancara keseluruhan.	Hasil penelitian ini adalah dalam upaya memacu pembangunan dari sisi ekonomi dan sosial didaerah tertinggal maka program pembangunan pedesaan harus memprioritaskan tiga aspek yakni mengentaskan kemiskinan, pengkatan SDM dan pembangunan infrastruktur
6	Ahmad Soleh / Strategi Pengembangan Potensi Desa	Indonesia, membangun, desa, keseimbangan, dan kesejahteraan	Persamaan : sama-sama membahas tentang pembangunan ekonomi daerah. Perbedaan : jurnal ini membahas khusus potensi desa dalam mengembangkan ekonomi masyarakat. Sedangkan tesis ini membahas pembangunan ekonomi melalui Program Jatim Puspa untuk kesejahteraan masyarakat.	Hasil penelitian jurnal ini adalah pembangunan direncanakan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kawasan pedesaan harus dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dengan kawasan perkotaan. Pemahaman yang menyeluruh dan titik dikotomis ini menjadi penting dan mendasar dalam penyusunan peraturan yang berkaitan dan keseimbangan perlakuan wilayah.
7	Muhammad Teja / Pembangunan	Pemberdayaan , masyarakat pesisir,	Persamaan : sama-sama membahas tentang	Hasil penelitian jurnal ini adalah pemberdayaan

	<p>untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Pesisir</p>	<p>investasi, cilacap</p>	<p>pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Perbedaan : jurnal ini menggunakan metode penelitian kajian kepustakaan yang disitu memakai data jurnal atau penelitian yang pernah ada dengan metode literatur. Sedangkan tesis ini menggunakan metode penelitian filed research yakni wawancara kepada narasumber.</p>	<p>masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pengetahuan perlu didorong oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan investor. Melalui kerjasama tersebut diharapkan masyarakat setempat mampu ikut serta berperan dalam pembangunan didaerah tersebut.</p>
8	<p>Meri Enita Puspita Sari dan Diah Ayu Pratiwi / Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Hidup Masyarakat Suku Laut Pulau Bertam Kota Batam</p>	<p>Kesejahteraan masyarakat, masyarakat suku laut, peranan pemerintah</p>	<p>Persamaan : sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatifm yakni untuk menggambarkan dan mengkaji penelitian yang akan diteliti, Perbedaan : dalam jurnal ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan hidup masyarakat suku laut, sedangkan tesis ini membahas tentang kesejahteraan masyarakat melalui program</p>	<p>Hasil penelitian jurnal ini adalah faktor ekonomi dan tingkat pemahaman pemerintah merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat Suku Laut. Faktor ekonomi masyarakat suku laut merubah pandangan domain pekerjaan didarat dan dilaut guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Faktor tingkat pemahaman pemerintahan masih rendah terutama terhadap budaya organisasi sosial orang laut.</p>

			Jatim Puspa.	
9	Elvina dan Musdhalifah /Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Partisipasi dan Implementasi Kebijakan dengan Efektivitas Pembangunan Program Dana Desa sebagai Variabel Intervening	Kesejahteraan masyarakat, partisipasi, implementasi kebijakan, efektivitas	Persamaan : sama-sama meneliti implementasi kebijakan dan evektifitas pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat. Perbedaan : jurnal ini menggunakan metode peneltian kuantitatif sedangkan tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara partisipasi masyarakat, implementasi kebijakan dan evektifitas pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
10	A.Ghofur Purbaya / Strategi Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat : Kasus Pengusaha Krupuk dan Camilan Hasil Laut di Pantai Kanjeran Lama Surabaya	Strategi peningkatan kesejahteraan, kesejahteraan ekonomi, pemasaran, permodalan, kemitraan	Persamaan : sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan : dalam jurnal ini meneliti khusus pada strategi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pengusaha krupuk dan camilan hasil laut di pantai kanjeran lama Surabaya. Sedangkan tesis ini meneliti terkait strategi pembangunan ekonomi melalui Program Jatim Puspa untuk kesejahteraan masyarakat	Hasil penelitian jrunal ini adalah masyarakat pengusaha krupuk dan camilan hasil laut yang belum sejahtera, membutuhkan beberapa strategi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi yakni keitraan, permodalan dan pemasaran.

Dari kajian penelitian tedahulu tersebut tidak ada yang membahas mengenai strategi pembangunan ekonomi desa melalui program jatim puspa. Dengan ini peneliti tertarik melakukan penelitian terkait **Strategi Pembangunan Ekonomi Desa Era Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Program JATIM PUSPA Di Kabupaten Bondowoso.**

B. Kajian Teori

1. Konsep Strategi Pembangunan Ekonomi

a. Pengertian Strategi Pembangunan

Strategi telah menjadi istilah yang sering di gunakan oleh masyarakat. istilah strategi digunakan untuk menggambarkan berbagai makna seperti suatu rencana, taktik atau tata cara untuk mencapai yang diinginkan. Pada hakikatnya, strategi adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Namun guna mencapai tujuan tersebut, strategi bukan berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan taktik operasionalnya.²¹

Refrensi lain menyatakan bahwa strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Menurut Rangkuti, strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan utamanya

²¹ Effendy, Strategi public relation, (Bandung.PT Remaja. 2007). 32

adalah agar perusahaan dapat melihat secara objektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal.²²

Penerapan strategi pemasaran melibatkan penempatan rangsangan pemasaran tersebut dilingkungan konsumen agar dapat afeksi dan kognisi perilaku mereka. Strategi pemasaran dapat mempengaruhi setiap elemen lainnya afeksi dan kognisi perilaku lingkungan dan sebaliknya, dapat dipengaruhi oleh setiap faktor tersebut.²³

Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Jadi perencanaan strategis penting untuk memperoleh keunggulan bersaing dan memiliki produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan dukungan yang optimal dari sumber daya yang ada.

Konsep strategi itu sekurang-kurangnya mencakup lima arti yang saling terkait, dimana strategi adalah suatu:²⁴

²² Rangkuti Freddy, Strategi promosi yang kreatif dan analisis kasus,(Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.2009), 3

²³ Paul Peter Alson Jerry, Consumer Behavior Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 1993), 23.

²⁴ Mintzberg, Menejemen strategis dan kebijakan perusahaan, (Jakarta, Erlangga, 2007),56.

- 1) Perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi secara rasional dalam mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjang.
- 2) Acuan yang berkenan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi.
- 3) Sudut yang diposisikan oleh organisasi saat memunculkan aktivitasnya.
- 4) Suatu perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi dengan lingkungannya yang menjadi batas bagi aktivitasnya.
- 5) Rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabui para pesaing.

Jadi, strategi merupakan hal yang penting karena strategi mendukung tercapainya suatu tujuan. Strategi mendukung sesuatu yang unik dan berbeda dari lawan. Strategi dapat pula mempengaruhi kesuksesan masing-masing perusahaan pula karena pada dasarnya strategi dapat dikatakan sebagai rencana untuk jangka panjang.

Dari pengetahuan diatas, maka yang dimaksud strategi pemulihan disini adalah taktik atau cara yang dilakukan pemerintah Bondowoso untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bondowoso melalui program Jatim Puspa.

b. Pembangunan Ekonomi

1. Pengertian Pembangunan Ekonomi

Sebelum dekade 1960-an, pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai kemampuan ekonomi nasional, dimana keadaan ekonominya mula-mula relatif statis untuk dapat menaikkan dan mempertahankan laju pertumbuhan *Gross National Product* hingga mencapai angka 5-7 persen atau lebih pertahun. Pengertian ini sangat bersifat ekonomis. Namun pengertian pembangunan ekonomi mengalami perubahan saat tahun 1960-an yakni pembangunan yang berorientasikan pada pertumbuhan *Gross National Product* (GNP) saja tidak akan mampu memecahkan masalah secara mendasar di negara sedang berkembang. Hal ini tampak pada taraf dan kualitas hidup sebagian besar masyarakat di negara sedang berkembang yang tidak mengalami perbaikan meskipun GNP per tahun telah tercapai. Artinya, terdapat tanda-tanda kesalahan besar dalam memaknai pembangunan ekonomi secara sempit.

Todaro & Smith menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu 1) berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic*

needs), 2) meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia, dan 3) meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom form survitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.²⁵ Ketiga nilai pokok tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Amartya Sen, pemenang lomba nobel ekonomi tahun 1998 bahwa *development can be seen, it is argued here, as a process of expanding the real freedoms that people enjoy.*

Pembangunan dapat diartikan suatu proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan pada tingkat yang lebih tinggi.²⁶ Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. maka yang dimaksud pembangunan ekonomi adalah proses untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas manusia yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian manusia dalam kesehariannya.

Suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang dengan perubahan ciri penting suatu masyarakat yakni perubahan baik dalam hal teknologi, pola

²⁵ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, 11

²⁶ Abd. Rachim AF, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2015) 68

pikir masyarakat maupun kelembagaan, hal ini yang disebut dengan pembangunan ekonomi.²⁷ Sedangkan menurut Irwan dan Suparmoko pembangunan ekonomi adalah usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil per kapita.²⁸

Definisi pembangunan ekonomi itu sangat luas, bukan hanya meningkatkan GNP tiap tahun saja. Namun pembangunan ekonomi itu bersifat multidimensi yang mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan setiap kegiatan yang dilakukan suatu negara dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. maka pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam rangka jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Dari definisi diatas, Lincolin mendefinisikan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai unsur pokok dan sifat sebagai berikut:²⁹

²⁷ Patta Rapana dan Zulfikry Sukarno, *Ekonomi Pembangunan*, (Makassar : CV Sah Media, 2017)1

²⁸ Irawan dan Suparmoko, *Ekonomi Pembangunan* , 5

²⁹ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, 11

- 1) Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara kontinyu
- 2) Usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita
- 3) Meningkatkan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang
- 4) Perbaikan sistem kelembagaan disegala bidang (misalnya ekonomi, politik, sosial, hukum dan budaya). Sistem kelembagaan ini bisa ditinjau dari dua aspek perbaikan dibidang aturan main (*rule of the games*), baik aturan secara formal maupun informal; dan organisasi (*prayers*) yang mengimplentasikan aturan main tersebut.

Oleh karenanya, pembangunan ekonomi dipandang suatu proses keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor pembangunan ekonomi, sehingga dapat diamati dan dianalisis. Dengan cara tersebut dapat diketahui runtutan peristiwa yang terjadi serta dampak pada peningkatan kegiatan ekonomi terhadap taraf kesejahteraan masyarakat dari satu tahap pembangunan ke tahap pembangunan berikutnya.³⁰

Pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai suatu proses kenaikan dalam pendapatan perkapita. Karena

³⁰ Ibid, 12

kenaikan tersebut mencerminkan tambahan pendapatan dan adanya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat. Biasanya laju pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tingkat pertambahan GNP.

Proses pembangunan ekonomi secara prinsip bukan hanya menyangkut fenomena ekonomi. Pembangunan ekonomi mempunyai dimensi yang lebih luas dan kompleks. Pembangunan ekonomi selain menyangkut dimensi ekonomi, juga menyangkut dimensi sosial, politik, kelembagaan dan lain sebagainya. Dalam proses pembangunan ekonomi, fokus utama sasaran pembangunan selain pertumbuhan, pemerataan, juga menyangkut dampak, aktifitas ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat, lingkungan dan kualitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dicapai.

Dalam hal pembangunan ekonomi masyarakat ini bisa dilakukan dengan mendorong pengembangan inisiatif dan partisipasi masyarakat yang lebih kreatif dan produktif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya ekonomi, sosial, teknologi, serta pengembangan kualitas kelembagaan untuk menunjang penciptaan lapangan kerja bagi penduduk dan masyarakat setempat. Semua itu dimaksudkan untuk meningkatkan

pembangunan ekonomi masyarakat setempat atau pembangunan ekonomi lokal.

Pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang multidimensional yang juga mencakup perubahan yang mendasar didalam struktur sosial, perilaku masyarakat, perbaikan sistem kelembagaan (*institutional development*), selain aspek-aspek ekonomi seperti kenaikan pendapatan perkapita, pemerataan distribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan.

2. Tujuan Pembangunan Ekonomi

Tujuan utama pembangunan adalah untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi diantara negara didunia dan didalam negara itu sendiri.³¹ Tujuan utama dalam pembangunan ekonomi adalah menciptakan pertumbuhan GNP yang setinggi-tingginya, akan tetapi diikuti dengan pemberantasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, peningkatan standar kesehatan dan nutrisi, perbaikan kondisi lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, pemerataan kebebasan individual dan penyelenggara kehidupan budaya.³²

³¹ Michel P Todaro dan Stephen C Smith, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : Erlangga, 2006) 03

³² Lia Amalia, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007) 01

Tujuan inti pembangunan antara lain :³³

- 1) Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan perlindungan keamanan.
- 2) Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan materil, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan.
- 3) Perluasan pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu serta bangsa.

3. Masalah Pokok Pembangunan Ekonomi

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi.³⁴

2) Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan dipengaruhi oleh ketidakmerataan distribusi pendapatan. Lewat pemahaman

³³ Michel P Todaro dan Stephen C Smith, *Pembangunan Ekonomi*,,,, 28-29

³⁴ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, ,111

yang mendalam akan masalah ketidakmerataan dan kemiskinan, memberikan dasar yang baik untuk menganalisis dasar pembangunan yang lebih khusus seperti pertumbuhan penduduk, pengangguran, pembangunan perdesaan, pendidikan, perdagangan internasional dan sebagainya.³⁵

3) Kemiskinan

Kemiskinan menggambarkan kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yaitu sandang, pangan dan papan.³⁶

c. Konsep Strategi Pembangunan Ekonomi

a) Strategi Upaya Minimum Kritis

Leibenstein mengatakan bahwa dalam masa transisi dari keadaan keterbelakangan menuju keadaan yang lebih maju dimana kita dapat mengharapkan pertumbuhan jangka panjang yang mantap (*steady economic growth*) diperlukan kondisi dimana suatu perekonomian harus mendapatkan rangsangan pertumbuhan yang lebih besar diatas batas minimum kritis tertentu.³⁷ Setiap perekonomian akan

³⁵ Ibid, 214

³⁶ Ardianto Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : Deepublish, 2017) 09

³⁷ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, ,, 122

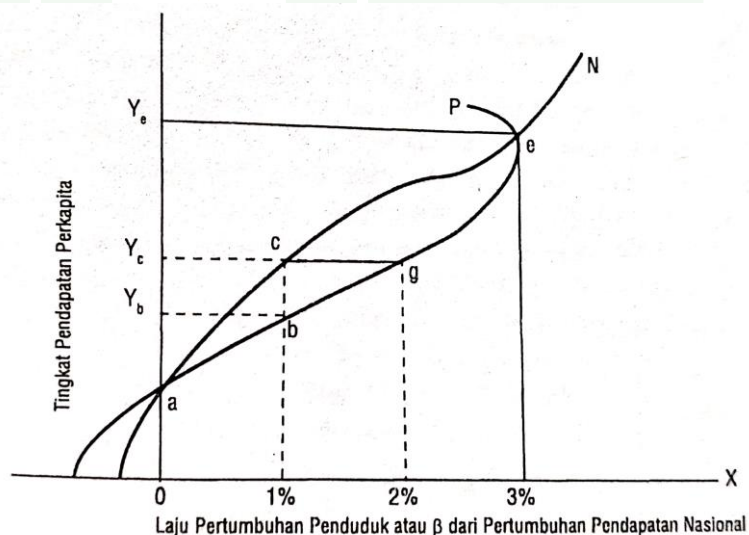
tunduk pada hambatan dan rangsangan yang terjadi. Hambatan berdampak menurunkan pendapatan perkapita dari tingkat sebelumnya, sementara rangsangan cenderung akan meningkatkan pendapatan perkapita. Setiap negara akan tetap berada dalam keterbelakangan jika besar rangsangan lebih kecil dari besar hambatan yang dihadapi. Namun, apabila faktor yang mampu meningkatkan pendapatan mendapat rangsangan yang lebih besar dibandingkan dengan hambatan yang dihadapi, maka usaha minimum kritis tersebut dapat tercapai sehingga perekonomian mengalami kemajuan.

Pertumbuhan penduduk yakni fungsi dari pendapatan kapita. Laju pertumbuhan penduduk berkaitan erat dengan berbagai tahap pembangunan ekonomi. Tingkat keseimbangan subsisten, laju pendapatan, kesuburan dan kematian sesuai dengan tingkat kelangsungan hidup penduduk. Jika pendapatan per kapita naik diatas posisi keseimbangan, maka tingkat kematian (mortalitas) akan menurun dan tidak bersamaan dengan tingkat kesuburan menurun. Dampaknya laju pertumbuhan penduduk meningkat, kenaikan pendapatan perkapita menaikkan laju pertumbuhan penduduk. Setelah melampaui titik tersebut, kenaikan pendapatan per kapita akan menurunkan tingkat

kesuburan. Ketika pembangunan mencapai tahap maju maka laju pertumbuhan penduduk akan menurun.³⁸

Dumont dalam tesis Kapilaritas sosialnya menyatakan bahwa kenaikan pendapatan perkapita akan mengurangi keinginan punya banyak anak untuk menunjang pendapatan orang tua. Laju pertumbuhan maksimum penduduk ditentukan secara biologis antara 3 sampai 4 persen. Dalam rangka mengatasi kekritisian penduduk ini, diperlukan usaha minimum kritis yang cukup besar.

Gambar 1.1
Perbandingan antara laju Pertumbuhan Penduduk dengan Tingkat Pendapatan/kapita

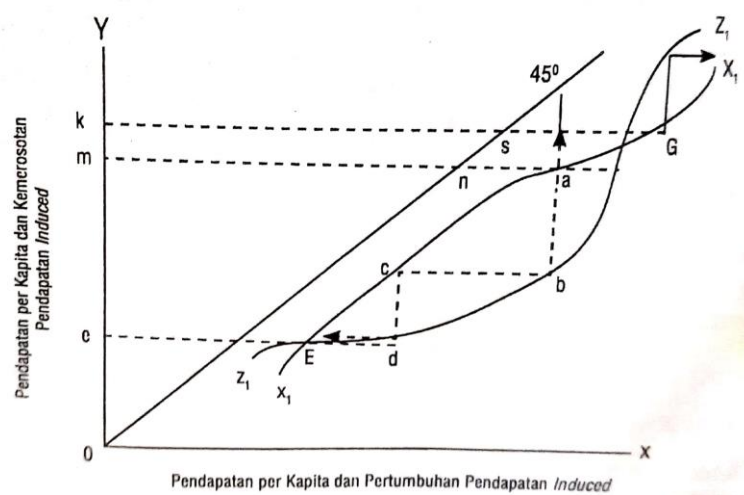


³⁸ Ibid, 123

Garis **N** menunjukkan laju pendapatan perkapita pada saat tingkat pertumbuhan pendapatan nasional sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Kurva **P** menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di tiap pertumbuhan perkapita. Titik **A** mewakili titik keseimbangan subsisten bahwa tidak ada pertumbuhan penduduk dan pendapatan. Jika pendapatan perkapita dinaikkan pada Y_b , maka laju pertumbuhan penduduk dan pendapatan naik sebesar 1%, dst.

Tingkat pendapatan perkapita berfungsi sebagai kekuatan pendorong pendapatan, sedangkan tingkat pertumbuhan penduduk merupakan faktor penghambat pendapatan. Strategi upaya minimum kritis akan dijelaskan lebih detail pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.1
Upaya Minimum Kritis



Garis 45' mengukur pendapatan dan penurunan pendapatan perkapita yang dirangsang. Kurva $x1X1$ mewakili semua kekuatan pendorong pendapatan perkapita, sedangkan kurva $z1Z1$ mewakili kekuatan penghambat pendapatan perkapita. Jika rangsangan itu menaikkan pendapatan perkapita dari tingkat keseimbangan O_e ke O_m , maka hal tersebut menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita sebesar na . Pada tingkat ini, kekuatan penghambat bf lebih besar dari kekuatan pendorong pendapatan af sehingga menghasilkan lintasan menurun **abcd** hingga mencapai posisi keseimbangan **E**.

Selain pertumbuhan penduduk, ada faktor yang mempengaruhi upaya minimum kritis, yakni (1) Skala disekonomi internal, yang timbul sebagai akibat tak dapat 'dibaginya' (*indivisible*) faktor produksi, dan (2) Skala disekonomi eksternal yang timbul sebagai akibat adanya ketergantungan eksternal, hambatan budaya dan kelembagaan disuatu negara. Untuk mengatasi kedua hal tersebut, diperlukan upaya minimum kritis yang cukup besar.

Upaya ini tidak dapat dilakukan pada pendapatan subsisten, karena pengeluaran pada tingkat pendapatan subsisten, karena pengeluaran pada tingkat pendapatan

subsisten hanya mampu untuk bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Sedangkan golongan kecil masyarakat kaya terperangkap pada konsumsi barang mewah akibat adanya *demonstration effect*. Hanya sebagian kecil pendapatan mereka digunakan untuk reinvestasi. Jadi, upaya minimum kritis harus lebih besar dan berada diatas pendapatan subsisten, agar roda pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dapat bergerak.

b) Strategi Pembangunan Seimbang

Istilah pembangunan seimbang diciptakan oleh Nurkse (1956), pertama kali dikemukakan oleh Paul Rosenstein (1953). Strategi pembangunan seimbang diartikan sebagai pembangunan berbagai jenis industri secara bersama (*simultaneous*) sehingga industri tersebut saling menciptakan pasar bagi yang lain. Selain itu, strategi pembangunan seimbang ini juga dapat diartikan sebagai keseimbangan pembangunan diberbagai sektor.³⁹ Misalnya antara sektor produktif dan sektor prasarana, sektor industri dan sektor pertanian, sektor luar negeri dan sektor domestik. Singkatnya, pembangunan yang serentak dan

³⁹ Ibid, 129.

harmonis diberbagai sektor ekonomi sehingga semua sektor akan tumbuh bersama.

Strategi ini memerlukan kesimbangan antara permintaan dan penawaran. Sisi penawaran memberikan penekanan pada pembangunan serentak dari semua sektor yang saling berkaitan dan berfungsi menaikkan penawaran barang. Sebaliknya, sisi permintaan berhubungan dengan penyediaan kesempatan kerja lebih besar dan penambahan pendapatan agar permintaan barang dan jasa dapat tumbuh. Jika semua industri dibangun serentak maka jumlah tenaga kerja yang terserap sangat besar. Dengan begitu akan tercipta permintaan atas produk dari masing-masing industri karena sifat komplementer antar mereka.

Menurut Lewis (1954) perlunya pembangunan seimbang didasarkan pada keuntungan yang diperoleh dari adanya saling ketergantungan antar berbagai sektor, yakni sektor pertanian dan sektor industri serta antara sektor dalam negeri dan sektor luar negeri. Akan timbul banyak hal apabila usaha pembangunan hanya dipusatkan pada satu sektor saja. Tanpa adanya keseimbangan bangunan antar berbagai sektor mengakibatkan ketidakstabilan dan gangguan terhadap kelancaran kegiatan ekonomi sehingga proses pembangunan terhambat.

c) Strategi Pembangunan Tak Seimbang

Strategi pembangunan tidak seimbang adalah lawan dari strategi pembangunan seimbang. Investasi seyogyanya dilakukan pada sektor yang terpilih dari pada secara serentak diseluruh sektor ekonomi. Investasi harus dilakukan pada satu sektor yang terpilih saja agar cepat berkembang dan keuntungan ekonomis yang diperoleh dapat digunakan untuk sektor pembangunan lain. dengan demikian, ekonomi akan terus bergerak dari lintasan tidak seimbang menuju pembangunan seimbang.

Strategi ini dikenalkan oleh Albert O. Hirschman dalam bukunya berjudul "*The Strategy of Economic Development*". Menurutnya, investasi pada satu industri atau sektor strategis dinilai akan mampu membuka kesempatan investasi baru dan membuka jalan bagi proses pembangunan selanjutnya. Hirschman menyatakan bahwa pembangunan itu suatu "rantai disequilibrium" yang harus dipertahankan bukan dihapuskan.

Pembangunan tak seimbang adalah pola pembangunan yang lebih cocok untuk mempercepat proses pembangunan di negara sedang berkembang. Pola

pembangunan tak seimbang menurut Hirschman berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :⁴⁰

- 1) Secara historis pembangunan ekonomi yang terjadi coraknya tidak seimbang.
- 2) Untuk mempertinggi efisiensi penggunaan sumberdaya yang tersedia.
- 3) Pembangunan tak seimbang akan menimbulkan kemacetan atau gangguan-gangguan dalam proses pembangunan tetapi akan menjadi pendorong bagi pembangunan selanjutnya.

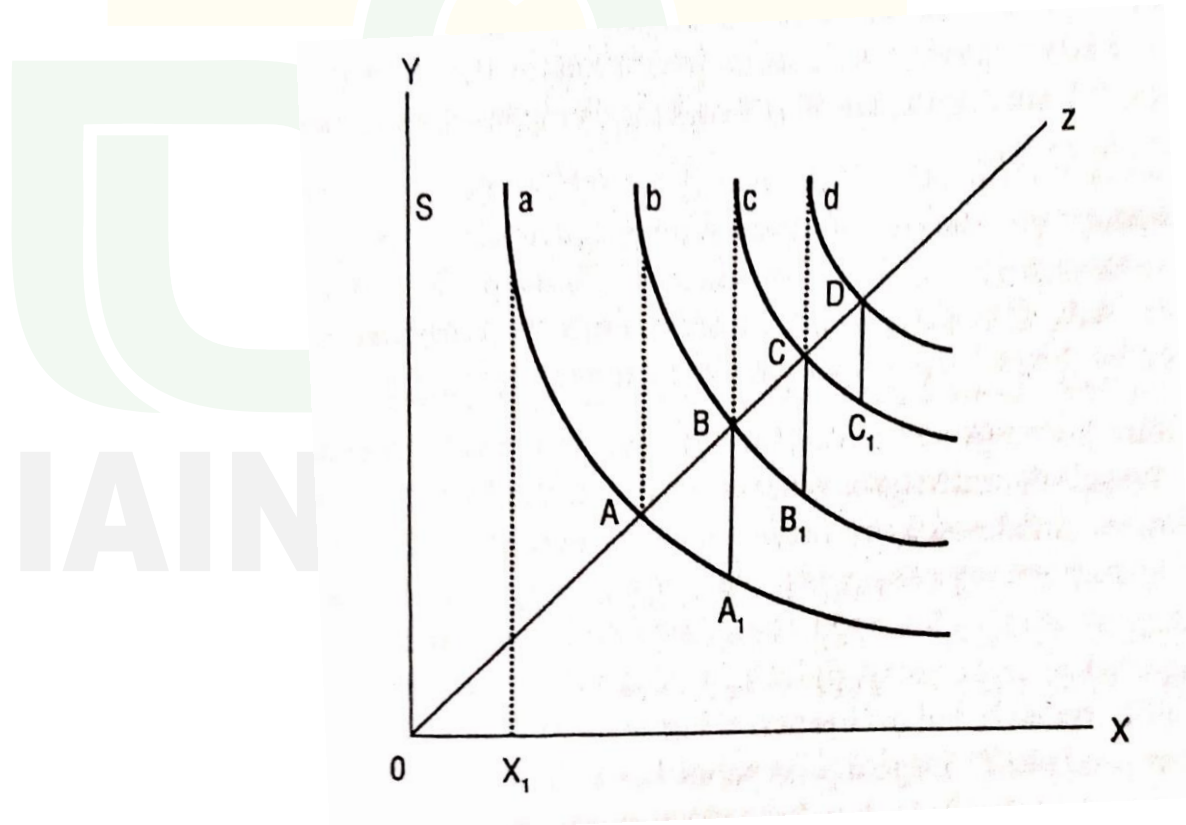
Pembangunan tak seimbang ini akan tampak bahwa berbagai sektor kegiatan ekonomi mengalami perkembangan dengan laju yang berbeda. Hal ini yang akan menimbulkan suatu ketidakseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Namun keadaan tersebut akan merangsang perkembangan usaha-usaha lain yang terkait. Selain itu akan merangsang pula untuk melaksanakan investasi yang lebih banyak pada masa yang akan datang. Dengan demikian pembangunan tak seimbang akan mempercepat pembangunan ekonomi pada masa yang akan datang.

⁴⁰ Ibid, 141.

Pembangunan tidak seimbang lebih tepat untuk dilaksanakan di negara yang sedang berkembang, karena negara tersebut menghadapi masalah sumberdaya. Dengan melakukan pembangunan tak seimbang maka usaha pada satu waktu tertentu akan dipusatkan pada sektor yang mendorong investasi terpengaruh (*induced investment*) diberbagai sektor di periode selanjutnya karenanya sumberdaya yang langka dapat digunakan efisien pada tiap tahap pembangunan.

Gambar 3.1

Strategi Pembangunan Tak Seimbang



gambar kurva tersebut menunjukkan bahwa jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai suatu tingkat produksi tertentu tergantung pada besarnya SOC yang tersedia dalam masyarakat.

2. Pembangunan Ekonomi Daerah

1) Pengertian Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.⁴¹

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi

⁴¹ Ibid, 298

sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun prekonomian daerah.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses, yakni proses yang mencakup pembentukan institusi baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan baru.

Hal ini sesuai dengan paradigma baru teori pembangunan ekonomi daerah sebagai berikut :

Tabel
Paradigma Baru Teori Pembangunan Ekonomi Daerah⁴²

Komponen	Konsep Lama	Konsep Baru
Kesempatan kerja	Semakin banyak perusahaan = semakin banyak peluang kerja	Perusahaan baru mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi penduduk daerah
Basis pembangunan	Pengembangan sektor ekonomi	Pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru
Aset-aset lokasi	Keunggulan komparatif didasarkan pada aset fisik	Keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan
Sumberdaya pengetahuan	Ketersediaan angkatan kerja	Penegtahuan sebagai pembangkit ekonomi

Pendekatan ini merupakan sintesa dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. Pendekatan ini memberikan

⁴² Ibid, 302

dasar bagi kerangka pikir dan rencana tindakan yang akan diambil dalam konteks pembangunan ekonomi daerah.

2) Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan suatu proses perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumberdaya publik sektor swasta harus punya peran dalam proses perencanaan. Melalui strategi pembangunan ekonomi daerah suatu daerah terdapat berbagai unsur yang saling berinteraksi satu sama lain. Pentingnya campur tangan pemerintah dalam pembangunan daerah dimaksud untuk mencegah akibat-akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah, serta menjaga agar pembangunan dan hasilnya dapat dinikmati oleh berbagai daerah yang ada.

Strategi pembangunan ekonomi daerah dapat dikelompokkan menjadi empat yakni :⁴³

1) Strategi Pengembangan Fisik/Lokalitas

Tujuan strategi pengembangan fisik atau lokalitas ini adalah untuk menciptakan identitas daerah atau kota, memperbaiki basis pesona atau kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki daya tarik pusat kota dalam upaya untuk memperbaiki dunia usaha daerah. Adapun beberapa alat untuk menciptakan tujuan pembangunan ini adalah

⁴³ Hanly Fendy Djohar Siwu, “*Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*” Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Universitas Sam Rantulangi Manado, hal 8 dalam <https://scolar.google.co.id>, diakses pada tanggal 28 November 2019, pukul 10.00 WIB.

pembuatan bank tanah, pengendalian perencanaan dan pembangunan, penataan kota, pengaturan tata ruang, penyediaan perumahan dan pemukiman yang baik, penyediaan infrastruktur seperti sarana air bersih, listrik, tanaman, parkir dan sebagainya.

2) Strategi Pengembangan Dunia Usaha

Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah karena daya tarik, kreasi atau daya tahan kegiatan dunia usaha merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat. Adapun beberapa alat untuk mengembangkan diantaranya, penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha, pembuatan pusat informasi terpadu, pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil, pembuatan sistem pemasaran bersama, pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan.

3) Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karenanya kualitas dan ketrampilan sumberdaya manusia adalah suatu keniscayaan. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan cara pelatihan dengan sistem *customized training*, pembuatan bank keahlian, penciptaan iklim yang

mendukung bagi berkembangnya lembaga pendidikan dan ketrampilan di daerah, pengembangan lembaga pelatihan.

4) Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Kegiatan pengembangan masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan suatu kelompok masyarakat tertentu disuatu daerah. Dalam bahasa populer sekarang sering dikenal dengan istilah kegiatan pemberdayaan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan manfaat sosial, misal penciptaan proyek-proyek padat karya untuk memenuhi keuntungan dari usahanya.

3) Kebijakan Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan

Kebijakan pembangunan pedesaan secara umum dapat dipilah dalam tiga kelompok, yakni ;⁴⁴

1) Kebijakan Tidak Langsung

Kebijakan ini diarahkan kepada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya pembangunan pedesaan melalui pengembangan kegiatan sosial ekonomi, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, penguatan kelembagaan serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

⁴⁴ Cornelis Rintuh dan Miar, *Kelembagaan dan Ekonomi Rakya.*, 55

2) Kebijakan Langsung

Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan akses terhadap prasarana dan sarana yang mendukung penyediaan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan, peningkatan produktivitas dan pendapatan khususnya masyarakat berpendapatan rendah.

3) Kebijakan Khusus

Kebijakan ini diutamakan pada penyiapan penduduk untuk dapat melakukan kegiatan sosial ekonomi sesuai dengan budaya setempat. Upaya khusus ini pada dasarnya mendorong dan memperlancar proses transisi dari kehidupan subsisten menjadi kehidupan pasar. Bagian dari kebijakan khusus adalah peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap kegiatan usaha penduduk berupa jaminan kepastian usaha dan kemudahan akses serta pembentukan lembaga yang memberi layanan secara terpilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan pedesaan diharapkan ikut berperan sebagai basis pertumbuhan ekonomi nasional yang dapat menciptakan lapangan kerja berkualitas di pedesaan yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan infrastruktur di kawasan

permukimannya. Selain itu, meningkatnya akses dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Upaya pencapaian tersebut akan dilakukan melalui enam langkah kebijakan pokok yakni :⁴⁵

- a) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah desa yang demokratis dan partisipatif
- b) Memantapkan peran lembaga kemasyarakatan dan mengembangkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat.
- c) Mewujudkan kesejahteraan keluarga dan sosial budaya masyarakat yang dinamis.
- d) Mewujudkan produktifitas dan usaha ekonomi produktif masyarakat yang maju, mandiri dan berorientasi pasar yang didukung lembaga keuangan mikro pedesaan
- e) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan.
- f) Terus mengupayakan peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana pedesaan secara lebih merata.

⁴⁵ Hikmat Kusumaningrat, Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2009), hal.152.

3. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera”. Mengandung pengertian dari bahasa Sanskerta “Catera” yang berarti payung. Artinya orang yang sejahtera adalah orang yang terbebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram lahir batin. Sedangkan sosial berasal dari kata “Socius” yang berarti kawan, teman, dan kerja sama. Orang yang sosial adalah orang dapat berelasi dengan orang lain dan lingkungannya dengan baik. Jadi kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi dimana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkungannya secara baik.

1) Kesejahteraan menurut Ahli

Menurut Friendlander (1980) *social welfare is the organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationships that permit them to develop their full capacities and to promote their well being in harmony with the needs of their families and the community.* Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi yang dirancang untuk membantu individu dan kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan

mereka dapat mengembangkan kemampuan dan yang sepenuhnya selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.⁴⁶

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu penyesuaian timbal balik antara individu dengan lingkungan sosial.

Sedangkan menurut M. Umer Chapra makna sejahtera bukan berarti kaya namun berarti ideal yakni keadaan dimana terjadi keseimbangan antara keadaan material dan spiritual yang diperoleh dari sumber daya yang ada. Oleh karena itu, sebuah negara islam menurut M. Umer Chapra dapat dikatakan sebagai negara yang sejahtera atau ideal apabila martabat batin dan moral masyarakat meningkat, kewajiban masyarakat sebagai khalifah dibumi terhadap daya alam telah ditunaikan dan tegaknya keadilan serta lenyapnya penindasan. Negara sejahtera menurut islam, bukan negara kapitalis atau sosialis, akan tetapi negara dengan konsep Islam dan kehidupan Islami.⁴⁷

⁴⁶ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2018) 10

⁴⁷ Anindya Aryu Inayati, *Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra*, Pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol-2 Desember 2013, 14

2) Kesejahteraan menurut Islam

Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Dalam hal ini Islam sangat mengedapankan kesejahteraan seluruh umat manusia. Istilah umum yang digunakan dalam mendiskripsikan kehidupan yang sejahtera secara material spiritual pada kehidupan dunia dan akhirat dalam ajaran Islam adalah *falah*.⁴⁸

Kesejahteraan menurut Islam terbagi atas dua pengertian yakni :⁴⁹

- 1) Kesejahteraan holistik dan seimbang, yakni kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Manusia terdiri dari unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Sehingga manusia memiliki dimensi individu dan sosial, manusia akan merasa bahagia apabila terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.
- 2) Kesejahteraan di dunia dan di akhirat, hal ini disebabkan manusia tidak hanya hidup didunia saja, melainkan juga dialam setelah kematian kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi didunia ditunjukkan

⁴⁸ Anto, M.Hendrie, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*, (Yogyakarta : Ekonosia, 2003), 7

⁴⁹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2008) 4

dalam rangka untuk memperoleh kecukupan diakhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan. Sebab ini merupakan sesuatu yang abadi dan lebih bernilai dibanding kehidupan dunia.

Kesejahteraan dalam ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, tetapi jika mencakup nilai moral, spiritual dan juga nilai sosial. Sehingga kesejahteraan berdasarkan Islam mempunyai konsep yang lebih mendalam.

Kesejahteraan hidup seseorang pada realitasnya memiliki banyak indikator yang dapat diukur. Pengukuran tingkat kesejahteraan seseorang juga sering mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada tahun 1950-an kesejahteraan diukur dari aspek fisik seperti berat badan, tinggi dan gizi, harapan hidup serta *income*. Pada tahun 1980-an terjadi perubahan dimana kesejahteraan diukur dari *income*, tenaga kerja dan hak-hak sipil. Pada tahun 1990-an terjadi perubahan lagi, Mahbub Ul-Haq merumuskan ukuran kesejahteraan dengan Human Development (HDI). Dengan HDI, kesejahteraan tidak lagi ditekankan pada aspek ekonomi saja, tetapi juga pada aspek

kualitas sosial individu. HDI merupakan gabungan dari tiga komponen yakni indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks pendapatan per-kapita.

Menurut beberapa ahli dalam buku P3EI bahwa indikator kesejahteraan Islam adalah terpenuhinya kebutuhan fisik dari rizqi yang halal, hidup sehat secara jasmani dan rohani, keberkahan rezeki yang diterima, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, rasa cinta kasih sesama, ridha dan qanaa'ah dengan apa yang diberikan Allah kepadanya serta, merasa bahagia.⁵⁰

Al-Qur'an juga menyinggung tentang kesejahteraan yang terdapat pada surat An-Nahl ayat 97 yang artinya "*Barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan*".

Yang dimaksud dengan kehidupan yang baik pada ayat diatas adalah memperoleh rizki yang halal dan baik, ada juga pendapat yang mengatakan kehidupan yang baik adalah ibadah kepada Allah disertai memakan dengan rizki yang halal dan memiliki sifat qanaah, ada pendapat lain yang mengatakan

⁵⁰ Ibid, 13

kehidupan yang baik adalah hari demi hari selalu mendapat rizki dari Allah. Menurut Al-Jurjani, rizki adalah segala yang diberikan oleh Allah SWT. kepada hewan untuk diambil manfaatnya baik itu rizki yang halal maupun haram.⁵¹ Rasulullah dalam hadistnya bersabda bahwa “*Sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang melakukan amal perbuatan atau pekerjaan dengan tekun dan sungguh-sungguh* (HR. Al-Bahaqi)”.

Dengan demikian kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan materi saja, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual.

a. Ad-Dien : Memelihara Agama

Memelihara agama dapat diukur dari implementasi rukun Islam (syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji). Selain itu juga dilihat pula dari tercapainya amalan rukun nikah.⁵²

b. An-Nafs : Memelihara Jiwa

Perwujudan pemeliharaan jiwa yakni dengan tepenuhinya kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, kesehatan serta fasilitas umum lainnya.⁵³

⁵¹ Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab At-Ta'rifat*, Vol.3 (Beirut : Dar al Kutub al-Ilmiyah 1983), 70

⁵² Muhammad Nafik Hadi, *Ekonomi ZISWAQ (zakat, infak, shodaqoh dan waqaf)*, (Surabaya : Ifdi dan Cenforis, 2008), 30

⁵³ Ibid, 31

c. Al-aql : Memelihara Akal

Memelihara akal dapat dibedakan menjadi tiga peringkat. Dalam peringkat *dharuriyah* misalnya adalah diharamkannya meminum minuman keras. Dalam peringkat *hajjiyah* seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam peringkat *tahsiniyyah* yaitu misalnya menghindarkan diri dari mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat.

d. An-nasl : Memelihara Keturunan

Kita sebagai manusia tidak perlu khawatir apabila masih belum mampu dalam hal ekonomi untuk menikah karena Allah SWT akan memberikan rezeki serta karunia-nya.

e. Al-maal : Memelihara Harta

Cara menjaga jaga harta adalah meliputi mencari pendapatan yang layak dan adil, memiliki kesempatan berusaha, rejeki yang halal dan thoyib, serta persaingan yang adil.

Prinsip dasar ekonomi Islam menurut Umer Chapra adalah prinsip tauhid, khilafah dan keadilan. Tiga prinsip dasar tersebut menggambarkan keadilan sosial yang membuahkan hasil kesejahteraan sosial, perlu dikelola oleh kepemimpinan yang efektif yang berprinsip kepada

khilafah dan harus bermuara pada tujuan mulia untuk mendapatkan ridho Tuhan yang mulia. Hal ini sangat erat sekali kaitannya dengan tujuan utama syariat Islam, yakni mewujudkan kemashlahatan untuk ummat baik di dunia maupun di akhirat.⁵⁴ Berikut adalah pemikiran ekonomi

Umer Chapra terkait ekonomi Islam

a. Konsep Falah dan Hayatan Thayyibatan

Chapra menjelaskan mengenai aktualisasi konsep falah dan hayatan thayyibatan merupakan inti dari tantangan ekonomi bagi negara muslim. Sebab kedua konsep ini berasal dari Islam, diajarkan Islam dan hendaknya pula diterapkan dalam kehidupan muslim untuk mewujudkan kebahagiaan dunia akhirat.

Hal ini menuntut peningkatan moral, persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi, dengan pemanfaatan sumber daya yang langka untuk mengentaskan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dan meminimalkan kesenjangan pendapatan dan kekayaan.⁵⁵

b. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter telah ada sejak zaman Rosulullah. Bangsa arab sebagai jalur perdagangan antara Romawi-India-Persia, serta Sam dan Yaman,

⁵⁴ M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, (Jakarta :Gema Insani Press, 2001), 202

⁵⁵ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), 336

telah menjadikan dinar dan dirham sebagai alat tukar resmi. Maka pertukaran valuta asing, penggunaan cek dan *promissory notes*, kegiatan impor ekspor serta factoring atau anjak piutang, sudah dikenal dan banyak digunakan dalam perdagangan.⁵⁶

Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Rasulullah antara lain adalah pelarang riba dan tidak digunakannya sistem bunga. Sehingga stabilitas ekonomi terdorong maju dengan lebih cepat dengan pembangunan infrastruktur sektor riil. Rasulullah juga melarang transaksi tidak tunai sehingga menutup kemungkinan untuk melakukan riba atau ihtikar atau penimbunan.

c. Sistem Perbankan Syariah

Chapra menyatakan bahwa dalam suatu sistem keuangan Islam, adanya bank syariah sebagai instrumen pendukung adalah suatu keniscayaan. Bank syariah dengan sistem, *Corporate Governance* dan manajemen yang baik, akan memperkuat pergerakan keuangan Islam, meminimalisir kegagalan dan diharapkan mampu

⁵⁶ Ibid, 338

mewujudkan keadilan sosio-ekonomi dengan pelarangan bunga.⁵⁷

Sedangkan untuk melakukan standarisasi produk dan jasa, bank syariah hendaknya mengadakan forum diskusi antara ulama fikih, sebagaimana yang dilaksanakan oleh IDB dengan membuat lembaga diskusi yang disebut *Council of Islamic Bank*.⁵⁸

d. Konsep Negara Sejahtera menurut Islam

Konsep negara kesejahteraan adalah konsep yang ditawarkan sebagai solusi dari kegagalan sistem kapitalisme dan sosialisme, dimana konsep ini berusaha menyampurkan kedua sistem dan menemukan titik temu yang melengkapi kelemahan keduanya.⁵⁹

Negara kesejahteraan mengadopsi pendapat Keynes tentang peran seimbang pemerintah dalam perekonomian, yang dalam sistem kapitalisme, peran ini ditiadakan sebab keseimbangan perekonomian di pasar diatur oleh *invisible hand* dalam pasar itu sendiri. Peran kesejahteraan dengan 'regulasi yang tepat' dan pengeluaran untuk tujuan-tujuan kesejahteraan juga dimasukkan ke dalam konsep ini. Namun, yang terjadi

⁵⁷ M. Umer Chapra, *Tariquillah Khan, Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), 111

⁵⁸ Ibid, 115

⁵⁹ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan*, 56.

justru pengeluaran untuk tujuan kesejahteraan yang terlalu besar tanpa dibarengi dengan pengurangan pengeluaran sektor swasta dan pemerintah pada bidang-bidang lainnya, dan menimbulkan klaim berlebihan pada sumber-sumber daya dan menjadi bumerang bagi konsep ini.⁶⁰

Sedangkan sistem sosialis, tidak mampu bertahan melawan arus *inflasi*, pengangguran dan utang luar negeri yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Negara-negara yang berusaha mengikuti teori sosialis semisal Yugoslavia, Hungaria, Polandia dan Cina serta beberapa negara lainnya, tidak berhasil memecahkan masalah-masalah perekonomian negara yang kian hari kian memburuk. Sosialisme Demokrat pada umumnya dipersamakan dengan negara kesejahteraan (*welfare state*) dan penekanan pada demokrasi ekonomi dan politik dan dikombinasikan dengan regulasi dan nasionalisasi industri-industri 'kunci', reformasi bidang perburuhan, dan pelayanan kesejahteraan seperti santunan pengangguran, pendidikan subsidi atau gratis, pelayanan transportasi dan kesehatan serta jaminan kesejahteraan.

⁶⁰ Ibid, 60-61.

Tujuan utama dari *welfare state* ini adalah penghapusan kemiskinan, penyediaan pelayanan sosial oleh negara, pemerataan kekayaan yang lebih besar, kesempatan kerja penuh dan stabilitas ekonomi. Namun, pada akhirnya, meskipun kekayaan ekonomi cukup besar, tapi kemiskinan tetap ada, ketidakseimbangan dan ketidakstabilan ekonomi terus meningkat bersamaan dengan kesenjangan pendapatan dan konsekuensi lainnya yang tidak sehat dalam perekonomian.⁶¹

Menilik dari kegagalan sistem Kapitalis sekuler dan Sosialis, Chapra menegaskan, kewajiban negara Islam dalam mewujudkan negara sejahtera adalah menciptakan standar hidup yang layak bagi rakyatnya dan membantu mereka yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya.

Namun konsepsi Islam dalam pemerataan pendapatan dan distribusi kekayaan tidak menyamaratakan kepemilikan bagi semua orang, tetapi mengakui perbedaan yang dibatasi oleh hak-hak kaum miskin dengan zakat untuk mewujudkan keadilan. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, maka negara

⁶¹ Ibid, 102-105.

memerlukan adanya sumber-sumber penghasilan. Sumber-sumber tersebut antara lain: zakat, penghasilan dari sumber alam, pemungutan pajak dan pinjaman.

Makna dari sejahtera haruslah diperjelas. Menurut Chapra, 'sejahtera' bukan berarti 'yang kaya' namun 'yang ideal' yaitu keadaan dimana terjadi keseimbangan antara keadaan material dan spiritual yang diperoleh dari sumber-sumber daya yang ada. Oleh karena itu, negara Islam dapat dikatakan menjadi negara yang sejahtera atau ideal bilamana martabat batin dan moral masyarakat meningkat, kewajiban-kewajiban masyarakat sebagai khalifah di bumi terhadap sumber daya alam telah ditunaikan, dan tegaknya keadilan serta lenyapnya penindasan. Negara Sejahtera menurut Islam, bukanlah negara kapitalis ataupun sosialis, akan tetapi negara dengan konsep Islam dan kehidupan Islami.

3) Kesejahteraan menurut UU

Dalam UU No 11 tahun tentang Kesejahteraan sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, soiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan

penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.⁶²

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas dan keberlanjutan. Dalam hal ini penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk *pertama*, meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup. *Kedua*, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian. *Ketiga*, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. *Keempat*, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. *Kelima*, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, dan. *Keenam*,

⁶² Undang-Undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

4) Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat memiliki tujuan yakni :

- (1) Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial harmonis dengan lingkungannya.
- (2) Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat dilingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.⁶³

Schneiderman (1972) mengemukakan tiga tujuan dari sistem kesejahteraan sosial yakni pemeliharaan sistem, pengawasan sistem dan perubahan sistem.

- a) Pemeliharaan Sistem yakni memelihara dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang bertalian dengan definisi makna dan tujuan hidup. Motivasi bagi kelangsungan hidup orang seorang dan kelompok; norma-norma yang menyangkut pelaksanaan peranan

⁶³ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, 10

anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua, dan peranan pria dan wanita; norma-norma yang berhubungan dengan produksi dan distribusi barang dan jasa; norma-norma yang berhubungan dengan penyelesaian konflik dalam masyarakat dan lain-lain.

- b) Pengawasan sistem, yakni melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial.
- c) Perubahan sistem, yakni mengadakan perubahan kearah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat.

5) Fungsi Kesejahteraan Masyarakat

Untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang di akibatkan terjadinya perubahan sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁶⁴

Fungsi kesejahteraan masyarakat sebagai berikut :

- (1) Fungsi Pencegahan yakni, Kesejahteraan masyarakat ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial yang baru.

⁶⁴ Ibid, 12

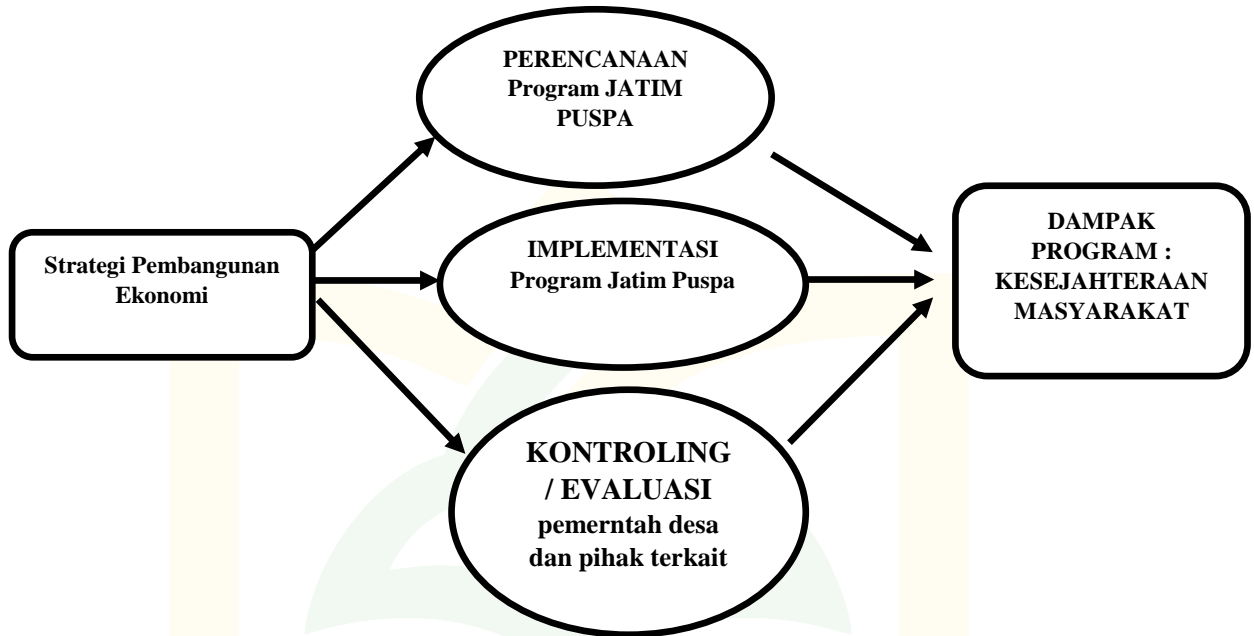
- (2) Fungsi penyembuhan yakni, kesejahteraan masyarakat ditujukan untuk menghilangkan kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup fungsi pemulihan.
- (3) Fungsi pengembangan yakni, untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber daya sosial dalam masyarakat.
- (4) Fungsi penunjang yakni, kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

C. Kerangka Konseptual

Setiap penelitian memerlukan kejelasan titik tolak atau landasan berfikir dalam memecahkan atau menyoroiti masalahnya. Karenanya perlu disusun sebuah kerangka teori yang memuat pikiran dalam menggambarkan dari sudut mana penelitian akan disorot.

Kerangka teori yang terdapat dalam tesis ini berupa strategi pembangunan ekonomi daerah. Hal ini memiliki tiga komponen yang sangat berkaitan yakni perencanaan, implementasi dan evaluasi. Dari ketiga komponen tersebut diharapkan mampu menjadi solusi untuk sebuah kesejahteraan masyarakat.

Berikut gambar kerangka konseptual tesis ini:



IAIN JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian pada hakikatnya adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kebenaran mengenai suatu masalah menggunakan metode ilmiah dorongan utama untuk melakukan penelitian adalah rasa ingin tahu yang ada pada diri manusia.⁶⁵ Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Arti dari *rasional* adalah penelitian yang dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga diterima oleh penalaran manusia. *Empiris* merupakan cara penelitian yang dapat diamati oleh indera manusia. Sedangkan *sistematis* artinya, proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.⁶⁶

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan penelitian Kualitatif. Artinya, penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif disebut juga sebagai metode interpretative karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Jenis penelitian

⁶⁵ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), 4.

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Kencana Predana, 2002), 2.

menggunakan *Field research* yaitu penelitian lapangan. Yang langsung terjun ke lokasi penelilita dalam mengali data.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menganalisis, menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab persoalan-persoalan tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi saat ini, baik tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi saat ini, baik tentang fenomena sebagaimana adanya maupun analisis hubungan antara berbagai variabel dalam suatu fenomena.⁶⁷

Penelitian ini juga sering disebut non eksperimen, karena pada penelitian ini peneliti tidak melakukan kontrol dan memanipulasi variabel penelitian. Dengan metode deskriptif, peneliti memungkinkan untuk melakukan hubungan antar variabel, menguji hipotesis mengembangkan generalisasi dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal (West, 1982).⁶⁸

Penelitian deskriptif bertujuan untuk memaparkan, menggambarkan, dan memetakan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berfikir tertentu. Metode ini berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, serta efek yang terjadi.

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif karena penelitian ingin melakukan penelitian secara terinci dan mendalam terhadap

⁶⁷ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2014), 41.

⁶⁸ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 157.

Strategi Pemulihan Ekonomi Desa melalui Program Jatim Puspa untuk Kesejahteraan Masyarakat Bondowoso.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih yaitu di Desa Sukowono dan Desa Kembang kabupaten Bondowoso. Pengambilan lokasi di tempat tersebut memiliki pertimbangan karena lokasi tersebut sesuai dengan judul yang dipenelitian. Berdasarkan observasi manual, peneliti menemukan bahwa kondisi perekonomian di daerah tersebut tergolong menurun semenjak adanya pandemi covid-19. Dalam hal ini peneliti menemukan mati surinya beberapa UMKM dan masyarakat di desa tersebut banyak yang kehilangan pekerjaannya. Sehingga pemerintah Bondowoso melalui program Jatim Puspa melakukan upaya penanggulangan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Sehingga data yang diharapkan terpenuhi nanti dalam penelitian di lokasi ini adalah pendapat masyarakat desa tersebut terhadap strategi yang digunakan pemerintah Bondowoso dalam membangun perekonomian saat pandemi covid-19.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul utama. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan di lapangan, peneliti berperan serta pada situs penelitian dan mengikuti secara aktif kegiatan-kegiatan di lapangan.

D. Subjek penelitian

Pada penulisan karya ilmiah, subyek penelitian yang dimaksud yaitu melaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang ingin diperoleh, siapa yang hendak dijadikan informan, bagaimana data yang akan dicari sehingga validitasnya dapat dijamin. Penentuan subyek penelitian yang digunakan adalah purposive. Purposive yaitu penentuan sumber data pada informan yang dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.⁶⁹

Oleh karena itu, peneliti mengambil jenis subyek penelitian dengan menggunakan purposive dengan tujuan data atau informasi yang diperoleh dari informan lebih dapat dipahami oleh peneliti dan sesuai dengan tujuan peneliti. Informan disini memiliki kriteria yakni pemerintah yang terkait dengan program Jatim Puspa dan memiliki kebijakan dan fungsi didalamnya, para panitia penyelenggara program Jatim Puspa dan para Keluarga penerima manfaat di kabupaten Bondowoso.

Berikut subyek peneliti yang dijadikan informan antara lain :

1. Kepala Dinas Ibu Hairiyah Yulianti S.Sos. MM Pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Bondowoso.
2. Ketua bidang Ibu Hera S.sos pemberdayaan masyarakat dan desa Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten Bondowoso.

⁶⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 216.

3. Kepala Desa penerima Jatim Puspa Kabupaten Bondowoso

1. Kepala Desa Kembang Bapak Buzairi, alasan memilih desa tersebut karena jumlah KPM lebih mayoritas keluarga penerima manfaatnya itu membuktikan angka kemiskinan dan terdapat dampak yang signifikan akibat dampak covid-19.

2. Kepala desa Sukowono Bapak Fathorrahman alasan memilih desa tersebut karena keluarga penerima manfaat terbanyak kedua setelah desa kembang.

a) Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

1. Sri Purwanti, Penjual Bakso Desa Kembang

2. Ayu Farhana, Perancangan Desa Kembang

3. Siti Masruroh, Jasa Pijet Desa Sukowono

4. Maslahah, Penjual Gorengan Desa Sukowono

E. Sumber Data (primer/sekunder)

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana dapat diperoleh. peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden. Dan apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak dan proses sesuatu. Sedangkan apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber datanya.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 34 Tahun 2020 tentang pedoman umum program pemberdayaan masyarakat dan desa dalam rangka penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Jawa Timur dan data yang diperoleh langsung dari kepala dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten bondowoso dan kepala penerima jatim puspa di Kabupaten Bondowoso yakni Desa Sukowono dan Desa Kembang.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku mengenai program Jatim Puspa sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Pada dasarnya data sekunder sebagai sumber yang mampu memberikan informasi tambahan yang dapat memperkuat data pokok.

F. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk mendukung penulisan tesis ini, ada beberapa teknik pengumpulan data yang Penulis gunakan, yakni:

1. Pengamatan (observasi)

Observasi adalah pengamatan langsung dengan suatu benda, kondisi, situasi dan perilaku.⁷⁰ Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu observasi partisipan dan nonpartisipan. Selanjutnya dari instrument yang digunakan, maka observasi dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Pertimbangan digunakannya teknik ini adalah apa yang dikatakan orang seringkali berbeda dengan apa yang orang itu lakukan. Dalam melakukan pengamatan, digunakan strategi nonintervensi. Oleh karena itu, pemakaian alat bantu perekam (jika diperlukan) hanya dilakukan pada acara-acara tertentu yang melibatkan banyak orang, bukan aktivitas individual.⁷¹

Dalam penelitian ini, menggunakan observasi nonpartisipan. Dimana peneliti datang ke tempat kegiatan namun peneliti tidak terlibat secara langsung dengan kegiatan tersebut. Dengan Metode observasi ini data yang di peroleh peneliti mengenai Stretegi pembangunan yang di gunakan oleh Program Jatim Puspa langsung mendatangi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bondowoso, berinteraksi dengan pengusaha mikro kecil menengah untuk mendapatkan data yang di

⁷⁰ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: STAIN Press, 2013), 186.

⁷¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2007), 138.

butuhkan oleh peneliti, mendiskusikan dengan perangkat desa terkait proses perencanaan sampai penyerahan barang kepada penerima manfaat.

2. Wawancara (interview)

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga memperoleh data yang diinginkan dalam suatu topik tertentu.⁷² Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data dari informan dan mencatat serta merekam jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan peneliti.

Terdapat beberapa macam jenis wawancara antara lain, wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur karena dalam pelaksanaannya, lebih bebas dari pada wawancara jenis terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak untuk wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

Data yang ingin diperoleh peneliti dengan wawancara jenis ini adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran dan target keluarga penerima manfaat Program Jatim Puspa
- b. Strategi pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam program Jatim Puspa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Dokumentasi (dokumen)

⁷² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 231.

Selain menggunakan teknik observasi dan teknik wawancara, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian melainkan melalui dokumen. Teknik dokumentasi berguna untuk mencari data berupa buku-buku, laporan arsip, agenda kegiatan dan sebagainya. Adapun data yang akan diperoleh dari dokumentasi yakni dokumentasi atau foto-foto yang relevan dari berbagai sumber

Adapun data-data yang ingin diperoleh dari metode dokumentasi adalah sebagai berikut:

- 1) Struktur Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Bondowoso.
- 2) Daftar Desa Penerima Program Jatim Puspa di Bondowoso.
- 3) Struktur Desa Sukowono dan Desa Kembang.
- 4) Daftar Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Bondowoso.

G. Analisis data

Analisa adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori. Menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang paling penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁷³

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 244.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data model milles, huberman dan Johny Saldana. Mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.⁷⁴

Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), dan menarik kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*).⁷⁵

Miles dan Huberman, "*Data condensation refers to the process of selecting data, focusing, simplifying, abstracting, and transforming the data that appear in written-up field notes or transcriptions*".⁷⁶ Dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip wawancara, dokumentasi, dan materi empiris lainnya, dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

1. Kondensasi data (*data condensation*)

- a. Seleksi Data (*Data Selecting*)

⁷⁴ Ibid, 337.

⁷⁵ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (America: Arizona State University, 2014), 12.

⁷⁶ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (America: Arizona State University, 2014), 12.

Menurut Miles dan Huberman peneliti harus bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis. Informasi-informasi yang berhubungan dengan transivitas dan konteks sosial di dalam proses pembelajaran di kumpulkan pada tahap ini. Peneliti mengumpulkan seluruh informasi tersebut untuk memperkuat penelitian.

b. Pengerucutan (*Fokusing*)

Miles dan Huberman menyatakan bahwa memfokuskan data merupakan bentuk pra analisis. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi hanya membatasi data yang berdasarkan rumusan masalah.

Fokus data pada fokus penelitian pertama yaitu target penerima program Jatim Puspa. Dalam rumusan masalah kedua faktor bentuk program Jatim Puspa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Peringkasan (*Abstrakting*)

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan yang perlu dijaga tetap berada di dalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul dievaluasi, khususnya yang telah terkumpul dievaluasi, khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data. Jika data yang menunjukkan Kecerdasan verbal-

linguistik sebagai penerapan dua bahasa dalam pembelajaran sudah dirasakan baik dan jumlah data sudah cukup, data tersebut digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti.

d. Penyederhanaan dan Transformasi (*Simplifying dan Transforming*)

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara, yakni melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Untuk menyederhanakan data, peneliti mengumpulkan data setiap proses dan konteks sosial dalam tabel.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

*Generically, a display is an organized, compressed assembly of information that allows conclusion drawing and action.*⁷⁷ Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan data aksi.

Dalam proses ini peneliti akan terbantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu termasuk untuk menganalisis data lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.

Peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat yang menjelaskan strategi pembangunan ekonomi desa melalui program Jatim Puspa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Kesimpulan, penarikan/ verifikasi (*Conclusion, drawing/ verification*).

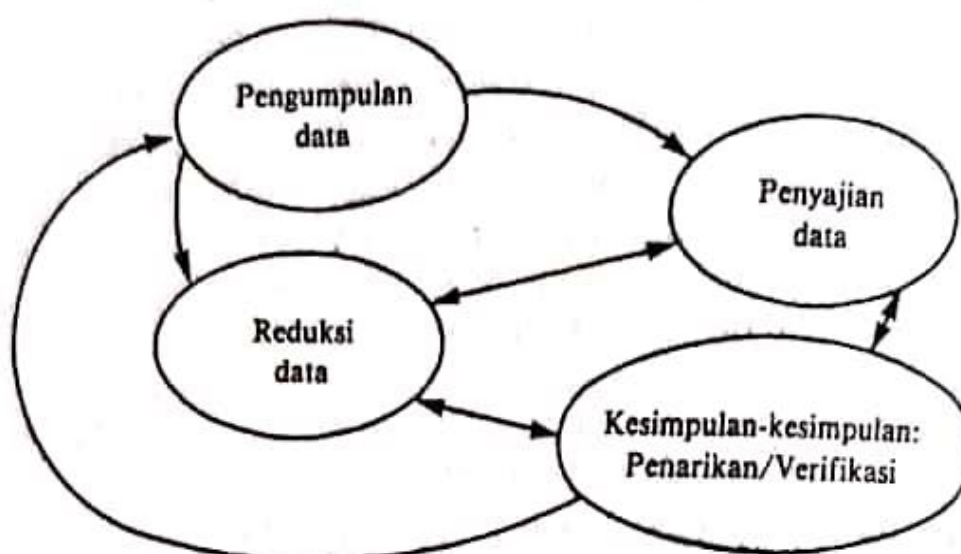
⁷⁷ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (America: Arizona State University, 2014), 12-13

“The third stream of analysis activity is conclusion drawing and verification. From the start of data collection, the qualitative analysis interprets what things mean by noting patterns, causal flows and propotion.”⁷⁸

Langkah ketiga dari analisis data yaitu pembuatan kesimpulan dan verifikasi data. Dari pemulaan pengumpulan data, seseorang menganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat ketentuan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi.

Penelitian ini menyimpulkan data sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Data-data yang sudah dideskripsikan disimpulkan secara umum. Simpulan tersebut meliputi unsur transitivitas, hubungann unsur dalam konteks sosial. Setelah disimpulkan, analisis data kembali pada tahap awal sampai semua data kompleks.⁷⁹

Gambar 5.1 Kompnen Analisis data : model interaktif



71

Memoirs Sourcebook (America: Arizona State University, 2014), 15.

⁷⁹ Ibid, 14.

H. Teknik keabsahan data

Pengecekan keabsahan data dilakukan agar memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan serta dapat dipercaya oleh semua pihak. Pengecekan keabsahan data yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu triangulasi sumber, metode dan triangulasi data.⁸⁰

Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Yang artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informan yang dieproleh dengan informasi yang sesuai dari sumber lain.

Triangulasi dengan sumber data, digunakan peneliti untuk meneliti tentang apa saja yang dilakukan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. kemudian peneliti triangulasi pada pejabat lain yang relevan termasuk Kepala Desa yang bersangkutan, setelah selesai peneliti mencari data keluarga penerima manfaat (KPM) didesa yang termaksud di kabupaten Bondowoso.

Triangulasi metode dilakukan untuk membandingkan hasil wawancara antara beberapa informan, kemudian peneliti juga membandingkan data hasil wawancara dengan hasil observasi. Selanjutnya membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi.

⁸⁰ Sugiono, *Metode penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 74.

Data dari ketiga sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikann, dikategorisasikan mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana yang spesifik dari tiga sumber data tersebut.

Dengan adanya keabsahan data ini, maka peneliti melakukan penyederhanaan dan serta diadakan perbaikan dari segi bahasa maupun sistematikanya agar dalam pelaporan hasil penelitian tidak diragukan lagi keabsahannya.

I. Tahapan-tahapan penelitian

Dalam penelitian ini, agar pelaksanaannya terarah dan sistematis maka disusun tahapan-tahapan penelitian. Menurut moleong langkah-langkah tahapan penelitian meliputi 3 hal yaitu :

1. Tahap-Tahap Pra Lapangan

a. Menyusun rencana penelitian

Pada tahap ini peneliti membuat racangan penelitian terlebih dahulu, diawali dengan pengajuan judul dan dilanjutkan dengan penyusunan proposal penelitian.

b. Memilih lapangan penelitian

Tahap selanjutnya yaitu memilih lapangan penelitian. Lapangan penelitian yang di pilih yaitu Desa Tlogosari dan Desa Sukowono kabupetn Bondowoso, dengan alasan bahwa desa tersebut yang menerima program Jatim Puspa di kabupaten Bondowoso. Sehingga sangat relevan nanti data yang diperoleh dengan maksud tesis ini.

c. Mengurus perizinan

Langkah selanjutnya yaitu mengurus perizinan dengan meminta surat pengantar dari akademik pascasarjana IAIN Jember merupakan surat pengantar untuk memohon izin penelitian kepada Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso untuk melakukan penelitian tersebut.

d. Memilih dan menentukan informan

Pada tahap ini peneliti mulai memilih informan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penelitian. Informan yang diambil dalam penelitian ini adalah kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kab. Bondowoso, kepala desa penerima Jatim Puspa dan Keluarga Penerima Manfaat Desa Sukowono dan Desa Kembang.

Menyiapkan perlengkapan penelitian dengan membuat instrumen pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian mengenai kecerdasan verbal-linguistik sebagai penerapan dua bahasa dalam pembelajaran dengan membuat instrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Tahap Pelaksana Lapangan

Setelah persiapan dianggap matang, maka tahap selanjutnya adalah melakukan penelitian. Dalam pelaksanaan tahap ini, peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan menggunakan beberapa teknik, antara lain teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Tahap analisis data

Setelah semua data selesai dianalisis, kemudian kegiatan penelitian dilanjutkan dengan penyusunan laporan penelitian. Laporan tersebut diserahkan kepada dosen pembimbing untuk direvisi. Kemudian dilanjutkan sampai penelitian ini benar-benar terselesaikan.⁸¹



⁸¹ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 113-115.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Bondowoso

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso menyebutkan bahwa tugas pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso adalah untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.⁸²

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi-fungsi :

⁸² Hairiah , Wawancara, 15 Februari 2021, Pukul 09.00 WIB

- a. Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan desa dan kelurahan;
- b. Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan sosial budaya masyarakat;
- c. Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- d. Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam;
- e. Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan teknologi tepat guna;
- f. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program di bidang pemberdayaan masyarakat;
- h. Pemberian fasilitasi dan penyusunan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- i. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha dinas;
- j. Penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso saat ini mempunyai susunan organisasi sebagai berikut

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Keuangan;
- d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. Bidang Pemberdayaan Desa;
- f. Seksi Kelembagaan dan Pemerintahan Desa;
- g. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa;
- h. Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa;
- i. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
- j. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
- k. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan Mandiri;
- l. Seksi Pengembangan Sumber Daya Masyarakat;
- m. Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Alam;
- n. Seksi Pelestarian Budaya dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat;
- o. Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan;
- p. Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

2. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penurunan Desa Tertinggal menjadi Indikator Kunci dalam pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kondisi yang diharapkan adalah tidak ada lagi desa tertinggal di Kabupaten

Bondowoso. Pengklasifikasian Desa Tertinggal diambil dari Indeks Desa Membangun (IDM), indeks ini merupakan komposit dari Indeks Sosial, Indeks Ekonomi dan Indeks Ekologi yang dikembangkan lebih lanjut dalam 22 variabel dan 52 indikator. IDM dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDT). Penghitungan ini mengklasifikasi Desa menjadi 5 (lima) kelompok yaitu :

- a. Desa Sangat Tertinggal
- b. Desa Tertinggal
- c. Desa Berkembang
- d. Desa Maju
- e. Desa Mandiri

Indikator-indikator lain capaian kinerja pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan selama periode tahun 2013-2017 dilaksanakan dengan beberapa kegiatan diantaranya : Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (BBGRM), Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa, Penunjang Kegiatan Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten dan Kecamatan, Lomba Desa, Revitalisasi Pokjanal Posyandu Kabupaten Bondowoso, Jalan Lain

Menuju Mandiri dan Sejahtera (JALINMATRA), Penunjang Kegiatan Tim Fasilitasi Dana Desa, Pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Penyelenggaraan Inventarisasi Aset Desa, Koordinasi dan Legislasi Raperda Desa, Pengembangan Kawasan Klaster Kopi Rakyat, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat, Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa, Administrasi Proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Lomba Karya Penanggulangan Kemiskinan (Pro Poor), Pelatihan KPMD/PNPM Mandiri Perdesaan, Pelatihan Peningkatan usaha kelompok perempuan perdesaan PNPM, Sosialisasi Penyediaan Makanan Tambahan Anak sekolah (PMT-AS), Pendukung Percepatan Perluasan Penurunan Kemiskinan Indonesia (MP3KI), Pelatihan Kelompok Peternak-Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Pelatihan kader pemberdayaan masyarakat, Penunjang penyediaan jaminan kesehatan perangkat desa, Sosialisasi Pembinaan Posyandu Bagi Pemerintah Desa, Sosialisasi Peraturan Tentang Desa, Bimtek Tim Fasilitasi Kecamatan dalam Pengelolaan Keuangan Desa, Penunjang Kegiatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa, Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pemerintahan Desa dan Penyelenggaraan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

b. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Upaya meningkatkan kemandirian pemerintah desa dilaksanakan melalui pengembangan lembaga ekonomi perdesaan, selama periode tahun 2013-2017 dilaksanakan dengan beberapa kegiatan diantaranya : Pengembangan Badan Usaha Milik Desa, Koordinasi dan Legislasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Kajian Identifikasi Topologi Kemiskinan dan Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Bondowoso, Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Pelatihan Keterampilan usaha pertanian dan peternakan, Pengelolaan Wilayah Terpadu Antar Desa (PWTAD), Peningkatan fungsi pasar desa, Pengembangan Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKU), Pengembangan Desa Mandiri Berbasis Kawasan Perdesaan (PDMBKP), Fasilitasi penguatan kelembagaan usaha kelompok masyarakat di wilayah industri hasil tembakau, Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam, Pendukung Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan, Pendukung Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat, Pendukung Model Pemberdayaan Cacat dan Lomba Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Pembinaan kelompok masyarakat membangun desa terus dilaksanakan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, upaya tersebut dilaksanakan dengan harapan akan meningkatkan nilai tambah bagi usaha ekonomi rakyat dan menciptakan lapangan kerja. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa selama periode tahun 2013-2017 dilaksanakan dengan beberapa kegiatan diantaranya Pembinaan Kelompok masyarakat Pembangunan Desa (TTG), Pemberian Stimulan Pembangunan Desa (TMMD), Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Bimbingan Teknis Kemandirian Kelompok Masyarakat Perdesaan, Penyelenggaraan Pundi Keluarga Miskin (Pundi Gakin), Penyelenggaraan Pundi Masyarakat Sejahtera (Pundi Mass), Pengembangan Labsite Implementasi serta Pendampingan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif dan Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan SDA dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan SDA dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan selama periode

tahun 2013-2017 dilaksanakan dengan beberapa kegiatan diantaranya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pedesaan, Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan SDA dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan, Pendukung Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan dan Pelestarian Sumber Mata Air (SMA), P3SDA Berbasis Sumber Daya Air, P3SDA Berbasis Desa, P3SDA Berbasis Kawasan Perdesaan.

e. Program Peningkatan dan Pengembangan SDM dan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Program Peningkatan dan Pengembangan SDM dan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa selama periode tahun 2013-2017 dilaksanakan dengan beberapa kegiatan diantaranya Pembinaan PKK, Gelar Inovasi TTG, Pelatihan Keterampilan dan Kemandirian Masyarakat Desa, Pelatihan Kewirausahaan dan Kemandirian Bagi Pemula dan Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif.

f. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan selama periode tahun 2013-2017 dilaksanakan dengan beberapa kegiatan diantaranya Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif dan Pembinaan PKK.

3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan BUMDesa menuntut kualitas SDM pengurus yang baik.
- b. Pengembangan produk lokal desa harus disertai dengan pengetahuan tentang manajemen usaha dan pemasaran hasil produk.
- c. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan sarana dan prasarana desa.
- d. Mindset masyarakat bahwa pembangunan hanya bersifat fisik saja padahal pembangunan SDM juga sangat diperlukan terutama pengembangan aparatur pemerintah desa agar tercipta pelayanan yang baik kepada masyarakat.
- e. Dengan anggaran Dana Desa yang sangat besar diperlukan kualitas perencanaan yang baik agar penggunaan Dana Desa dapat tepat sasaran.
- f. Masyarakat masih mengandalkan teknologi pabrian dalam meningkatkan produksi pertanian.

Peluang yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso dalam pengembangan pelayanan untuk mewujudkan pembangunan pemberdayaan masyarakat yaitu:

- a. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk meningkatkan keberdayaan ekonomi di desa.
- b. Pengembangan produk lokal desa dan revitalisasi pasar desa untuk menggerakkan ekonomi desa.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana desa.
- d. Pengembangan sumber daya aparatur pemerintah desa.
- e. Peningkatan kualitas perencanaan desa.
- f. Meningkatkan pemanfaatan dan inovasi teknologi tepat guna dalam meningkatkan produksi pertanian.

4. Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso

Adapun tujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso adalah: “**Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa**” dengan indikator tujuan yaitu Jumlah Desa Tertinggal dan Jumlah Desa Mandiri. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) desa diklasifikasi dalam lima status yaitu Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri.

Sasaran perangkat daerah merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik instansi pemerintah, atau merupakan penjabaran dari tujuan secara nyata oleh instansi–instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan. Fokus utama dalam penentuan sasaran ini adalah tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan perangkat

daerah. Sasaran dan perencanaan strategik ini ditentukan dengan penentuan indikator sasaran dan target sasaran tahunan

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam perencanaan strategik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso periode 2018-2023 adalah:

- a. Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa. Indikator sasaran ini adalah Persentase masyarakat yang memiliki usaha. Indikator ini diperoleh dari persentase jumlah masyarakat yang memiliki usaha dibagi jumlah masyarakat target pemberdayaan.
- b. Meningkatnya Kapasitas Desa dan Lembaga Desa Indikator sasaran ini adalah Persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan desa. Indikator ini diperoleh dari persentase jumlah desa yang tertib administrasi pemerintahan desa dibagi jumlah desa.

5. Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso

Adapun strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pembinaan kesejahteraan keluarga.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengelolaan SDA yang

berwawasan lingkungan serta pelestarian nilai-nilai adat dan sosial budaya lokal.

- c. Meningkatkan peran desa dan lembaga desa dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Profil Desa Kembang Dan Desa Sukowono Kabupaten Bondowoso

1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Pemerintah Desa Kembang dipimpin oleh Kepala Desa terpilih yang dilantik oleh Bupati Bondowoso. Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut :

- a. SOER (Tahun 1950 s.d 1967);
- b. SUMARDI (Tahun 1967 s.d 1974);
- c. ROMIDI (Tahun 1974 s.d 1983);
- d. TOTOK MATHARI (Tahun 1984 s.d 2002);
- e. KURSIYANTO (Tahun 2007 s.d 2013);
- f. BUZAIRI (Tahun 2015 s.d 2021);

Pada saat ini Desa Kembang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Desa, 1 (satu) orang Sekretaris Desa, 6 (enam) orang Pelaksana Teknis dan 8 (delapan) orang Kepala Dusun

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kembang



Secara umum pelayanan pemerintah Desa Kembang kepada masyarakat cukup memuaskan. Dalam beberapa sesi wawancara langsung dengan masyarakat Desa Kembang yang dipilih secara acak, terungkap bahwa dalam memberikan pelayanan pengurusan administrasi kependudukan, pertanahan dan lain-lain dikerjakan dengan cepat dan dilayani selama 24 jam, baik pelayanan pada jam kerja di kantor maupun di luar jam kerja di rumah Kepala Desa, Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya.

2. Kondisi dan Sumber Daya Desa

1.1 Sejarah Desa Kembang

Tentang asal usul Desa Kembang sampai saat ini belum mendapat gambaran yang jelas. hal ini karena keterbatasan dan ketidakmampuan dari para Tokoh masyarakat yang ada sekarang untuk memperoleh informasi mengenai sejarah asal mula Desa Kembang. Disamping juga tidak adanya dokumen atau buku yang mampu memberikan gambaran yang pasti tentang sejarah Desa Kembang. Menurut cerita bahwa asal mula mengapa Desa ini dinamai Desa Kembang adalah dahulu kala daerah ini merupakan daerah yang sangat subur sehingga disana sini banyak terdapat tanaman bunga yang beraneka macam, cerita tersebut diperkuat dengan cerita sesepuh desa dimana sewaktu jaman penjajahan jepang bahwa ada sebuah taman yang cukup luas yaitu taman bunga dan taman tersebut dijaga oleh **P. MUKTI**. Karena masyarakat Desa Kembang yang asli penduduknya berbahasa Madura maka taman bunga yang dahulunya ada disebut **TAMAN KEMBANG** sehingga akhirnya Desa ini dinamai **Desa Kembang**.

2.1 Demografi

Desa Kembang dengan luas wilayah 3.565 Ha merupakan salah satu desa di Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.

Batas wilayah Desa Kembang:

- Sebelah utara : Desa Trotosari (kec.Tlogosari)
- Sebelah selatan : Desa Brambang Ds. (kec.Tlogosari)

- Sebelah Timur : Desa Gunosari (kec.Tlogosari)
 - Sebelah Barat : Desa Tlogosari (Kec.Tlogosari)
- a. Topografi dengan bentang wilayah berombak sampai berbukit.
- b. Curah hujan : mm
- c. Jumlah bulan hujan : 4-6 bulan
- d. Suhu rata-rata harian : 20 - 30 °C
- e. Tinggi tempat : 1200 m dpl.
- f. Luas wilayah Desa Kembang 3.565 ha. terdiri dari:
- ✓ Tanah sawah : 418 ha
 - ✓ Tanah Kering (tegal) : 490 ha
 - ✓ Permukiman : 42 ha
 - ✓ Tanah Hutan lindung : -
 - ✓ Tanah hutan Produksi : -
 - ✓ Tanah Hutan Konversi : -
 - ✓ Tanah lainnya : 2.615 ha⁸³

3.1 Profil Desa Sukowono

a. Luas Wilayah

Wilayah Desa Sukowono seluas 550,5 Ha, terdiri dari : Sawah seluas 272,5 Ha, Tegal 226,5 Ha, Pemukiman 27 Ha, Jalan 13 Ha dan dibagi menjadi 8 (delapan) Wilayah dan 20 (dua puluh) RT. Setiap Wilayah dipimpin oleh Kepala Kewilayahan delegasi dari Kepala Desa di Wilayah Tersebut, pusat Desa Sukowono terletak di Wilayah Sbr Makmur. Pembagian wilayah Desa Sukowono tersaji dalam tabel berikut.⁸⁴

⁸³ Dokumen, Profil Desa Kembang diambil pada tanggal 09 Juni 2021.

⁸⁴ Dokumen, Profil Desa Sukowono diambil pada tanggal 09 Juni 2021

b. Jumlah Wilayah (Dusun)

No	Pembagian Wilayah (Dusun)	Jumlah
	Jumlah Wilayah (Dusun)	8
1.	Wilayah (Dusun) Krajan	
2.	Wilayah (Dusun) Karang Faesel Barat	
3.	Wilayah (Dusun) Karang Faesel Timur	
4.	Wilayah (Dusun) Gardu	
5.	Wilayah (Dusun) Sungai Leduk Selatan	
6.	Wilayah (Dusun) Sungai Leduk Utara	
7.	Wilayah (Dusun) Cagak	
8.	Wilayah (Dusun) Paolaseng	

c. Jumlah Rukun Warga (RW)

- Jumlah RW Desa Sukowono= 20 RW

d. Jumlah Rukun Tetangga (RT)

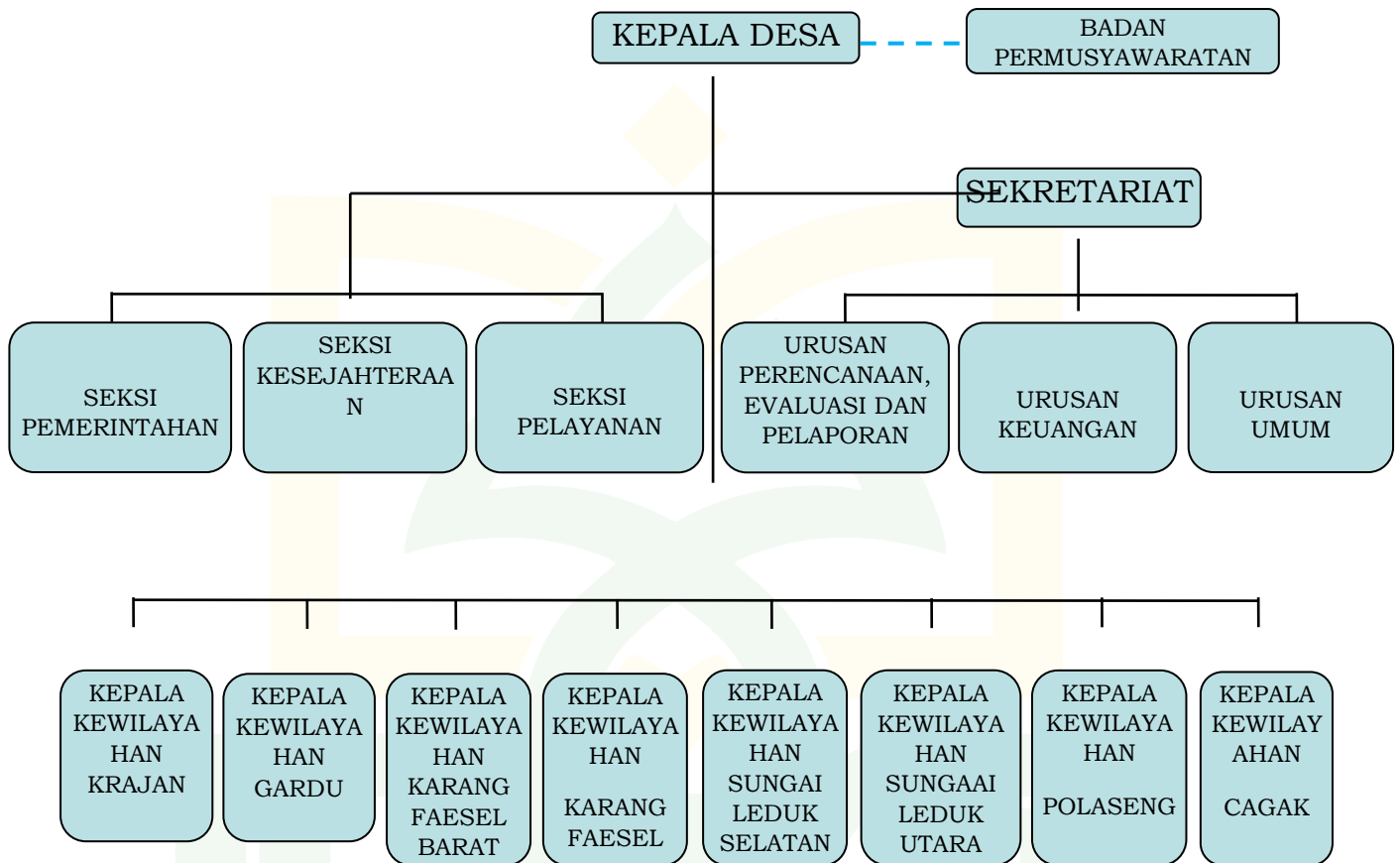
- Jumlah RT Desa Sukowono = 20 RT

2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yaitu Sekretaris Desa, Bidang Urusan, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Kepala Desa | : 1 orang |
| 2. Sekretaris Desa | : 1 orang |
| 3. Bidang Urusan | : 3 orang |
| 4. Pelaksana Teknis | : 3 orang |
| 5. Pelaksana Kewilayahan | : 8 orang |

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA SUKOWONO KECAMATAN PUJER**



Sumber : Profil Desa Sukowon

VISI

“Terwujudnya Masyarakat Sukowono Sejahtera, Beriman Dan Bermartabat”

Misi

MISI DESA SUKOWONO

1.	Mewujudkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan perekonomian rakyat.
2.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, lingkungan hidup, dan sarana umum.
3.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang amanah dan berakhlak mulia melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
5.	Meningkatkan Kegiatan Keagamaan Masyarakat Desa

B. Paparan Data dan Analisis

1. Strategi perencanaan pembangunan ekonomi melalui Jatim Puspa

Program Jatim Puspa ini bagian dari program pemberdayaan yang tentu memiliki beberapa strategi yang digunakan untuk memberikan dana insentif kepada masyarakat di tengah Covid-19. Program Jatim Puspa di maksudkan sebagai program yang dirancang khusus untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan program penanggulangan kemiskinan perdesaan melalui fasilitas bantuan dan pendampingan bagi keluarga penerima manfaat (KPM). Program Jatim Puspa ini adalah salah satu ikhtiyar pemerintah provinsi jawa timur dalam penanganan dampak Covid-19 untuk meningkatkan pendapatan masyarakat terdampak sehingga dapat pulih dan meningkatkan ketahanan sosial dan ekonominya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Bondowoso⁸⁵, beliau menyatakan bahwa;

Inisiatif dari Gubernur Jawa timur untuk mengadakan Jatim Puspa ditengah pademi ini sangat pas sekali menurut saya. Dengan strategi dan cara-cara yang sistematis dan baik. Sepengetahuan dan sampai saat ini kami lakukan terkait strategi yang dilakukan dalam program Jatim Puspa ini yang pertama memberikan stimulus modal usaha ekonomi produktif, pendampingan usaha KPM oleh pendamping desa, pelatihan peningkatan kapasitas usaha KPM. Kekuatan program ini sebenarnya sangat bagus di wilayah sistem menajerial, jadi tidak ujuk-ujuk memberikan bantuan, itu semua orang, instansi bisa memberikan. Hanya saja pembedaanya adalah kita dapat memberikan motivasi, mengarahkan, sekaligus mendampingi penerima hingga mampu menaikkan skala ekonominya lebih baik.

Di ruang yang berbeda Ibu Hera selaku ketua Pemberdayaan Pengembangan Ekonomi Desa turut menambahkan,

Pendayaagunaan Jatim Puspa ini dapat memberikan gerakan alternatif pada masyarakat tentu dengan di dukung oleh strategi yang di miliki oleh program ini, strategi yang di gunakan yakni memfasilitasi pemasaran produk KPM agar segmentasi pasar benar-benar dapat diwujudkan di sektor UMKM, sehingga dapat menciptakan jaringan usaha KPM yang itu dapat memberikan akses terbukanya penjual dan pembeli. Selain itu program pemberdayaan usaha perempuan ini melibatkan dunia usaha melalui CSR untuk ikut serta memberdayakan KPM dan juga memberikan fasilitas pinjaman murah dan mudah untuk pengembangan usaha KPM melalui Program Bibit Jamur BANK. Dengan begini penerima manfaat terbuka lebar untuk terus melanjutkan usahanya pada ruang akses yang lebih luas. Kreatifitas serta inovasi selama kurang lebih pendampingan dilakukan agar KPM selalu menggerakkan usahanya kemedan yang baik dalam meningkatkan pundi-pundi ekonominya. Serta pantauan dari kami pemerintah kabupaten tidak pernah berhenti, kami akan pantau secara berlanjut dan berkala.⁸⁶

Hal ini sesuai dengan yang termaktub dalam Pedum Jatim Puspa tahun 2020 bahwa strategi yang dilakukan dalam Program Jatim Puspa adalah sebagai berikut :

⁸⁵ Hairiyah Yulianti, wawancara, pada 13 Februari 2021

⁸⁶ Hera, wawancara, 13 Februari 2021

1. Stimulus Modal Usaha Ekonomi Produktif;

Maksud dari stimulus usaha ekonomi kreatif ini para penerima bantuan Jatim Puspa diberikan modal usaha yang berupa barang yang menjadi bahan usaha, yang disitu sangat diharapkan modal usaha tersebut dapat membantu melancarkan usaha yang dimiliki oleh penerima bantuan.

Berikut penjelasan dari salah satu anggota bidang pemberdayaan masyarakat desa Ibu Sulastri terkait bantuan usaha modal yang diterima keluarga penerima manfaat.

Iya, dalam program kami yang ini tidak memberikan modal berupa uang, melainkan kami memberi barang atau bahan yang bisa dijual kembali oleh penerima bantuan. Misalnya, terdapat penerima bantuan yang sebelumnya memiliki usaha produktif berupa jual bakso keliling. Nah, program kami itu memberinya bantuan berupa bahan-bahan untuk penerima bantuan menjual lagi baksonya itu seperti tepung, minyak, daging atau bahkan gerobak, yang intinya jumlah bantuan jika dinominalkan tiap keluarga penerima bantuan berjumlah Rp 2.500.000,-⁸⁷. Ada juga yang menerima bantuan berupa berbagai jenis sayuran, karena memang penerima bantuan tersebut sebelumnya berjualan sayuran keliling. Bantuan kami sesuaikan dengan kebutuhan penerima, yang sebelumnya kami bertanya terlebih dahulu kepada penerima bantuan terkait apasaja yang diperlukan untuk melanjutkan usaha ekonomi produktifnya tersebut.

2. Pendampingan Usaha KPM oleh Pendamping Desa

Penerima bantuan tidak hanya pada proses menerima bantuan saja, melainkan panitia pelaksana program Jatim puspa melakukan pendampingan hingga para penerima bantuan kembali bangkit perekonomiannya akibat pandemi ini. Pendampingan ini berupa

⁸⁷ Sri Purwanti, wawancara, 21 Februari 2021

evaluasi dan monitoring langsung terkait peluang dan kendala yang dihadapi para penerima bantuan dalam mengembangkan usahanya.

Hal ini sesuai dengan penjelasan salah satu keluarga penerima manfaat bahwa⁸⁸

Bantuan reah begus cong, engkok merasa ebantu sarah. Engkok reah polanah bede corona tang degengan tak pajuh. Tapi, perena bantuan riah, engkok didampingi caranah degengan reah laku. Ya, meski tak se banyak sebelum covid, tapi membantu untuk keluarga engkok. Bede kompolan ben bulan.

Bantuan sosial ini bagus, saya merasa terbantu. Karena semenjak ada Covid-19 ini jual saya tidak laku. Tapi, semenjak ada bantuan ini saya didampingi caramya jualansaya laku. Ya, meskipun tidak sebanyak omsetnya saat sebelum pandemi, namun sangat membantu. Dampingannya berupa terdapat rapat tiap satu bulan.

3. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Usaha KPM

Tidak cukup pada pendampingan saja, para penyelenggara Jatim Puspa juga mengadakan pelatihan untu para penerima bantuan guna meningkatkan kapasitas usahanya. Seperti yang di sampaikan oleh salah satu KPM.⁸⁹

Saya berjualan bakso, dari sini awalnya saya hanya belajar otodidak, ilmu yang saya dapat turun temurun dari orang tua saya. Nha, dengan adanya program jatim puspa ini, pendamping desa menghadirkan ahli masak yang mengajarkan saya dan teman-teman untuk jualan saya lebih menarik dan enak. Sehingga saya dapat ilmu baru dari adanya pelatihan itu

⁸⁸ Ayu farhana, wawancara, pada 20 Februari 2021

⁸⁹ Siti Masruroh, wawancara, pada 24 Februari 2021

4. Fasilitasi Pemasaran Produk KPM

Strategi yang ketiga ini diberikan untuk menunjang agar usaha para penerima bantuan terjual dan laku. Karena adanya pandemi ini, usaha para masyarakat rata-rata mengalami penurunan. Karena para konsumen mengalami masa transisi perubahan akibat pandemi Covid-19.

Iya mas, saya ini sebelum ada program ini hanya berjualan keliling sini saja, namun semenjak dikenalkan dengan program bantuan ini penjualan saya dibantu. Alhamdulillah.⁹⁰

5. Menciptakan Jaringan Usaha KPM

Selain memberi fasilitas pemasaran produk, para pelaksana program Jatim Puspa ini juga menciptakan jaringan usaha untuk para penerima bantuan. Sehingga antar strategi yang menjadi acuan terlaksananya program ini berkesinambungan.

6. Melibatkan Dunia Usaha melalui CSR untuk ikut serta memberdayakan KPM

Program kerja Jatim Puspa ini tidak bekerja sendirian, melainkan memanfaatkan peluang dari instansi lain, hal ini dengan melibatkan dunia usaha melalui CSR demi untuk memberdayakan para keluarga penerima manfaat.

7. Fasilitasi Pinjaman Murah dan Mudah Untuk Pengembangan Usaha KPM melalui Program Bibit Jamur Bank.

⁹⁰ Masalah, wawancara, 25 Februari 2021

Selanjutnya adalah pinjaman uang kepada para keluarga penerima manfaat. Hal ini ditujukan apabila stimulus modal dirasa kurang memenuhi, jadi para keluarga penerima manfaat difasilitasi oleh program Jatim Puspa dengan pinjaman murah dan mudah. Pinjaman ini diberikan untuk memantik semangat para KPM agar tetap bisa melanjutkan usahanya.

Dari hasil wawancara tersebut bahwa strategi program Jatim Puspa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat desa telah sistematis dan tersusun. Dengan melibatkan beberapa instansi lain diharapkan cepat terwujudnya program ini untuk membangun ekonomi masyarakat.

2. Implementasi Program Jatim Puspa terhadap Keluarga Penerima

Manfaat

Program Jatim Puspa pada hakikatnya merupakan implementasi terhadap kewajiban Negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar warga miskin agar mereka dapat bertahan hidup, kemudian secara bertahap berdaya keluar dari kemiskinan. Karena itu program dilaksanakan berlandaskan prinsip dasar “membantu dengan hati” yang mengedepankan empati sosial. Program ini tidak hanya bertujuan mengembangkan potensi ekonomi rumah tangga sangat miskin, tetapi juga harkat dan martabat, motivasi, rasa percaya diri dan harga diri mereka, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat (memanusiakan manusia) antara lain dengan tetap memberikan penghormatan pada KPM

untuk memberikan keputusan terhadap jenis usulan kebutuhan anggota rumah tangga.

Kegiatan Program Jatim Puspa dilaksanakan dengan membuka ruang publik, partisipasi aktif pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan, serta masyarakat dalam pengambilan keputusan dengan menekankan pada musyawarah dan mufakat melalui panggilan masalah lewat dialog dan tukar pengalaman di antara warga. Rembuk warga menjadi wahana artikulasi partisipasi warga untuk mengkaji tentang kelayakan dan pemetaan kebutuhan KPM sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi aktual.

Pelaksanaan Program Jatim Puspa secara terbuka dan di pertanggung jawabkan kepada masyarakat setempat maupun publik yang berkepentingan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku dan juga melibatkan berbagai unsur sesuai kompetensi yang dimiliki, yakni satuan kerja perangkat daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tenanga pendamping, dunia usaha dan masyarakat yang bekerja secara sinergis dan terpadu.

Berdasarkan informasi yang didapat peneliti dari seksi Pemberdayaan dan ekonomi Masyarakat DPMD Kabupaten Bondowoso,⁹¹ implementasi dari program Jatim Puspa terhadap masyarakat beliau menyatakan bahwa ;

⁹¹ Sulastri, wawancara, 15 Februari 2021

Secara teknis kegiatan Program Jatim Puspa ini di jalankan melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yakni pengorganisasian dan penganggaran. Tahapan yang kedua yakni tahap persiapan meliputi Sosialisasi Provinsi, sosialisasi kabupaten, musyawarah desa sosialisasi. Tahapan yang ketiga adalah pelaksanaan kegiatan meliputi permohonan pencairan dana BKK desa, klarifikasi data, identifikasi kebutuhan dan potensi KPM serta pembentukan kelompok, musyawarah persiapan pengadaan dan penyerahan bantuan, pencairan dana BKK desa, pengadaan barang, penyerahan bantuan barang kepada KPM dan bimbingan teknis. Tahapan keempat monitoring dan evaluasi. Tahapan kelima pertanggung jawaban, pelestarian dan keberlanjutan dan tahapan terakhir yakni penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Selain itu koordinator kabupaten program Jatim Puspa ini menjelaskan terkait implementasi bahwa :⁹²

Penerima keluarga manfaat khusus wilayah kabupaten Bondowoso ini dipilih berdasarkan kriteria warga Bondowoso yang menerima bantuan sosial PKH, memiliki usaha dan memiliki anak sekolah. Yang pasti disini ada ketentuan yang memiliki usaha karena implementasi teknisnya program Jatim Puspa ini untuk mengembangkan usaha masyarakat yang terdampak pandemi khususnya para keluarga penerima harapan. Dengan beberapa strategi diantaranya memberikan modal yang berupa barang untuk melanjutkan penjualannya dengan budget maksimal Rp. 2.500.000 per keluarga penerima manfaat. Dengan begini harapan kami para penerima bantuan mau berusaha dan melanjutkan usahanya untuk keberlangsungan pembangunan ekonomi jangka panjang.

Implementasi program Jatim Puspa dapat dilihat secara rinci pada

Pedoman Umum Jatim Puspa sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

a) Sosialisasi

Sosialisasi Program JATIM PUSPA dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi pelaksanaan program untuk

⁹² Koordinator Jatim Puspa, wawancara, 16 Februari 2021

diketahui masyarakat lokasi program, agar mendapat dukungan dalam proses pelaksanaannya. Kegiatan sosialisasi sekaligus merupakan bagian dari transparansi informasi. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten dan Desa.

b) Orientasi dan Bimbingan Teknis

Orientasi dan Bimbingan Teknis bagi Pengelola di tingkat Kabupaten dan Pengelola di tingkat Desa bertujuan untuk membimbing langkah-langkah teknis pelaksanaan kegiatan Program Jatim Puspa

2. Tahap Pelaksanaan

- a) Verifikasi Data KPM.
- b) Klarifikasi Data, Identifikasi Kebutuhan dan Potensi KPM.
- c) Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus.

(1) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Dokumen pencairan dana BKK kepada Pemerintah Kabupaten dibuat rangkap 2 (dua), disampaikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur melalui Dinas PMD Provinsi Jawa Timur berupa :

- (a) Surat Pengajuan dari Bupati;
- (b) Kwitansi bermaterai sesuai dengan jumlah BKK;
- (c) Foto copy rekening Kas Daerah; dan

(d) Foto copy DPA kegiatan pada DPMD Kabupaten.

(2) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa

(a) Dokumen pencairan dana BKK kepada Pemerintah

Desa dibuat rangkap 4 (empat), disampaikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur melalui Dinas PMD Provinsi Jawa Timur berupa :

[1] Surat permohonan pencairan dari kepala desa, sesuai BK-Desa yang telah ditetapkan; [2] Rencana Anggaran & Biaya (RAB); [3] Jadwal Pelaksanaan Kegiatan; [4] Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Koordinasi Desa dan Pendamping Desa; [5] Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Program JATIM PUSPA; [6] Kwitansi ber meterai Rp. 6000; [7] Fotocopy rekening Kas Desa (dilegalisir) di bank jatim atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten dan surat pernyataan kepala desa tentang Rekening Kas Desa; [8] Fotocopy KTP kepala desa dan bendahara desa dilegalisir sesuai ketentuan yang berlaku; [9] Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (Pakta Integritas) dari Kepala Desa dan Ketua Tim Koordinasi Desa bermeterai Rp.6.000; dan [10] Fotocopy APBDesa sebagai bukti bahwa BK-Desa telah masuk kedalam dokumen penganggaran desa.

(b) Tim Koordinasi Kabupaten dan Pendamping Kabupaten melakukan verifikasi administrasi berkas dokumen pencairan, ditindaklanjuti dengan membuat surat pengantar pengajuan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten.

(c) Dokumen pencairan selanjutnya diverifikasi oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diterbitkan Surat Permohonan Pencairan (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).

(d) Dana BKK di transfer langsung kepada rekening Pemerintah Desa melalui Bank Jatim.

d) Rembug Persiapan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan.

e) Pengadaan Barang.

f) Penyerahan Bantuan Barang Kepada KPM.

g) Pemberdayaan KPM.

h) Pertanggungjawaban.

Pertanggungjawaban pelaksanaan Program Jatim Puspa dilaksanakan dalam bentuk :

(1) Pertanggungjawaban administrasi

Penerima BKK bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterimanya, pertanggungjawaban ini terdiri dari :

(a) BKK Kabupaten. [1] Surat pengantar kepada Gubernur Jawa Timur; [2] Laporan realisasi penggunaan BKK; dan [3] Laporan fasilitasi kegiatan Program Jatim Puspa tingkat Kabupaten.

(b) BKK Desa.

1) Pertanggungjawaban yang dikirim kepada Gubernur : [a] Surat pengantar kepada Gubernur Jawa Timur; [b] Surat pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (Pakta Integritas) yang menyatakan bahwa BKK yang diterima telah digunakan sesuai Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional; [c] Laporan realisasi penggunaan BKK; [d] Salinan Berita Acara Serah Terima bantuan barang dari Pemerintah Desa ke KPM; dan [e] Dokumentasi foto tahapan pelaksanaan kegiatan.

Pertanggung jawaban ini disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas PMD Provinsi Jawa Timur, paling lambat 1 (satu) bulan setelah realisasi kegiatan, dan selambat lambatnya akhir bulan Desember tahun berjalan.

Bagi Desa yang dananya ditransfer ke rekening Kas Desa pada bulan Desember maka laporan pertanggung jawaban disampaikan selambat lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

2) Pertanggung jawaban yang disimpan di desa : [a] Surat pernyataan Pertanggung jawaban Mutlak (Pakta Integritas) yang menyatakan bahwa BKK Desa yang diterima telah digunakan sesuai Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional; [b] Laporan realisasi penggunaan BKK Desa; [c] Berita Acara Serah Terima bantuan barang dari Pemerintah Desa ke KPM; [d] Dokumentasi foto pelaksanaan tahapan kegiatan; [e] Laporan pelaksanaan kegiatan; dan [f] Bukti-bukti pengeluaran asli yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan (Nota, Kwitansi dan lain-lain) Pertanggung jawaban ini merupakan obyek pemeriksaan.

(2) Pertanggung jawaban Publik

Pertanggung jawaban Publik dilakukan melalui forum Rembug Warga Pertanggung jawaban.

i) Pelestarian Program

- 1) Pelestarian Program Jatim Puspa dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa dalam bentuk bimbingan teknis atau pendampingan terhadap KPM secara berkelanjutan;
- 2) Pemerintah Kabupaten diharapkan mengembangkan prakarsa kreatif guna menindaklanjuti pelestarian dan pengembangan Program Jatim Puspa di tingkat Kabupaten;

3) Pelestarian Program Jatim Puspa dapat dilaksanakan melalui: a) Fasilitasi penguatan modal sosial Pokmas KPM melalui penguatan kelompok yang ditumbuhkan dari kesadaran partisipatoris; b) Fasilitasi pengembangan usaha produktif Pokmas KPM; dan c) Pengembangan jejaring usaha, baik di sektor hulu, hilir, maupun fasilitasi permodalan, dan pengembangan kapasitas SDM KPM.

3. Kontrol Pemerintah Desa terhadap Keluarga Penerima Manfaat

Sistem pengelolaan program Jatim Puspa di tingkat desa ini berpedoman pada peraturan Gubernur Jawa Timur dan Petunjuk Operasional Pelaksanaan BKK desa Program Jatim Puspa. Segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan dari tingkat provinsi sampai akar rumput di desa ini sudah di atur. Dalam pengelolaan tingkat desa ini terdapat tim koordinasi desa yang terdiri dari (Kepala desa, kasi atau kaur, sekertaris desa, bendahara desa, anggota dari unsur PKK/LMD/TPK) dan juga di bantu oleh pendamping desa,.

Dari kedua struktur tersebut mempunyai fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Semisal tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Desa meliputi, Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi melalui rembuk warga, melaksanakan verifikasi, identifikasi kebutuhan dan potensi KPM bersama pendamping desa dan pendamping kabupaten, memfasilitasi pengadaan dan penyaluran bantuan barang kepada KPM, sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan dalam pedoman umum dan petunjuk teknis operasional.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh kepala desa Kembang Bapak Buzairi menyatakan bahwa⁹³:

Kami dari perangkat desa selalu membangun komunikasi dan silaturahmi yang baik dengan keluarga penerima manfaat guna mengetahui sejauh mana perkembangan dan kemajuan dari setiap usahanya. Memastikan bantuan yang diterima penerima dapat dimanfaatkan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan. Kami juga melakukan kegiatan pertemuan kelompok secara berkala, pembinaan berupa bimbingan teknis guna peningkatan sumber daya manusia, serta melewati forum tersebut kita senantiasa memberikan motivasi, dorongan serta menerima bertukar pendapat mengenai Kendal-kendala yang dihadapi, bersyukur sejauh ini barang yang diberikan dari program ini dapat memberikan peningkatan ekonomi yang lebih baik, wabil khusus bisa mengurangi angka kemiskinan pada desa kami.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Desa Sukowono bapak Fathorrahman.⁹⁴

Perangkat desa beserta tim koordinasi desa selalu mendampingi sedari awal kepada keluarga penerima manfaat, ini sebagai bentuk ikhtiyar kami dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat sekitar. Selain itu kami juga mengajari dengan detail membuat produk kemasan yang baik dengan tujuan agar konsumen tidak lari atau pindah ke tempat lain.

Dalam Pedum Jatim Puspa tahun 2020 tertulis bahwa Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Desa meliputi :

- 1) Menetapkan keanggotaan Tim Koordinasi Desa dan Pendamping Desa melalui Keputusan Kepala Desa;

⁹³ Buzairi, wawancara, 15 Februari 2021

⁹⁴ Fathorrahman, wawancara, 15 Februari 2021

- 2) Menetapkan KPM sasaran hasil verifikasi dan klarifikasi, rekapitulasi hasil identifikasi kebutuhan dan potensi KPM serta daftar Pokmas KPM penerima bantuan;
- 3) Mengajukan permohonan pencairan BKK Desa Program Jatim Puspa kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur dan Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur;
- 4) Berkomitmen memasukkan dana BKK Desa Program Jatim Puspa dalam APBDes;
- 5) Melaksanakan BKK Desa Program Jatim Puspa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan sebaik-baiknya dan tidak melibatkan pemberi BKK Desa ke dalam permasalahan hukum sebagai akibat kelalaian dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penerima BKK Desa;
- 6) Menjadi obyek pemeriksaan terkait pemanfaatan BKK Desa Program Jatim Puspa.
- 7) Mengembalikan dana BKK Desa ke Kas Daerah Provinsi Jawa Timur, apabila terdapat temuan sebagai hasil pemeriksaan sebesar dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan;
- 8) Mempelajari Peraturan Gubernur Jawa Timur dan Petunjuk Operasional pelaksanaan BKK Desa Program Jatim Puspa;
- 9) Melakukan pembinaan dan pengawasan pengadaan barang dan jasa;
- 10) Menerima penyerahan hasil pengadaan barang/jasa dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan;

- 11) Menyalurkan bantuan kepada KPM sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis operasional;
- 12) Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi BKK Desa kepada Gubernur Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;
- 13) Melakukan bimbingan teknis dan pendampingan kepada Pokmas KPM pasca program; dan
- 14) Menangani pengaduan masalah dalam kegiatan Program Jatim Puspa;

4. Dampak dari strategi pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam program Jatim Puspa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Bondowoso era pandemi Covid-19

Program Jatim Puspa ini mempunyai sistem yang di sebut dengan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan guna memantau perkembangan pelaksanaan Program Jatim Puspa, melakukan penilaian, mendokumentasikan berbagai kegiatan sekaligus menyusun tindakan perbaikan sebagai bentuk evaluasi program. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan desa. Monitoring dan evaluasi di tataran pengelolaan desa dilakukan oleh tim koordinasi desa, pendamping desa, dan di arahkan oleh

pendamping kabupaten. Yang mana mereka mempunyai tugas dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan informasi yang didapat oleh peneliti dari salah satu pendamping desa, beliau menyatakan bahwa :⁹⁵

Pendamping desa melakukan pengukuran peningkatan pendapatan KPM dampungannya dengan menggunakan form evaluasi dampak atau kuesioner, hasilnya di serahkan kepada tim koordinator desa. Selanjutnya tim koordinasi desa mengumpulkan hardcopy form evaluasi dampak dan merekap hasil pengukuran peningkatan pendapatan dalam format softcopynya. Kemudian pendamping kabupaten melakukan pendataan yang sistemik untuk mengetahui kemajuan dan peningkatan pendapatan keluarga penerima manfaat setelah mendapatkan bantuan.

Jadi dengan begitu kita dapat dengan mudah mengetahui perkembangan ekonomi keluarga penerima manfaat dari peningkatan asset usha atau pendapatan keluarga penerima manfaat setelah mendapatkan bantuan di bandingkan dengan saat sebelum mendapatkan bantuan.

Selain peneliti juga mendapat informasi dari ibu siti masruroh selaku salah satu keluarga penerima manfaat beliau menyatakan terkait dampak dari bantuan Jatim puspa ini bahwa ⁹⁶

Saya bahagia sekali adanya program Jatim Puspa ini, sangat membantu perekonomian keluarga saya. Saya jualan bakso rombongan gitu, saya memiliki tanggungan dua anak sekolah, anak pertama saya kelas 2 SMP, anak keduanya anak saya kelas 5 SD, sama-sama butuh biaya untuk sekolah. Iya memang saat pandemi ini sekolah libur, tapi ya tetap masuk walaupun hanya dikasih tugas dari guru nya. Makanya saya khawatir maka saya belikan anak-anak buku. Dulu sebelum dapat bantuan Jatim Puspa pendapatan saya saat pandemi turun drastis, sebelum pandemi saya bisa untung tiap harinya dengan 75 sampai 100 ribu, dan saat pandemi hanya sekitar 25 sampai 50 ribu. Untuk seluruh kebutuhan keluarga saya kurang, karena beras dan kebutuhan pokok kami beli. Setelah ada Jatim Puspa ini, alhamdulillah penghasilan kami berangsur membaik. Ya memang kami diajari bagaimana membangun

⁹⁵ Pendamping desa, wawancara. 18 Februari 2021

⁹⁶ Siti masruroh, wawancara, 20 februari 2021

jaringan, diajari pemasaran, dan dikasih bantuan modal. Pokoknya sangat membantu program ini untuk keberlangsungan perekonomian keluarga saya.

Dampak yang diharapkan oleh pemerintah untuk pembangunan ekonomi berdasarkan hasil wawancara tersebut mengarah kepada hal yang positif, artinya masyarakat para penerima bantuan Jatim Puspa merasa terbantu usahanya karena program ini.

C. Temuan Penelitian

1. Strategi Pembangunan Ekonomi Jatim Puspa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bondowoso

Beberapa perencanaan atau yang disebut strategi disini telah dilakukan oleh pihak penyelenggara program dalam hal ini pemerintah provinsi, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah kota serta desa setempat. Dari sini terdapat beberapa strategi guna meningkatkan ekonomi masyarakat kabupaten Bondowoso melalui program Jatim Puspa yakni bagi keluarga penerima manfaat.

Strategi tersebut meliputi a) Pemberian stimulus modal usaha produktif, yakni para keluarga penerima manfaat secara cuma-cuma menerima bantuan berupa sejumlah barang atau kebutuhan dalam ber usaha yang digunakan sebagai bahan membuat usaha yang produktif, hal ini diharapkan menjadi jangka panjang untuk keluarga penerima manfaat meningkatkan ekonomi; b) pendampingan usaha keluarga penerima manfaat, yakni para pendamping yang terlibat dalam program Jatim Puspa tidak kemudian hanya memberikan modal kemudian dibiarkan, melainkan

ada pendampingan yang intens untuk mengetahui perkembangan keberlanjutan dari usaha yang dirintis tersebut; c) pelatihan peningkatan kapasitas usaha keluarga penerima harapan, dalam hal ini para pendamping program Jatim Puspa memberikan beberapa trik dalam bentuk pelatihan untuk bagaimana sebuah usaha yang didirikan tersebut bisa berkembang.

Dalam hal ini strategi yang dilakukan oleh program Jatim Puspa sifatnya berkelanjutan, hal ini sangat berbeda dengan program pemerintah lainnya yang hanya memberikan bantuan langsung tunai tanpa ada tindak lanjut yang nyata.

2. Implementasi Program Jatim Puspa terhadap Keluarga Penerima Manfaat

Program Jatim puspa ini diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur Jawa timur. Program ini khusus untuk wilayah jawa timur, namun tidak keseluruhan kabupaten. Kabupaten Bondowoso ini termasuk yang menerima program Jatim Puspa. Teknis lapangannya cukup rigit, dari pendamping desa, pemerintah desa, koordinator kecamatan, koordnator kabupaten, pemerintah kabupaten yang disini oleh Dinas Pemberdayaan dan masyarakat Desa, hingga pada tingkat provinsi. Juga programnya jelas, dengan strategi yang matang, sehingga program bisa berjalan dengan maksimal.

Selain itu, pelaksanaannya juga kepada masyarakat yang dengan syarat penerimanya kalangan tertentu yakni masyarakat yang punya

usaha, dan yang pasti pernah menerima bantuan keluarga harapan. Sehingga ini menjadi indikator tepat sasaran dari program ini kepada masyarakat yang benar membutuhkan.

Struktur pemerintahan untuk penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan ini dilakukan dengan cukup baik untuk merespon pertumbuhan ekonomi yang di perkirakan akan menurun dan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktifitas ekonomi. Mempertahankan atau meningkatkan kesejahteraan, agar tidak jatuh miskin kembali, bahkan survival menjadi pengusaha mikro sebagai profesinya. Untuk itu dalam program ini selalu di ajarkan bagaimana manajemen proses bisnis, manajemen sumberdaya manusia, manajemen keuangan dan manajemen pemasaran.

Anggaran program jatim puspa bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur melalui BKK kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa, dengan tujuan terbentuknya desa berdaya. Berdasar kepada standart operasional prosedur keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan berupa barang sebesar nominal Rp2.500.000 di tambah biaya operasional desa dan honor pendamping desa.

Dalam prakteknya peneliti menemukan ada Rancangan Anggaran Belanja yang tidak sesuai dengan bangunan komitmen apa yang menjadi orientasi besar program jatim puspa ini. Dalam biaya operasional semisal terdapat anggaran yang tidak terserap dengan baik, pemanfaatannya tidak memenuhi sesuai dengan perencanaan. Pun juga dalam pengadaan barang

yang akan di distribusikan kepada keluarga penerima manfaat tidak sesuai dengan spesifikasi barang sesuai dengan perencanaan yang sudah di rencanakan.

3. Kontrol Pemerintah Desa terhadap Keluarga Penerima Manfaat

Pemerintah desa disini memiliki tugas dan fungsi sendiri yakni kepala desa melalui keputusannya menetapkan keanggotaan tim Koordinasi Desa dan Pendamping Desa. Selanjutnya pemerintah desa menetapkan KPM sasaran hasil verifikasi dan klarifikasi, rekapitulasi hasil identifikasi kebutuhan dan potensi KPM serta daftar Pokmas KPM penerima bantuan, selanjutnya mengajukan permohonan pencairan BKK Desa Program Jatim Puspa kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur dan Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur.

Selain itu pemerintah desa berkomitmen memasukkan dana BKK Desa Program Jatim Puspa dalam APBDDes, sehingga pelaksanaan BKK Desa Program Jatim Puspa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan sebaik-baiknya dan tidak melibatkan pemberi BKK Desa ke dalam permasalahan hukum sebagai akibat kelalaian dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penerima BKK Desa.

Pemerintah desa juga menjadi obyek pemeriksaan terkait pemanfaatan BKK Desa Program Jatim Puspa, mengembalikan dana BKK Desa ke Kas Daerah Provinsi Jawa Timur, apabila terdapat

temuan sebagai hasil pemeriksaan sebesar dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

Selain itu pemerintah desa melakukan pembinaan dan pengawasan pengadaan barang dan jasa, menerima penyerahan hasil pengadaan barang dan jasa dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan dan menyalurkan bantuan kepada KPM sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis operasional.

Pemerintah desa juga menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi BKK Desa kepada Gubernur Jawa Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dan melakukan bimbingan teknis dan pendampingan kepada Pokmas KPM pasca program serta menangani pengaduan masalah dalam kegiatan Program Jatim Puspa

4. Dampak dari strategi pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam program Jatim Puspa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Bondowoso era pandemi covid-19

Program Jatim Puspa ini mempunyai sistem yang di sebut dengan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan guna memantau perkembangan pelaksanaan Program Jatim Puspa, melakukan penilaian, mendokumentasikan berbagai kegiatan sekaligus menyusun tindakan perbaikan sebagai bentuk evaluasi program. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat provinsi,

kabupaten dan desa. Monitoring dan evaluasi di tataran pengelolaan desa dilakukan oleh tim koordinasi desa, pendamping desa, dan di arahkan oleh pendamping kabupaten. Yang mana mereka mempunyai tugas dan fungsi masing-masing.

Pendamping desa melakukan pengukuran peningkatan pendapatan KPM dampungannya dengan menggunakan form evaluasi dampak atau kuesioner, hasilnya di serahkan kepada tim koordinator desa. Selanjutnya tim koordinasi desa mengumpulkan hardcopy form evaluasi dampak dan merekap hasil pengukuran peningkatan pendapatan dalam format softcopynya. Kemudian pendamping kabupaten melakukan pendataan yang sistemik untuk mengetahui kemajuan dan peningkatan pendapatan keluarga penerima manfaat setelah mendapatkan bantuan.

Jadi dengan begitu kita dapat dengan mudah mengetahui perkemabangan ekonomi keluarga penerima manfaat dari peningkatan asset usha atau pendapatan keluarga penerima manfaat setelah mendapatkan bantuan di bandingkan dengan saat sebelum mendapatkan bantuan.

IAIN JEMBER

BAB V

PEMBAHASAN

A. Strategi Perencanaan Pembangunan Ekonomi melalui Program Jatim

Puspa

Pembangunan ekonomi yang efisien membutuhkan suatu proses perencanaan yang teliti mengenai penggunaan sumberdaya publik sektor swasta harus punya peran dalam proses perencanaan. Melalui strategi pembangunan ekonomi daerah suatu daerah terdapat berbagai unsur yang saling berinteraksi satu sama lain. Pentingnya campur tangan pemerintah dalam pembangunan daerah dimaksud untuk mencegah akibat-akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah, serta menjaga agar pembangunan dan hasilnya dapat dinikmati oleh berbagai daerah yang ada.

Program Jatim Puspa hadir untuk menjawab kegelisahan masyarakat akibat pandemi Covid-19. Hal ini dilatarbelakangi dengan menurunnya pendapatan para pemilik UMKM akibat pandemi. Pemerintah merespon itu melalui program Jatim Puspa ini. Penelitian ini khusus pada wilayah kabupaten Bondowoso, yang notabennya salah satu kabupaten penerima program Jatim Puspa yang ada di Jawa Timur.

Terdapat tujuh strategi yang dibangun guna meningkatkan ekonomi masyarakat oleh Jatim Puspa ini. Strategi ini menyeluruh dari perencanaan, implementasi hingga evaluasi dari terlaksananya program Jatim Puspa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Bondowoso.

Yang menerima bantuan program Jatim Puspa ini disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat, disini hanya yang terpilih dan memenuhi syarat yang layak menjadi KPM tersebut, salah satunya masyarakat yang kondisinya dibidang kekurangan dan masuk dalam keluarga miskin yang memiliki usaha yang dibuktikan sebagai keluarga penerima PKH (Penerima Keluarga Harapan).

Dari ketujuh strategi yang disusun dalam program jatim puspa tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh *Henly Johan Siwu* bahwa strategi pembangunan ekonomi daerah dapat dikelompokkan menjadi empat yakni :⁹⁷

1) Strategi Pengembangan Fisik/Lokalitas

Tujuan strategi pengembangan fisik atau lokalitas ini adalah untuk menciptakan identitas daerah atau kota, memperbaiki basis pesona atau kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki daya tarik pusat kota dalam upaya untuk memperbaiki dunia usaha daerah. Adapun beberapa alat untuk menciptakan tujuan pembangunan ini adalah pembuatan bank tanah, pengendalian perencanaan dan pembangunan, penataan kota, pengaturan tata ruang, penyediaan perumahan dan pemukiman yang baik, penyediaan infrastruktur seperti sarana air bersih, listrik, tanaman, parkir dan sebagainya.

⁹⁷ Hanly Fendy Djohar Siwu, “*Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*” Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Universitas Sam Rantulangi Manado, hal 8 dalam <https://scolar.google.co.id>, diakses pada tanggal 28 November 2019, pukul 10.00 WIB.

2) Strategi Pengembangan Dunia Usaha

Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah karena daya tarik, kreasi atau daya tahan kegiatan dunia usaha merupakan cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat. Adapun beberapa alat untuk mengembangkan diantaranya, penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha, pembuatapusat informasi terpadu, pendirian pusat konsultasi dan pengembangan usaha kecil, pembuatan sistem pemasaran bersama, pembuatan lembaga penelitian dan pengembangan.

3) Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karenanya kualitas dan ketrampilan sumberdaya manusia adalah suatu keniscayaan. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan cara pelatihan dengan sistem *customized training*, pembuatan bank keahlian, penciptaan iklim yang mendukung bagi berkembangnya lembaga pendidikan dan ketrampilan di daerah, pengembangan lembaga pelatihan bagi penyandang cacar an sebagainya.

4) Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Kegiatan pengembangan masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan suatu kelompok masyarakat tertentu disuatu daerah. Dalam bahasa populer sekarang sering dikenal dengan

istilah kegiatan pemberdayaan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan manfaat sosial, misal penciptaan proyek-proyek padat karya untuk memenuhi keuntungan dari usahanya.

Keempat strategi tersebut sesuai dengan dan terdapat dalam unsur-unsur yang terdapat dalam strategi yang di pakai oleh program Jatim Puspa dalam upaya membangun perekonomian masyarakat Kabupaten Bondowoso.

B. Implementasi Program Jatim Puspa terhadap Keluarga Penerima Manfaat di Bondowoso

Program Jatim Puspa pada hakikatnya merupakan implementasi terhadap kewajiban Negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar warga miskin agar mereka dapat bertahan hidup, kemudian secara bertahap berdaya keluar dari kemiskinan. Karena itu program dilaksanakan berlandaskan prinsip dasar “membantu dengan hati” yang mengedepankan empati sosial. Program ini tidak hanya bertujuan mengembangkan potensi ekonomi rumah tangga sangat miskin, tetapi juga harkat dan martabat, motivasi, rasa percaya diri dan harga diri mereka, serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat (memanusiakan manusia) antara lain dengan tetap memberikan penghormatan pada KPM untuk memberikan keputusan terhadap jenis usulan kebutuhan anggota rumah tangga.

Kegiatan Program Jatim Puspa dilaksanakan dengan membuka ruang publik, partisipasi aktif pemerintah desa dan lembaga

kemasyarakatan, serta masyarakat dalam pengambilan keputusan dengan menekankan pada musyawarah dan mufakat melalui panggilan masalah lewat dialog dan tukar pengalaman di antara warga. Rembuk warga menjadi wahana artikulasi partisipasi warga untuk mengkaji tentang kelayakan dan pemetaan kebutuhan KPM sesuai dengan kearifan local dan kondisi aktual.

Pelaksanaan Program Jatim Puspa secara terbuka dan di pertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun publik yang berkepentingan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku dan juga melibatkan berbagai unsur sesuai kompetensi yang dimiliki, yakni satuan kerja perangkat daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tenanga pendamping, dunia usaha dan masyarakat yang bekerja secara sinergis dan terpadu.

Hajat besar dari program ini adalah kesejahteraan masyarakat. Menurut M Umar Chapra makna sejahtera yakni keadaan dimana terjadi keseimbangan antara keadaan material dan sipiritual yang di peroleh dari sumber daya yang ada. Dengan demikian kesejahteraan dalam islam tidak hanya di ukur dari terpenuhinya kebutuhan materi saja tetapi juga terpenuhinya kebutuhan spiritual.⁹⁸

Dengan suksesnya program ini harusnya dapat mampu memelihara agama (*Ad-Dien*), memelihara jiwa (*An-Nafs*), memelihara akal (*Al-aql*), Memelihara Keturunan (*An-nasl*), memelihara harta (*Al-maal*). Hal ini

⁹⁸ Anindya Aryu Inayati, *Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra*, Pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol-2 Desember 2013, 14

sangat erat sekali kaitannya dengan tujuan utama syariat islam, yakni mewujudkan kemaslahatan untuk ummat baik di dunia maupun di akhirat.

Program ini sudah baik hanya saja ada beberapa hal yang perlu di evaluasi agar menjadi ruang kesadaran bersama dalam merancang peradaban kesejateraan masyarakat. Dalam pelaksanaan program ini peneliti menilai masih jauh dari panggang api terhadap penerapan konsep kesejahteraan islam. Itu terbukti dari penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan masih terdapat ketidakjujuran dalam realisasinya.

C. Kontrol Pemerintah Desa terhadap Keluarga Penerima Manfaat di Bondowoso.

Kontrol dari pemerintah desa merupakan bagian dari tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Hal ini menjadi tolak ukur bahwa desa mempunyai pengaruh dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Sepertinya yang termaktub dalam penjeleasan Cornelis bahwa pemerinah desa itu memiliki tiga bagian yang dapat dipilih untuk menjadi bahan kebiiaksanaan dalam memimpin pemerintah desa., yakni ;⁹⁹

1) Kebijakanaksanaan Tidak Langsung

Kebijaksanaan ini diarahkan kepada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya pembangunan pedesaan melalui pengembangan kegiatan sosial ekonomi, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, penguatan kelembagaan serta penyempurnaan

⁹⁹ Cornelis Rintuh dan Miar, *Kelembagaan dan Ekonomi Rakya.*, 55

peraturan perundang-undangan yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

2) Kebijakan Langsung

Kebijakan ini diarahkan pada peningkatan akses terhadap prasarana dan sarana yang mendukung penyediaan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan, peningkatan produktivitas dan pendapatan khususnya masyarakat berpendapatan rendah.

3) Kebijakan Khusus

Kebijaksanaan ini diutamakan pada penyiapan penduduk untuk dapat melakukan kegiatan sosial ekonomi sesuai dengan budaya setempat. Upaya khusus ini pada dasarnya mendorong dan memperlancar proses transisi dari kehidupan subsisten menjadi kehidupan pasar. Bagian dari kebijaksanaan khusus adalah peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap kegiatan usaha penduduk berupa jaminan kepastian usaha dan kemudahan akses serta pembentukan lembaga yang memberi layanan secara terpilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam hal ini program Jatim Puspa bagi pemerintah desa termasuk dalam kebijaksanaan langsung, yakni pemerintah desa langsung yakni penyediaan pangan, sandang, kesehatan dan pendidikan serta peningkatan produktivitas dan pendapatan khususnya bagi masyarakat

yang berpendapatan rendah, dalam hal ini para keluarga penerima manfaat.

Pembangunan pedesaan diharapkan ikut berperan sebagai basis pertumbuhan ekonomi nasional yang dapat menciptakan lapangan kerja berkualitas di pedesaan yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan infrastruktur di kawasan permukimannya. Selain itu, meningkatnya akses dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Upaya pencapaian tersebut akan dilakukan melalui enam langkah kebijakan pokok yakni :¹⁰⁰

- a) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah desa yang demokratis dan partisipatif
- b) Memantapkan peran lembaga kemasyarakatan dan mengembangkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat.
- c) Mewujudkan kesejahteraan keluarga dan sosial budaya masyarakat yang dinamis.
- d) Mewujudkan produktifitas dan usaha ekonomi produktif masyarakat yang maju, mandiri dan berorientasi pasar yang didukung lembaga keuangan mikro pedesaan
- e) Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna berwawasan lingkungan.

¹⁰⁰ Hikmat Kusumaningrat, Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2009), hal.152.

- f) Terus mengupayakan peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana pedesaan secara lebih merata.

D. Dampak Strategi Pembangunan Ekonomi Yang Dilakukan Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Program Jatim Puspa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat kabupaten Bondowoso Era Pandemi Covid-19

Pemberdayaan masyarakat dan desa ini akan terasa setelah dari sekian strategi pada program itu terlaksana dengan baik. Karena yang dituju dari sebuah program tersebut adalah kesejahteraan masyarakat. Seperti kita tahu bersama bahwa pandemi ini sangat berakibat pada perekonomian masyarakat. Oleh karenanya pemerintah melalui program Jatim Puspa berinisiatif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat agar masyarakat menjadi sejahtera.

Seperti yang dijelaskan oleh M. Umer Chapra bahwa memaknai sejahtera bukan berarti kaya namun berarti ideal yakni keadaan dimana terjadi keseimbangan antara keadaan material dan spiritual yang diperoleh dari sumber daya yang ada. Oleh karena itu, sebuah negara islam menurut M. Umer Chapra dapat dikatakan sebagai negara yang sejahtera atau ideal apabila martabat batin dan moral masyarakat meningkat, kewajiban masyarakat sebagai khalifah dibumi terhadap daya alam telah ditunaikan dan tegaknya keadilan serta lenyapnya penindasan. Negara sejahtera

menurut islam, bukan negara kapitalis atau sosialis, akan tetap negara dengan konsep Islam dan kehidupan Islami.¹⁰¹

Sehingga program yang tepat sasaran sangat relevan dengan pendapatnya M. Umer Chapra yang memaknai kesejahteraan dengan tegaknya keadilan dan lenyapnya penindasan. Karena salah satu tujuan program ini untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang tertimpa musibah akibat Covid-19.

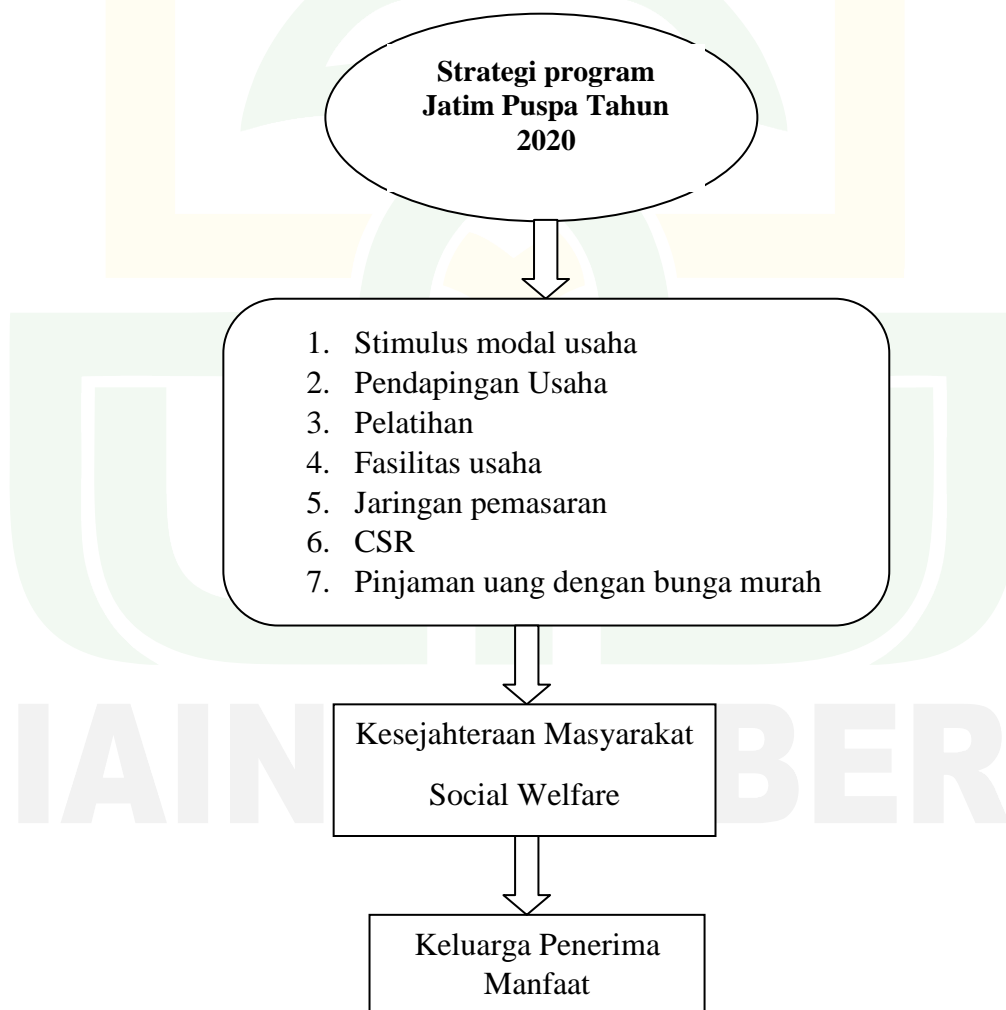
Hal ini juga relevan dengan UU No 11 tahun tentang Kesejahteraan sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.¹⁰²

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipas, profesionalitas dan keberlanjutan. Dalam hal ini penyegaran kesejahteraan sosial bertujuan untuk *pertama*, meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup. *Kedua*, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.

¹⁰¹ Anindya Aryu Inayati, *Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra*, Pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol-2 Desember 2013, 14

¹⁰² Undang-Undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Ketiga, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial. *Keempat*, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan. *Kelima*, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, dan. *Keenam*, meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.



Sebelum pandemi Covid 19, kondisi masyarakat penerima bantuan itu telah menerima bantuan pemerintah berupa PKH (program keluarga harapan). Program ini hanya bergerak dibidang pemberian bantuan keluarga kurang mampu, bukan program pengembangan usaha. Namun saat adanya pandemi ini, perekonomian para pelaku usaha tersebut menurun drastis, apalagi saat ada peraturan harus bekerja dari rumah. penghasilan para pelaku usaha juga mengalami penurunan bahkan lebih dari 50%. Sehingga ini menjadi masalah yang harus segera diselesaikan.

Hadirnya program Jatim Puspa ini menjadi solusi untuk meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat. Hal ini disebabkan program tersebut melakukan gerakan masif pada pembinaan pelaku usaha. Sehingga para pelaku usaha merasa terbantu, karena bantuan tersebut tidak cukup pada pemberian barang modal untuk usaha melainkan juga pada jaringan hingga pemberian bantuan pinjaman modal. Karenanya para pelaku usaha diharapkan bisa lebih kreatif dalam mengembangkan usahanya.

Terdapat tujuh strategi yang di pakai oleh Jatim Puspa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagai berikut

1. Stimulus modal usaha

Yakni para penerima keluarga manfaat diberikan barang yang digunakan untuk modal usaha. Stimulus ini berbentuk barang yang akan digunakan pelaku usaha menjadi modal dalam megembangkan usahanya tersebut.

2. Pendampingan Usaha KPM oleh pendamping Desa

Pendampingan usaha dilakukan oleh para pendamping desa yang telah dipilih dan mendapatkan surat tugas dari pimpinan provinsi Jawa Timur. Pendampingan ini dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi langsung terkait kendala dan peluang yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tersebut.

3. Pelatihan meningkatkan kapasitas usaha KPM

Pelatihan ini berupa panitia pelaksana program jatim puspa ini mendatangkan para ahli dibidang usaha sesuai yang dibutuhkan masyarakat penerima bantuan untuk menjadi mentor sekaligus melatih agar usaha yang dilakukan memiliki kapasitas yang baik dan layak untuk di jual.

4. Fasilitas pemasaran produk usaha

Pemberian fasilitas pemasaran produk ini untuk menunjang para pelaku usaha dalam penjualannya laku dan terjual. Pemasaran produk ini dimulai dari analisis pasar, mengantarkan produk ke pelanggan hingga menerima umpan balik dari pelanggan tersebut. Sehingga fasilitas ini tidak bergerak pada satu arah saja.

5. Jaringan Usaha KPM

Jaringan usaha ini digunakan untuk mendukung pemasaran produk yang ada. Sehingga para pelaku usaha dibantu oleh para pendamping untuk menciptakan jaringan usaha agar pelangganya bertambah dan meluas, sehingga dapat meningkatkan pendapatan juga.

6. Melibatkan dinas usaha melalui CSR untuk ikut memberdayakan KPM.

Yakni memanfaatkan peluang dari instansi lain untuk mempermudah para pelaku usaha mengembangkan usahanya tersebut. Sehingga akan tercipta pemberdayaan para keluarga penerima manfaat.

7. Pinjaman uang dengan bunga murah

Strategi yang terakhir /ini apabila stimulus modal usaha kurang memenuhi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya, sehingga para pelaku usaha tersebut disediakan pinjaman uang dengan bunga mura agar para pelaku usaha bisa tetap melanjutkan usahanya serta mengembangkannya menjadi lebih baik.



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik benang merah bahwa :

1. Ada tujuh strategi Jatim Puspa yang menjadi acuan terlaksananya program ini diantaranya stimulus modal usaha ekonomi produktif, pendampingan usaha KPM oleh pendamping desa, pelatihan peningkatan kapasitas usaha KPM, fasilitasi pemasaran produk KPM, menciptakan jaringan usaha KPM, melibatkan dunia usaha melalui CSR untuk ikut serta memberdayakan KPM dan fasilitasi pinjaman murah dan mudah untuk pengembangan usaha KPM melalui program bibit jamur bank.
2. Implementasi program Jatim Puspa ini terlaksana dengan membuka ruang publik partisipasi aktif pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan, serta masyarakat dalam pengambilan keputusan dengan menekankan pada musyawarah dan mufakat melalui panggilan melalui dialog dan tukar pengalaman. Ini menjadi wahana artikulasi partisipasi untuk mengkaji kelayakan dan pemetaan kebutuhan KPM sesuai kearifan lokal dan kondisi aktual.
3. Kontrol pemerintah desa terhadap keluarga penerima manfaat meliputi fasilitasi pelaksanaan sosialisasi keluarga penerima manfaat, melaksanakan verifikasi, identifikasi kebutuhan dan potensi KPM bersama pendamping desa dan kabupaten, memberi fasilitas pengadaan

dan penyaluran bantuan barang kepada KPM, hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman umum dan petunjuk operasional.

4. Dampak program Jatim Puspa terhadap pembangunan ekonomi masyarakat sangat nampak, dengan adanya program ini masyarakat keluarga penerima manfaat sangat merasakan terbantu dan pendapatan perharinya semakin meningkat. Dampak lain dari itu adalah penyediaan jaringan pemasaran yang membuat semakin muncul kreatifitas para penerima manfaat untuk mengembangkan usahanya.

B. SARAN

Dengan adanya penelitian ini di harapkan kepada pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bondowoso, pendamping bondowoso, perangkat desa, tim koordinasi desa dan pendamping desa serta keluarga penerima manfaat akan sama-sama berkomitmen di tengah Covid-19 ini dapat memulihkan stabilitas ekonomi terutama di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah. Agar keluarga penereima manfaat ini bisa terus mendapatkan motifasi, inovasi untuk tetap bertahan di tengah sulitnya meningkatkan pendapatannya.

Agar program ini bisa berajalan dengan lebih baik kedepan maka perlu kiranya ada beberapa rekomendasi dan saran yang menjadi evaluasi demi tercapainya pembangunan ekonomi masyarakat.

Pertama, demi terlaksananya transparansi anggaran ke publik semestinya ada sistem pengawasan di lakukan oleh dinas pemerintah provinsi jawa timur berimitra dengan Kejaksaan Tinggi Jawa timur maupun dengan aparaturnya keamanan yang lain. Kedua, kita hidup di mana mayoritas masyarakatnya adalah muslim, semestinya nilai-nilai yang di terapkan berasaskan konsep-konsep ekonomi islam, agar program ini dapat memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, dan menjaga kerukunan antar masyarakat. Ketiga, dalam pengadaan barang harusnya lebih mengutamakan toko-toko terdekat yang masih satu desa agar terjadi kebermanfaatan di daerah desa tersebut, hal ini bisa di atur dalam pedoman umum.

Maka dari ini dengan adanya pembahasan strategi ekonomi pembangunan desa ini manajdi amunisi nalar pengembangan sumber daya manusia untuk bisa di pelajari dan dd baca oleh khalayak luas.

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal. 2014. *Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Bhinadi, Ardianto, 2017. *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. (Yogyakarta : Deepublish)
- BPS Jawa Timur tahun 2020
- Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada).
- Effendy. 2007. *Strategi Public Relation*, (Bandung; PT Remaja)
- Eko Wahyudi, Arif. Ahmad Riyadh U. Balahmar. Jurnal Judul “*Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa*” Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Fahrudin, Adi. 2018. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. (Bandung : PT Refika Aditama)
- Hanly Fendy Djohar Siwu, “*Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*” Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Universitas Sam Rantulangi Manado. <https://scholar.google.co.id>.
- Hikmat Kusumaningrat. 2009. *Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Lia Amalia. 2007. *Ekonomi Pembangunan*. (Yogyakarta : Graha Ilmu)
- Lincolid Arsyad. 2014. *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta; STIE YKPN)
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (America: Arizona State University).
- Michel P Todaro dan Stephen C Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : Erlangga)
- Mintzberg. 2007. *Menejemen Strategis Dan Kebijakan Perusahaan*, (Jakarta, Erlangga).
- Muhammad Nafik Hadi. 2008. *Ekonomi ZISWAQ (zakat, infak, shodaqoh dan waqaf)*, (Surabaya : Ifdi dan Cenforis)
- Mundir. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: STAIN Press,).

- Patta Rapana dan Zulfikry Sukarno. 2017 *Ekonomi Pembangunan*, (Makassar : CV Sah Media)
- Paul Peter Alson Jerry. 1993. *Consumer Behavior Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran* (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama)
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. 2008. *Ekonomi Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada)
- Rachim AF, Abd. 2015. *Ekonomi Pembangunan*. (Yogyakarta: CV Andi Offset)
- Rachmat. 2014. *Management Strategik* (Bandung: Cv Pustaka Setia).
- Rangkuti Freddy. 2009. *Strategi Promosi Yang Kreatif Dan Analisis Kasus*, (Jakarta. Gramedia Pustaka Utama)
- S. Nasution. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. (Jakarta: PT Bumi Aksara)
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian*. (Jakarta: PT Kencana Predana)
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta)
- Sukardi. 2014. *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara)
- Teni Marfiani, Sri Hartoyo dan Manuwoto. 2009. *Analaisis Potensi Ekonomi dan Strategi Pembangunan Ekonomi di Bogor Barat*, Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah.
- UU No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat
- www.kompas.com

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Baijuri
NIM : 0839219028
Program Studi : Ekonomi Syariah
Institusi : Pascasarjana IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul **“Strategi Pembangunan Ekonomi Desa Era Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Program JATIM PUSPA Di Kabupaten Bondowoso)”**.” adalah hasil penelitian/karya sendiri.

Bagian atau data tertentu yang saya peroleh dari perusahaan atau lembaga, dan/atau saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Jember, 31 Mei 2021
Saya yang menyatakan



BAIJURI
NIM. 0839219028



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 Kode Pos: 68136
Website:www.iain-jember.ac.id Email: pps.iainjbr@gmail.com

No : B.254/In.20/PP.00.9/PS/2/2021 18 Januari 2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk
Penyusunan Tugas Akhir Studi

Kepada Yth.
Kepala Dinas DPMD Kabupaten Bondowoso
di-

tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir Studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Bajjuri
NIM : 0839219028
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenjang : S2
Judul : Strategi Pembangunan Ekonomi Desa Melalui Program Jatim Puspa (Pemberdayaan Usaha Perempuan) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bondowoso di Masa Pandemi COVID 19
Pembimbing 1 : Dr. H. Misbahul Munir, M.M.
Pembimbing 2 : Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.
Waktu Penelitian : ± 3 bulan (terhitung mulai tanggal di terbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Direktur

Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A.
NIP. 196101041987031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428104 Fax. (0331) 427005 Kode Pos: 68136
Website:www.iain-jember.ac.id Email: pps.iainjbr@gmail.com

No : B.254/In.20/PP.00.9/PS/2/2021 18 Januari 2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk
Penyusunan Tugas Akhir Studi

Kepada Yth.
-
di-

tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir Studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Bajjuri
NIM : 0839219028
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenjang : S2
Judul : Strategi Pembangunan Ekonomi Desa Melalui Program Jatim Puspa (Pemberdayaan Usaha Perempuan) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bondowoso di Masa Pandemi COVID 19
Pembimbing 1 : Dr. H. Misbahul Munir, M.M.
Pembimbing 2 : Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.
Waktu Penelitian : ± 3 bulan (terhitung mulai tanggal di terbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Direktur

Prof. Dr. H. Abd. Halim Soebahar, M.A.
NIP. 196101041987031006



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BONDOWOSO
JLN. KIS. MANGUNSARKORO. NO. 136 Telp 423593
BONDOWOSO

Jember, 25 April 2021

Nomor : 043/ /435/2021
Lampiran : 1
Perihal : **Surat Keterangan Selesai Penelitian**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso, menerangkan bahwa mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Ekonomi Syariah Intitut Agama Islam Negeri Jember :

Nama : BAIJURI
Nim : 0839219028
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Pasca Sarjana Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari Tanggal 01 Februari – 01 Maret 2021 di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan tesis penelitian yang berjudul **“Strategi Pembangunan Ekonomi Desa Era Pandemi Covid-19 Melalui Program Jatim Puspa (Pemberdayaan Usaha Perempuan) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Bondowoso”**

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
KABUPATEN BONDOWOSO



HAERIAH YULIATI, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19680910 198809 1 002

PEDOMAN OBSERVASI

PERTANYAAN

1. Bagaimana strategi pembangunan ekonomi melalui program Jatim Puspa?
2. Bagaimana implementasi program Jatim Puspa terhadap keluarga penerima manfaat di Bondowoso?
3. Bagaimana kontrol pemerintah desa terhadap keluarga penerima manfaat di Bondowoso?
4. Bagaimana dampak strategi pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam program Jatim Puspa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Bondowoso era pandemi covid-19?

DATA DATA :

1. Secara umum Program jatim puspa
 - a. Apa yang di maksud dengan program jatim puspa
 - b. Siapa penerima jatim puspa
 - c. Usaha apa saja yang di biyayai oleh jatim puspa
 - d. Data peningkatan penghasilan setelah mendapat bantuan
2. Terkait Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa bondowoso
 - a. Struktur Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa bondowoso
 - b. Data daftar calon penerima jatim puspa
 - c. Data masyarakat pengusaha UMKM terdampak covid 19
 - d. Program UMKM dengan adanya covid-19
 - e. Visi Misi Dinas Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa bondowoso

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara

1. Bagaimana strategi pembangunan ekonomi melalui program Jatim Puspa?
2. Bagaimana implementasi program Jatim Puspa terhadap keluarga penerima manfaat di Bondowoso?
3. Bagaimana kontrol pemerintah desa terhadap keluarga penerima manfaat di Bondowoso?
4. Bagaimana dampak strategi pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam program Jatim Puspa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Bondowoso era pandemi covid-19?
5. Apakah seluruh anggaran program ini sudah terealisasi dengan baik?
6. Apakah ada syarat atau ketentuan masyarakat untuk mendapatkan program ini?
7. Apakah ada sistem pengawasan dari Kejaksaan Tinggi Jawa timur atau aparat keamanan untuk mengaudit program ini?
8. Dari sekian banyak keluarga penerima manfaat mayoritas punya usaha apa?
9. Dalam proses pengadaan barang apakah ada ketentuan toko atau penyedia barang yang sudah di atur dalam standar operasional dalam program ini?
10. Apa fungsi dari Tim Koordinasi desa setelah bantuan ini terealisasi?
11. Bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh pendamping desa setelah bantuan selesai?
12. Apakah ada sistem pajak yang berlaku dalam program ini?

B. Observasi

1. Alamat atau lokasi perusahaan atau institusi.
2. Mendatangi Keluarga Penerima manfaat
3. Mengamati sistem operasional program

C. Dokumentasi

1. Foto kegiatan program jatim puspa
2. Foto keluarga penerima manfaat saat menjalani proses usaha
3. Foto barang-barang yang di terima oleh keluarga penerima manfaat



**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA BONDOWOSOS**

No.	Tanggal	Keterangan
1.	18 Januari 2021	Permohonan surat ijin penelitian dari pasca IAIN Jember
2.	01 februari 2021	Interview dengan Kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa bondowoso
3.	07 februrari 2021	Interview kepala bidang pemberdayaan masyarakat dan desa bondowoso
4.	27 februari 2021	Interview dengan staf ahli ekonomi dan masyarakat
5.	10 maret 2021	Interview dengan kepala desa kembang
6.	25 maret 2021	Interview dengan tim koordinasi desa
7.	13 april 2021	Interview bpendamping desa
8.	25 april 2021	Interview keluarga penerima manfaat
9.		
10.		

TRANSKIP INTERVIEW

Hari, Tanggal : Kamis, 01 Februari 2021

Interview dengan Ibu Yulianti Kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa bondowoso

Jam 09:30 peneliti tiba di kantor dinas, peneliti langsung menemui Ibu yulianti karena sebelumnya peneliti sudah konfirmasi terlebih dahulu bahwasannya pada tanggal 01 Februari 2021 peneliti akan melakukan wawancara. Tak lama kemudian ibu yulianti menemui saya dan beliau mempersilahkan peneliti untuk masuk ruangan.

Peneliti : Maaf mengganggu waktu ibu, saya dari mahasiswa pasca sarjana IAIN Jember yang akan melaksanakan penelitian disini apakah ibu hari ini bisa diwawancara ?

Ibu yulianti : Monggo mas, sekarang tidap apa apa.

Peneliti : Baik, mohon waktunya sebenatar ibu, kebetulan disini saya akan menanyakan terkait selayang pandang dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.

Ibu yulianti : jadi begini mas, Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi-fungsi : Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan desa dan kelurahan; Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan sosial budaya masyarakat; Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Peneliti : Terus pertanyaan selanjutnya ibu, terkait struktur organisasinya seperti apa ?

Ibu yulianti : struktur ini yang dapat mempermudah manajerial organisasi dalam pelaksanaan program mas, dan di antara mereka mempunyai tugas dan fungsi masing, sebagai berikut susunanannya Kepala Dinas, Sekretariat, Sub Bagian Program, Evaluasi dan Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Bidang Pemberdayaan Desa, Seksi Kelembagaan dan Pemerintahan Desa, Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa, Seksi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan Mandiri, Seksi Pengembangan Sumber Daya Masyarakat, Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Alam, Seksi Pelestarian Budaya dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan, Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

Peneliti : Selanjutnya ibu, bagaimana tanggapan ibu terkait program Jatim Puspa?

Ibu yulianti : Inisiatif dari Gubernur Jawa Timur untuk mengadakan Jatim puspa ditengah pandemi ini sangat pas sekali menurut saya. Dengan strategi dan cara-cara yang sistematis dan baik. Sepengetahuan dan sampai saat ini kami lakukan terkait strategi yang dilakukan dalam program Jatim puspa ini yang

pertama memberikan stimulus modal usaha ekonomi produktif, pendampingan usaha KPM oleh pendamping desa, pelatihan peningkatan kapasitas usaha KPM. Kekuatan program ini sebenarnya sangat bagus di wilayah system menajerial, jadi tidak ujuk-ujuk memberikan bantuan, itu semua orang, instansi bisa memberikan. Hanya saja pembedaanya adalah kita dapat memberikan motivasi, mengarahkan, sekaligus mendampingi penerima hingga mampu menaikkan skala ekonominya lebih baik

Peneliti : Selanjutnya ibu, bagaimana menurut ibu terkait banyak dari masyarakat yang kehilangan nilai mata ekonominya di tengah covid 19 ini terutama di sektor UMKM?

Ibu Yulianti : Pendaayaan Jatim Puspa ini dapat memberikan gerakan alternative pada masyarakat tentu dengan di dukung oleh strategi yang di miliki oleh program ini, strategi yang di gunakan yakni memfasilitasi pemasaran produk KPM agar segmentasi pasar benar-benar dapat diwujudkan di sektor UMKM, sehingga dapat menciptakan jaringan usaha KPM yang itu dapat memberikan akses terbukanya penjual dan pembeli. Selain itu program pemberdayaan usaha perempuan ini melibatkan dunia usaha melalui CSR untuk ikut serta mbedayakan KPM dan juga memberikan fasilitas pinjaman murah dan mudah untuk pengembangan usaha KPM melalui Program Bibit Jamur BANK. Dengan begini penerima manfaat terbuka lebar untuk terus melanjutkan usahanya pada ruang akses yang lebih luas. Kreatifitas serta inovasi selama kurang lebih pendampingan dilakukan agar KPM selalu menggerakkan usahanya kemedan yang baik dalam meningkatkan pundi-pundi ekonominya.

Peneliti : Baik Ibu, saya kira sudah cukup. Saya sudah mendapatkan data data terkait penelitian ini, saya berterimakasih banyak atas waktunya. Dan mohon maaf mengganggu waktu njenengan pak.

Ibu Yulianti : Sama-sama mas, semoga diberikan kelancaran.

Peneliti : (Peneliti pun meninggalkan ruangan dan mengucapkan salam)

Hari, Tanggal : Rabu, 10 maret 2021

Interview Bapak Buzairi Kepala Desa yang mendapat Program Jatim Puspa

Jam 09:00 Peneliti tiba di balai kantor kepala desa potong Bapak Buzairi, dan peneliti masuk ruangan dan bapak hamid mempoersilahkan saya masuk.

Peneliti : Maaf mengganggu waktunya pak saya dari mahasiswa pascasarjana iaia jember yang akan melakukan penelitian disini, apakah bapak hari ini bisa?

Bapak buzairi : Monggo mas sekarang saya bisa

Peneliti : Baik saya mulai pak, apakah balai desa kembang ini mendapatkan bantuan program jatim puspa?

Bapak buzairi : iyaa mas benar. Program pemberdayaan usaha perempuan satu tahun yang lalu.

Peneliti : setiap penerima manfaat menerima besaran berapa dan berapa jumlah penerimanya pak satu desa ini ?

Bapak buzairi : keluarga penerima manfaat itu menerima dalam bentuk barang sebesar pembelian berjumlah 2.500.000,00 ini sesuai dengan geliat usaha mereka yang kiranya mampu

mengembangkan usahanya. Satu desa ini ada 98 penerima manfaat. Dan bantuan ini langsung dari ibu gubernur.

Peneliti : satu desa ini yang banyak pada usaha apa saja pak?

Bapak Buzairi : disini banyak mas, ada yang usaha jual gorengan, jual bakso, jual es, peracangan. Ada yang jual pecahan belah,ada pula yang jual baju, dagang pulsa dan masih banyak lagi.

Peneliti : bagaimana bapak melakukan kontroling dan evaluasi terhadap KPM setelah mereka menerima bantuan?

Bapak Buzairi : Kami dari perangkat desa selalu membangun komunikasi dan silaturahmi yang baik dengan keluarga penerima manfaat guna mengetahui sejauh mana perkembangan dan kemajuan dari setiap usahanya. Memastikan bantuan yang di terima penerima dapat dimanfaatkan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan. Kami juga melakukan kegiatan pertemuan kelompok secara berkala, pembinaan berupa bimbingan teknis guna peningkatan sumber daya manusia, serta melewati forum tersebut kita senantiasa memberikan motifasi, dorongan serta menerima bertukar pendapat mengenai Kendal-kendala yang di hadapi, bersyukur sejauh ini barang yang diberikan dari program ini dapat memberikan peningkatan ekonomi yang lebih baik, wabil khusus bisa mengurangi angka kemiskinan pada desa kami.

Peneliti : Yaa saya ucapkan terima kasih bapak,Pertanyannya sudah terjawab semua.

Bapak buzairi : Sama-sama mas semoga diberi kelancaran sampai proses akhir

Peneliti : Peneliti pun meninggalkan ruangan dan mengucapkan salam.

Hari, tanggal : Kamis, 25 maret 2021

Interview dengan penerima manfaat ibu wahyu

Pukul 08.30 Wib peneliti langsung menuju rumah ibu wahyu, kebetulan ibu wahyu sedang tidak ada aktifitas kerja.

Peneliti : Maaf mengganggu waktunya saya dari mahasiswa pasca sarjana iain jember yang akan sedikit banyak bertanya terkait bantuan program jatim puspa ibu wahyu.

Ibu wahyu : Monggo mas dipersilahkan.

Peneliti : ibu usahanya apa dan dapat bantuan barang apa?

Ibu wahyu : saya usaha jual bakso mas, telah lama saya dengan keluarga merintis usaha ini. Alhamdulillah, berkat bantuan jatim puspa ini saya mendapat bantuan barang berupa rombongan. Kompor, gas, wajan, baskom serta alat pendukung yang lainnya semacam tepung, gula dan kecap saos botol.

Peneliti : bagaimana dampaknya setelah mendapatkan bantuan ini ibu wahyu?

Ibu Wahyu : Saya bahagia sekali adanya program Jatim puspa ini, sangat membantu perekonomian keluarga saya. Saya jualan bakso rombongan gitu, saya memiliki tanggungan dua anak sekolah, anak pertama saya kelas 2 SMP, anak keduanya anak saya kelas 5 SD, sama-sama butuh biaya untuk sekolah. Iya memang saat pandemi ini sekolah libur, tapi ya tetap masuk walaupun hanya dikasih tugas dari gurunya. Makanya saya khawatir maka saya belikan anak-anak buku. Dulu sebelum dapat bantuan Jatim puspa pendapatan saya saat pandemi turun drastis, sebelum pandemi saya bisa untung tiap harinya dengan 75 sampai 100 ribu, dan saat pandemi hanya sekitar 25 sampai 50 ribu. Untuk seluruh kebutuhan

keluarga saya kurang, karena beras dan kebutuhan pokok kami beli. Dan setelah ada Jatim Puspa ini, alhamdulillah penghasilan kami berangsur membaik. Ya memang kami diajari bagaimana membangun jaringan, diajari pemasaran, dan dikasih bantuan modal. Pokoknya sangat membantu program ini untuk keberlangsungan perekonomian keluarga

Peneliti : Terima kasih bapak untuk waktunya, karena diterima dengan baik

Ibu Wahyu : Sama –sama mas semoga lancar.



DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



Gambar 1.1 Wawancara dengan Bapak Buzairi Kepala Desa Kembang pada tanggal 10 Maret 2021.



Gambar 1.2 Wawancara dengan Bapak Perangkat Desa Sukowono pada tanggal 25 Maret 2021.

IAIN JEMBER



Gambar 1.4 Wawancara bersama Ibu Haeriyah Yulianti Kepala dinas Pemberdayaan masyarakat desa Bondowoso pada tanggal, 25 Februari 2021.



Gambar 1.5 Foto Bersama Ibu Sri Purwanti Penjual Bakso pada tanggal, 29 Maret 2021.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli. Telp.(0331) 428114 Fax. (0331) 427005 KodePos: 68136
Website:www.iain-jember.ac.id Email: pps.iainjbr@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: B. 1121/In.20/2/PP.00.9/05/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama	:	Baijuri
NIM	:	0839219028
Prodi	:	Ekonomi Syariah
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	2 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	5 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	13 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	2 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	3 %	20 %
Bab VI (Penutup)	2 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 31 Mei 2021

an - Direktur,
Wakil Direktur



Dr. H. Aminullah, M.Ag.
NIP. 196011161992031001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin

BIODATA PENULIS



Nama : Baijuri
NIM : 083 143 020
TTL : Bondowoso, 25 Juli 1995
Jurusan : Ekonomi Syariah
Alamat : Dsn. Sumbersuko Barat RT/RW 006/002 ds. Sumber Suko
Kec. Curahdami – Kab. Bondowoso
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
No HP : 085257761586

1. Riwayat Pendidikan

- a. SDN SUMBERSUKO 02
- b. SMPN 1 BINAKAL
- c. MAN BONDOWOSO
- d. S1 IAIN Jember
- e. S2 IAIN Jember

2. Pengalaman Organisasi

- a. Teater Arwah MAN Bondowoso.
- b. Ketua HMPS PS Periode 2015-2016.
- c. Ketua Rayon FEBI IAIN Jember Periode 2017-2018
- d. Ketua Cabang PMII Jember Periode 2019-2020.
- e. Pengurus PB PMI Periode 2021-2024.